BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa hal dalam Harian Radar Jogja dari edisi 1 September hingga 31 Oktober 2008 yang lalu mengenai proses pengisian masa jabatan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode berikutnya selama 5 tahun masa tugas.

Dari dua bulan tersebut, Radar Jogja menunjukkan adanya dukungan positif terhadap Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX untuk kembali bertahta bahkan diharapkan dapat berlangsung seumur hidup.

Hal tersebut jelas terlihat dari 51 berita yang terkait 70.6 % atau 36 berita memilih sikap dukungan penetapan dan sesuai dengan judul berita utama Radar Jogja "*HB X Bersedia Jadi Gubernur Terus*" tertanggal 27 September 2008.

Ekspos berita pemilihan banyak muncul pada halaman 3 Radar Jogja yang mencapai 39.2% atau sebanyak 20 berita dengan tingkat nilai berita tinggi mencapai 62.7% di 32 berita yang ada. Ternyata isu penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY selama bulan September dan Oktober 2008 menempati posisi yang dominan serta jarang absen menjadi headline Radar Jogja.

Sedangkan ulasan atau berita yang keluar di Harian Radar Jogja lebih banyak berupa berita pendek dengan kisaran 6-10 paragraf sebanyak 21 berita atau 41.2%. Posisi seperti ini memperlihatkan bahwa media telah melakukan exposure media yang cukup tinggi sehingga menciptakan opini publik.

Tingginya pejabat Negara yang memberikan keterangan atau komentar terhadap isu pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dari pejabat lokal semakin memperkuat opini publik untuk mengarah pada sikap dukungan penetapan. Prosentase pejabat Negara yang memberikan pernyataan mencapai 33.3% atau di 17 dari 51 berita yang ada sedangkan Wakil Rakyat sebanyak 14 berita atau 27.5%.

Walaupun ada tren pergeseran isu dari sikap dukungan pemilihan dan netral pada awal hingga pertengahan bulan September 2008, namun secara tegas tren tersebut kemudian bergeser pada sikap dukungan penetapan dengan berita-berita yang menginginkan dwi tunggal Sultan dan Paku Alam kembali bertahta di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. SARAN

Penulis melihat bahwa penyediaan kolom khusus untuk perbendaharaan kata asing dan baru tentunya dapat menjadi jalan tengah dan solusi ideal bagi sebuah media massa untuk menjebatani berita yang secara berangkai dengan isu hangat naik ke level headline.

Saran berikutnya adalah menyangkut pendidikan politik yang selama ini menjadi beban partai politik dalam masa kampanye dan pemerintah dalam berbagai pesta demokrasi, kini juga harus menjadi bagian dari perusahaan media massa.

Penulis berharap agar para peneliti dalam berbagai tulisan ilmiah seperti skripsi yang mengulas mengenai suatu peristiwa di media tertentu juga mampu melihat alur pemberitaannya baik dari sisi subyektivitas media tersebut serta balutan yang kental dalam kepentingan ekonominya dan tidak sekedar menjabarkan ke dalam rangkaian angka-angka untuk memunculkan hasil akhir dari sebuah hipotesa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abrar, Ana Nadya. 1995. ***Penulisan Berita***. Penerbit Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.

Alex Ibnu M. 1994. ***Sosiologi Komunikasi***. UNS Press, Surakata.

Ali, Novel. 1999. ***Peradaban Komunikasi Politik, Potret Manusia Indonesia***. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Effendy, Onong U. 1986. ***Dimensi-Dimensi Komunikasi.*** PT Alumni. Bandung.

_____. 1986. ***Dinamika Komunikasi***. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

F. Rachmadi. 1990. ***Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara***. PT. Gramedia. Jakarta.

Krippendorf, Klaus. 1993. ***Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi***. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

McQuail, Denis. 1987. ***Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar***. Erlangga. Jakarta.

Murani, Asnawi dan Listiorini,Dina dan Wahyuningrun Yunita. 1998. ***Teori Komunikasi***. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.

Rahmat, Jalaludin. 1984. ***Metode Penelitian Komunikasi***. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

_____. 1985. ***Metode Penelitian Komunikasi***. PT Remaja Karya. Bandung.

_____. 1985. ***Metode Penelitian Komunikasi***, Remaja Karya, Bandung.

Singarimbun, Masri dan Soffian Effendi. 1989. ***Metode Penelitian Survai***. LP3ES. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. ***Sosiologi Suatu Pengantar***. Rajawali, Jakarta.

Suranto, Hanif dan Dick Lopulalan. 2002. ***Menjadi Wartawan Lokal, Panduan Meliput***. Lembaga Studi Pers dan Pembangunan. Jakarta.

Tamin, Indrawadi. 2003. ***Politisi & Media***. Global Masaji Grafika. Jakarta.

MAKALAH DAN ARTIKEL

Abrar, Ana Nadya. 2005. ***Penulisan Berita***. Pelatihan Jurnalistik 12-15 Desember 2005 oleh InfoJawa. Yogyakarta.

Setiawan Bambang. 2008. ***Metode Analisi Isi, Reliabilitas dan Validitas dalam Metode Penelitian Komunikasi***. (http://massofa.wordpress.com/2008/01/28/metode-analisi-isi-reliabilitas-dan-validitas-dalam-metode-penelitian-komunikasi/)

Website Resmi Presiden dan Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2008. ***Presiden Perpanjang Masa Jabatan Gubernur DIY***. Jakarta. (http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2008/10/07/3562.html)

Website Resmi Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2008. ***Sultan Terima Perpanjangan Jabatan Gubernur***. Jakarta. (http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=Berita&op=detail_berita_daerah&id=1835)

HASIL PENELITIAN/ KKL

Bharata, Bonaventura S., Ign Agus Putranto dan Ike Devi Sulistyaningtyas. 2008. ***Keistimewaan Yogyakarta dalam Pandangan Surat Kabar, Analisis Isi Keistimewaan Yogyakarta dalam Berita di SKH Kompas – Jogya, SKH Kedaulatan Rakyat, SKH Jawa Pos – Radar Yogya dan SKH Bernas Jogja.*** Yogyakarta.

Nugroho, Kristianto. 2004. ***Proses Pengumpulan, Pengolahan Hingga Publikasi Berita Dalam Portal Berita www.gudet.net Yogyakarta.***

LAMPIRAN

LEMBAR DATA

Coding Sheet :
No. :
Judul Berita :
Sub Judul Berita :
Nama Surat Kabar :
Terbit :
Halaman :

No.	Unit Analisis	Kategori
1	Kecenderungan Sikap Dukungan	a. Penetapan ☐ b. Pemilihan ☐ c. Netral ☐
2	Distribusi Halaman	a. Halaman 1 ☐ b. Halaman 2 ☐ c. Halaman 3 ☐ d. Halaman 4 ☐ e. Halaman 5 ☐ f. Halaman 6 ☐ g. Halaman 7 ☐ h. Halaman 8 ☐ i. Halaman 9 ☐ j. Halaman 10 ☐ k. Halaman 11 ☐ l. Halaman 12 ☐ m. Halaman 13 ☐ n. Halaman 14 ☐ o. Halaman 15 ☐ p. Halaman 16 ☐
3	Nilai Berita	a. Tinggi ☐ b. Sedang ☐ c. Rendah ☐
4	Panjang Berita	a. Sangat Panjang ☐ b. Panjang ☐ c. Sedang ☐ d. Pendek ☐ e. Pendek Sekali ☐
5	Narasumber Berita	a. Pejabat Negara ☐ b. Pegawai Pemerintah ☐ c. Masyarakat Awam ☐ d. Anggota Dewan ☐ e. LSM ☐ f. Fungsionaris Partai ☐ g. Akademisi ☐ h. Pengusaha ☐ i. Praktisi ☐ j. Kerabat Keraton ☐

Arsip

« Oktober 2008 »

M	S	S	R	K	J	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Kabinet Indonesia Bersatu

Link Indonesia

English Content

Perundang-undangan

Cari Data

GO

9949 info layanan SMS 9949

PO BOX 9949 jakarta 10000

KOTAK PESAN UNTUK REDAKSI

audio streaming

Video streaming

Podcast Feed

XML Sindikasi Berita

Berita Utama

Selasa, 7 Oktober 2008, 17:08:31 WIB

Presiden Perpanjang Masa Jabatan Gubernur DIY

Presiden SBY menerima Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X dan Wagub Paku Alam IX, di Kantor Presiden, Selasa (7/10) sore. (foto: abror/presidensby.info)

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (7/10) sore, menerima Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X serta Wakil Gubernur Sri Paku Alam IX. Pertemuan ini membahas berbagai hal, terutama soal perpanjangan masa jabatan Gubernur dan Wagub DIY yang akan berakhir pada 9 Oktober 2008 dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan DIY.

Menurut Mendagri Mardiyanto, perpanjangan dimaksudkan agar jangan sampai terjadi kekosongan pemerintahan di DIY. Untuk itu Presiden akan mengeluarkan suatu keputusan memperpanjang masa jabatan Gubernur dan Wagub DIY. "Setelah ditandatangani oleh Presiden, besok jam sembilan pagi saya akan menyerahkan Keputusan Presiden tentang perpanjangan tugas Sri Sultan sebagai Gubernur di Depdagri," Mardiyanto menjelaskan usai pertemuan. Masa perpanjangan jabatan ini dipergunakan untuk merumuskan RUU Keistimewaan DIY.

Mengenai RUU Keistimewaan DIY, Mardiyanto mengatakan bahwa Presiden SBY berharap dilakukan komunikasi yang intensif, dibicarakan dengan baik, dan tidak tergesa-gesa. "Kita utamakan kebaikan untuk semuanya dan kita perlu berkaca pada pengalaman-pengalaman kemarin. Jangan sampai menyusun UU dengan tergesa-gesa," ujar Mardiyanto.

Sementara itu, Sri Sultan Hemengkubuwono mengatakan, menerima keputusan Presiden memperpanjang masa jabatannya sebagai Gubernur DIY. "Bagi saya, keputusan Presiden itu saya terima, asal jangan satu periode. Itu kewajiban saya untuk melaksanakan karena saya juga punya tanggung jawab di hadapan pemerintah dan masyarakat bagaimana RUU DIY bisa diselesaikan," kata Hamengkuibuwono X.

Gubernur DIY berharap dalam pembahasan RUU Keistimewaan DIY sebaiknya mendengarkan semua pihak dan membangun komunikasi yang intens dan baik. "Bukan berarti saya menentang pemerintah pusat. Tidak ada ketentuan dan keinginan seperti itu. Yogya bagian NKRI itu sudah final. Karena ada waktu tiga tahun, kita dialogkan, kita bahas bagaimana sebaiknya RUU DIY itu dibangun dengan kebersamaan," katanya.

Ketika menerima Gubernur dan Wagub DIY, Presiden didampingi antara lain, Mensesneg Hatta Rajasa, Mendagri Mardiyanto, Seskab Sudi Silalahi, dan Jubir Presiden, Andi A.Mallarangeng. (win)

© 2006-2009 Situs Web Resmi Presiden Republik Indonesia - Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Website Resmi - Official Website
Sekretariat Negara Republik Indonesia

Rabu, 04 November 2009
Anda Pengunjung Ke : 5041835

Home Tentang Kami Profil Produk Hukum Tanda Kehormatan Istana Galeri Lelang Cari...

Home Tentang Kami Profil Produk Hukum Tanda Kehormatan Istana Galeri Lelang

Informasi Kegiatan

M. Hatta Rajasa, yang telah dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu ke-2, hadir dalam acara serah terima jabatan Menteri Sekretaris Negara di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (22/10).

Galeri Kegiatan Mensesneg

MENU UTAMA

- Home
- Tentang Kami
- Profil
- Produk Hukum
- Tanda Kehormatan
- Istana
- Galeri
- Lelang
- Home
- Tentang Kami
- Profil
- Produk Hukum
- Tanda Kehormatan
- Istana
- Galeri
- Lelang

STANDAR PELAYANAN SETNEG

PROSEDUR TETAP

Pengumuman CPNS Setneg

Pengumuman CPNS Setkab

PSA

Informasi Tanda Kehormatan

ITCP

Kerjasama Teknik LUAR NEGERI

Presiden Perpanjang Masa Jabatan Gubernur DIY

PDF PRINT

Rabu, 08 Oktober 2008

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (7/10) sore, menerima Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X serta Wakil Gubernur Sri Paku Alam IX. Pertemuan ini membahas berbagai hal, terutama soal perpanjangan masa jabatan Gubernur dan Wagub DIY yang akan berakhir pada 9 Oktober 2008 dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan DIY.

Menurut Mendagri Mardiyanto, perpanjangan dimaksudkan agar jangan sampai terjadi kekosongan pemerintahan di DIY. Untuk itu Presiden akan mengeluarkan suatu keputusan memperpanjang masa jabatan Gubernur dan Wagub DIY. "Setelah ditandatangani oleh Presiden, besok jam sembilan pagi saya akan menyerahkan Keputusan Presiden tentang perpanjangan tugas Sri Sultan sebagai Gubernur di Depdagri," Mardiyanto menjelaskan usai pertemuan. Masa perpanjangan jabatan ini dipergunakan untuk merumuskan RUU Keistimewaan DIY.

Mengenai RUU Keistimewaan DIY, Mardiyanto mengatakan bahwa Presiden SBY berharap dilakukan komunikasi yang intensif, dibicarakan dengan baik, dan tidak tergesa-gesa. "Kita utamakan kebaikan untuk semuanya dan kita perlu berkaca pada pengalaman-pengalaman kemarin. Jangan sampai menyusun UU dengan tergesa-gesa," ujar Mardiyanto.

Sementara itu, Sri Sultan Hemengkubuwono mengatakan, menerima keputusan Presiden memperpanjang masa jabatannya sebagai Gubernur DIY. "Bagi saya, keputusan Presiden itu saya terima, asal jangan satu periode. Itu kewajiban saya untuk melaksanakan karena saya juga punya tanggung jawab di hadapan pemerintah dan masyarakat bagaimana RUU DIY bisa diselesaikan," kata Hamengkuibuwono X.

Gubernur DIY berharap dalam pembahasan RUU Keistimewaan DIY sebaiknya mendengarkan semua pihak dan membangun komunikasi yang intens dan baik. "Bukan berarti saya menentang pemerintah pusat. Tidak ada ketentuan dan keinginan seperti itu. Yogya bagian NKRI itu sudah final. Karena ada waktu tiga tahun, kita dialogkan, kita bahas bagaimana sebaiknya RUU DIY itu dibangun dengan kebersamaan," katanya.

Ketika menerima Gubernur dan Wagub DIY, Presiden didampingi antara lain, Mensesneg Hatta Rajasa, Mendagri Mardiyanto, Seskab Sudi Silalahi, dan Jubir Presiden, Andi A.Mallarangeng.

Sumber:
http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2008/10/07/3562.html

< Sebelumnya Selanjutnya >

[Kembali]

Menu

Profil
Organisasi
Berita
Siaran Pers
Dari Menteri
Produk Hukum
Agenda & Kegiatan
Direktori
Profil Daerah
Data Wilayah
Link Situs
Glosari Pemerintahan
Thesaurus Kehumasan
Serba Serbi
Artikel Umum

Situs Komponen

SETJEN
Ditjen Kesbang & Politik
Ditjen PUM
Ditjen OTDA
Ditjen Bangda
Ditjen PMD
Ditjen ADMINDUK
Ditjen BAKD
ITJEN
Badan LITBANG
Badan DIKLAT

Unit Kerja Setjen

Pusat Penerangan
Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri

Sistem Informasi Depdagri

Sistem Informasi Profil Daerah
Sistem Informasi Pengawasan Daerah dan Nasional
Database Desa Pesisir

Artikel

e-Gov? Temukan Jawaban Disini!

Klik disini

Good Governance

Kumpulan artikel Good Governance
Kirim Pengaduan
Atau bisa dikirim ke:

BERITA

Sultan Terima Perpanjangan Jabatan Gubernur

Rabu, 08 Oktober 2008, 08:59 WIB

,

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini (8/10) menerbitkan Keputusan Presiden yang memuat perpanjangan masa jabatan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Keputusan tersebut mulai berlaku efektif pada Kamis (9/10), sesuai dengan selesainya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2003-2008.

"Masa perpanjangannya akan segera dipelajari dan disesuaikan aturan perundangan yang ada, namun paling lama 3 tahun," kata Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, usai mendampingi Sultan dan Paku Alam bertemu Presiden di Kantor Kepresidenan Jakarta, kemarin (7/10).

Menteri Dalam Negeri mengatakan, dalam masa perpanjangan tersebut diharapkan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta akan selesai dibahas dan siap dioperasionalkan.

"Presiden berharap, dengan perpanjangan ini, ada komunikasi yang intensif antara berbagai pihak dalam pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta untuk mencari solusi yang menguntungkan, baik bagi DIY maupun dalam rangka NKRI," ujar Mardiyanto.

Presiden berharap pembahasan tersebut dilakukan dengan pemikiran yang mendalam dan menerima masukan dari berbagai pihak. "Intinya, pembahasan dilakukan dengan tidak tergesa-gesa agar memperoleh hasil yang memuaskan semua pihak," kata Mardiyanto.

Sultan mengatakan bisa menerima dan tidak akan mempersoalkan keluarnya Keppres dan masa perpanjangan jabatan sebagai Gubernur DIY. "Saya tidak persoalkan 1, 2, atau 3 tahun, hanya jangan sampai 5 tahun, sebab itu sama dengan satu periode jabatan Gubernur, dan itu tidak logis," katanya.

Mengenai pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta, Sultan minta pemerintah pusat dan DPR mendengarkan aspirasi semua pihak dengan membangun komunikasi yang intensif. "Jangan persoalkan status keistimewaan Yogyakarta, sebab status DIY sebagai bagian dari NKRI itu sudah final."

Sultan mengatakan dirinya tidak dalam kapasitas mengkritisi RUU Keistimewaan Yogyakarta, namun secara tegas ia mengharapkan Piagam Pengukuhan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa tanggal 19 Agustus dan dimulai September 1945 dihargai semua pihak.

"Saya minta RUU Keistimewaan Yogyakarta dibahas dalam suasana kebersamaan," ucapnya.

Mengenai kabar dirinya tidak setuju perpanjangan masa jabatan karena akan mengganjal pencalonan presiden 2009, Sultan menjawab, "Sampai saat ini saya belum menjadi kandidat sehingga bukan kapasitas saya menjawab sekarang dan di tempat ini."

Tak Terkait Pemilu

Menteri Dalam Negeri menyatakan perpanjangan jabatan Sri Sultan sebagai Gubernur DIY tidak ada kaitannya dengan bursa pemilihan presiden 2009. "Saya katakan berkali-kali, saya juga katakan pada Sultan saat dialog. Ini tidak ada kaitannya RUU Keistimewaan DIY dengan 2009," kata Mardiyanto di Jakarta, Senin (6/10).

Menurut dia, sudah ada kesepahaman antara Sultan dan pemerintah bahwa Keppres perpanjangan jabatan Gubernur DIY adalah katup pengaman agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan di DIY selama pembahasan RUU DIY di DPR.

Kepada DPR juga telah diamanatkan agar pembahasan itu menjadi prioritas dengan menyerap aspirasi masyarakat DIY.

Mardiyanto menegaskan, pemerintah maupun Presiden SBY tidak pernah memikirkan pembahasan RUU Keistimewaan DIY maupun perpanjangan jabatan Sultan sebagai ganjalan maju ke Pilpres 2009.

Mengenai sidang kawula rakyat DIY yang mengangkat Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur DIY, Mendagri memandang hal tersebut sebagai cetusan aspirasi masyarakat DIY. "Kita masing-masing kan nanti akan diakomodir oleh DPR," ujarnya.

Yanuar Jatnika

[www.jurnaknasional.com]

Cetak | Kirim | Indeks

Indeks Berita

- Mendagri Akan Perkuat Kewenangan Gubernur
- Tuntaskan Evaluasi Pemerintahan Daerah
- Gamawan Terima Memori Kerja Mendagri
- Mendagri Akan Batalkan 1.999 Perda
- Perda Jinayat Diuji Publik Depdagri

Pencarian Internal

KEYWORD :

Search

INFORMASI

5 Besar Perolehan Suara Peserta Pemilu 2009
Phonebook Depdagri
Badan Pengawas Pemilu
JDIH Jatim
JDIH Surabaya

e-Announcement

Berita Lelang

Pilkada

Seputar Pilkada

Profil Daerah

Jenis Tampilan

Etnik Biru

Visit Counter

Pengunjung Online
Anda Pengunjung Ke :
4465452
Statistik

Dinilai Tidak Punya Dasar Hukum

Soal Keppres Perpanjangan Dua Tahun Jabatan Gubernur

JOGJA - Rencana pemerintah menerbitkan keputusan presiden (Keppres) tentang perpanjangan jabatan Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur DIJ selama dua tahun, secara yuridis sangat lemah. "Keppres itu tak punya dasar hukum," ujar advokat Achiel Suyanto SH MBA kemarin.

Wakil Ketua DPP Peradi ini berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengambil tindakan gegabah. Alasan penerbitan keppres untuk mengisi kekosongan hukum tidak tepat. Masa jabatan

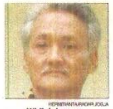

FOTO: RAHMAT/RADAR JOGJA

Widjojokusumo

dua tahun juga tidak dikenal dalam perundang-undangan.

"Janganlah dengan alasan kekosongan hukum malah melakukan tindakan yang melanggar hukum," pinta pengurus DPD SOKSI DIJ ini. Berdasarkan UUD 1945, UU No 32/2004 dan PP 6/2005 masa jabatan gubernur dan wakil gubernur adalah lima tahun. Masa jabatannya dibatasi untuk dua kali periode.

Diingatkan, bila presiden ingin memperpanjang masa jabatan gubernur entah dengan posisi pelaksana tugas (plt) atau sebutan lain, maka sebaiknya tidak perlu menyebutkan masa jabatan selama dua tahun.

Tapi, cukup menyatakan masa jabatannya berlaku sampai dilantiknya gubernur definitif.

▸ Baca Dinilai... Hal 13

HALAMAN SAMBUNGAN

Pakualaman Minta Semua Legawa

DINILAI

Sambungan dari hal 3

"Sekali lagi kalau masa jabatan dua tahun tidak punya dasar hukum," tegas kandidat doktor Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung ini.

Soal kemungkinan DIJ diterapkan peraturan pengganti undang-undang alias Perpu, Achiel juga tak sepakat. Dikatakan, terbitanya sebuah Perpu harus ada alasan-alasannya. Perpu dapat dikeluarkan dengan pertimbangan kondisi darurat dan genting. "Kondisi DIJ aman damai dan tidak darurat. Perpu tidak mungkin dikeluarkan," tandasnya.

Di sisi lain, keluarga Pura Pakualaman KPH Widjojokusumo mengaku prihatin dengan perkembangan akhir-akhir ini. Menurut dia, wacana seputar RUUK DIJ sudah didramatisasi sedemikian rupa. "Seolah-olah DIJ tanpa UUK menjadi kiamat. Padahal tidak demikian," cetus putera bungsu KGPAA Paku Alam VIII ini.

Bagi Widjojo, menyikapi suksesi kepemimpinan DIJ yang dipertukan adalah sikap legawa dari semua pihak. Pengertian legawa itu antara lain kesediaan rela berbagi. "Kalau sudah waktunya lengser, ya lengserlah. Masa jabatan gubernur dan wakil gubernur dibatasi hanya dua periode," ingatnya, serius.

Mantan kepala KPPD Kulonprogo ini berharap semua pihak bersedia kembali ke khittah UU No 22/1999 yang kemudian diubah dalam UU No 32/2004. Berdasarkan UU No 22/1999, makna keistimewaan adalah penghargaan terhadap keturunan Sultan HB IX dan Adipati PA VIII yang berhak mencalonkan sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Saat ini, Widjojo menangkap ada kesan istilah keturunan itu bakal dihapus. "Dalam hati saya kok tega betul," ucapnya.

Ia sempat mengungkapkan konvensi di keraton Jawa bila raja tidak memiliki putera laki-laki, maka calon penggantinya adalah adik laki-laki sang raja. Bila belum mampu, dibentuklah wali raja. ''Pengalaman ini pernah dialami keraton dan Pakualaman. Jadi tidak perlu kita khawatirkan," urainya.

Sosiolog UGM Arie Sujito mengkritisi keistimewaan DIJ telah dipolitisasi. Aktor politik lokal telah mempolitisasi dengan mengedepankan motif ketimbang nalar. ''Masalah yang diusung juga tak pernah bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat kecil," kritiknya. Di mata Arie, sikap keraton selama ini sebetulnya tidak pernah tunggal. "Banyak varian-varian di keraton," ungkapnya.

Dari gedung DPRD DIJ, Wakil Ketua Dewan Gandung Pardiman menginformasikan delegasi dewan akan tetap bertolak ke DPR pada 17 September. "Kemungkinan kita juga akan ke Depdagri," ujarnya kemarin.

Gandung wanti-wanti misi ke Jakarta tetap membawa sikap politik dewan. Yakni minta penetapan HB X dan PA IX sebagai gubernur dan wakil gubernur 2008-2013, dan bukan gubernur yang diperpanjang masa jabatan selama dua tahun.

Ketua DPD Partai Golkar DIJ ini juga merasa terhina dengan sikap SBY. Surat DPRD yang dikirim berulang-ulang untuk meminta audiensi tak pernah dijawab. Tapi, belakangan presiden malah mengundang khusus wartawan sebuah media lokal untuk wawancara soal keistimewaan DIJ. ''Bukankah itu menjadikan lembaga dewan seperti dilecehkan," serunya, berapi-api. **(kus)**

Hari Ini Dewan, Besok Pemprov

Delegasi Keistimewaan ke Jakarta Minus FPAN

JOGJA - Komisi II DPR RI terus mematangkan pembahasan RUUK DIJ. Untuk menyerap aspirasi, komisi tersebut akan mengundang berbagai pemangku kepentingan DIJ ke Senayan. Urutan pertama yang diundang adalah DPRD DIJ. "Kawan-kawan Dewan Provinsi akan kami mintai tanggapan dan masukannya," ungkap anggota Komisi II DPR Agus Purnomo saat dihubungi kemarin.

Setelah Dewan Provinsi, Kamis (18/9) besok gantian Pemprov DIJ yang diundang. Anggota dewan asal Dapil DIJ ini mengatakan semua elemen masyarakat dipersilakan menyampaikan aspirasi. Bahkan Komisi II tak tertutup kemungkinan akan memintai masukan dari keraton-keraton di nusantara.

Sementara itu, rombongan Delegasi Keistimewaan DPRD DIJ yang berangkat ke Jakarta berjumlah 11 orang dari 19 anggota delegasi. "Sesuai kesepakatan delegasi kami pecah menjadi dua. Satu ke DPR dan satu lagi ke Depdagri," kata Wakil Ketua DPRD DIJ Agus Sulistiyono kemarin.

▸ Baca **Hari Ini...** Hal 13

HALAMAN SAMBUNGAN

Aspirasi Tak Boleh Dlewer ke Mana-Mana

HARI INI

Sambungan dari hal 3

Rombongan ke Depdagri baru berangkat pada Jumat (19/9) lusa. Tentang nama-nama anggota delegasi yang akan berangkat, Agus mengaku tak hafal. Sebab, urusan itu diserahkan ke masing-masing fraksi. Agus hanya memastikan rombongan delegasi akan dipimpin langsung Ketua DPRD DIJ Akhmad Djuwarto dan Wakil Ketua Dewan Gandung Pardiman.

Djuwarto mengatakan meski memenuhi undangan rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi II, agenda yang diusung delegasi harus fokus. Yakni, tetap menyampaikan sikap politik DPRD DIJ untuk mendesak penetapan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX menjadi gubernur dan wakil gubernur 2008-2013.

Juga meminta payung hukum UUK sesuai amanat pasal 18 UUD 1945. "Aspirasi yang kami bawa tidak boleh ndlewer ke mana-mana," ingat Djuwarto.

Sedangkan Sekretaris FPAN Basuki Rakhmat menyatakan, keberangkatan delegasi akan minus anggota fraksinya. Sebab, FPAN memutuskan tidak akan ikut berangkat. "Keputusan fraksi selama delegasi tujuannya ke DPR, FPAN tak akan ikut. Kami sudah berkali-kali datang ke Senayan," katanya.

Masalah yang dihadapi DIJ adalah problem hukum pasca 8 Oktober 2008 saat masa jabatan HB X dan PA IX berakhir. Seharusnya, delegasi berjuang sekuat tenaga berupaya menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, presidenlah yang punya wewenang terkait status hukum DIJ. "Kalau ke presiden, kami baru gabung," ujarnya.

Anggota FPAN Nazaruddin mengingatkan bila keberangkatan delegasi menghadiri undangan Komisi II DPR RI, maka tidak bisa menggunakan anggaran delegasi. "Anggaran memenuhi undangan dengan delegasi postingnya beda," bebernya. (kus)

Dewan Harus Tanting Kesediaan HB X

Ditanya Komisi II DPR, Delegasi Tak Bisa Jawab

JAKARTA - Komisi II DPR RI tidak ada masalah dengan sikap politik yang disampaikan DPRD DIJ yang menginginkan agar Sultan Hamengku Buwono X ditetapkan kembali sebagai gubernur dan Paku Alam IX sebagai Wagub DIJ. Hanya saja untuk mengangkat kembali HB X dan PA IX itu bukan menjadi kewenangan Komisi II.

"Kami bisa memahami. Namun pengangkatan atau perpanjangan masa jabatan gubernur ada di wilayah pemerintah," ungkap anggota Komisi II DPR Agus Purnomo, usai menerima Delegasi Keistimewaan DPRD DIJ di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, kemarin. Rapat dengar pendapat itu dipandu Ketua Komisi II EE Mangindaan.

Agus mengatakan, dalam pertemuan itu Dewan Provinsi yang dipimpin langsung Ketua DPRD DIJ Akhmad Djuwarto menyampaikan aspirasi agar HB X dan Paku Alam IX ditetapkan untuk masa jabatan lima tahun, 2008-2013. Dewan Provinsi juga mendesak segera diterbitkan payung hukum menjelang suksesi gubernur 9 Oktober mendatang.

Sikap Djuwarto itu diperkuat oleh wakilnya, Gandung Pardiman. Diakui, sikap politik Dewan Provinsi itu memang agak berbeda dengan skenario yang disiapkan pemerintah.

▸ Baca Dewan... Hal 13

HALAMAN SAMBUNGAN

Agar Tahu Keinginan HB X

DEWAN

Sambungan dari hal 3

Presiden SBY tidak menginginkan pengangkatan kembali untuk masa lima tahun. Namun perpanjangan jabatan selama dua tahun yang akan diikuti dengan penyelenggaran pemilihan gubernur pada 2010.

Kader PKS itu juga menceritakan Ketua FKB Sukamto tidak setuju dengan perpanjangan maupun pengangkatan kembali. Ia justru ingin agar HB X dan PA IX ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur seumur hidup.

Mendengar desakan itu, Agus balik bertanya kepada tim delegasi. Ia mempertanyakan apakah keinginan anggota dewan telah dikonsultasikan dengan HB X. "Apakah beliau (HB X) berkenan dengan pengangkatan kembali untuk satu periode jabatan, atau perpanjangan sebagai gubernur selama dua tahun?" tanya Agus.

Ternyata pertanyaan Agus itu tak ada yang bisa menjawabnya. Semua anggota dewan termasuk Djuwarto dan Gandung mengaku tak tahu dengan sikap HB X. Satu jawaban yang diperoleh Komisi II hanyalah keterangan saat Pansus Percepatan RUUK datang ke Keraton Kilen. Saat itu, HB X menjawab dengan menyerahkan kepada rakyat dan pemerintah pusat.

Agus sendiri lantas menyarankan Dewan Provinsi perlu menanting atau bertanya kepada HB X terkait kesediaan raja Keraton Jogja itu menjabat kembali sebagai gubernur. "Itu penting agar kita tahu apa sesungguhnya keinginan beliau," lanjutnya.

Penyerahan sikap politik DPRD DIJ itu mengundang kritik anggota FPAN Sudradjat Seloruddjito. Menurut dia, bila hanya menyerahkan sikap politik itu tak perlu berbondong-bondong dengan banyak ruang. "Cukup yang menyampaikan pimpinan dewan saja minus Isti'anah karena tidak diizinkan fraksi ikut serta," ungkapnya.

Dikatakan, sebelumnya saat bertemu Komisi II Agustus lalu, delegasi pernah menyerahkan sikap politik tersebut. "Itu hanya pengulangan saja. Hanya menperboros anggaran," sesalnya. Sudradjat juga mengkritik larangan Ketua Dewan Akhmad Djuwarto yang tidak mengizinkan anggota delegasi dleweran berbicara selain soal sikap politik. "Aspirasi kok dibungkam," sentilnya. **(kus)**

KEISTIMEWAAN

Tim Pemprov Tolak RUUK

JAKARTA - Tim Penyusun RUU DIJ yang dipimpin Sekprov DIJ Tri Harjun Ismaji kemarin menyampaikan paparan di rapat dengar pendapat umum (RPDU) Komisi II DPR RI. Dalam kesempatan itu, Tri Harjun didampingi Prof Dr Sofian Effendi, Prof Dr Bakdi Sumanto, Prof Dr PJ Suwarno, RM Tirun Marwito , Achiel Suyanto SH MBA dan lain-lain.

Tri Harjun Ismaji

Di depan Komisi II, tim pemprov menolak terhadap sebagian konsep dan judul RUUK.

▸ Baca **Tim Pemprov...** Hal 13

HALAMAN SAMBUNGAN

DPRD DIJ Diminta Hati-Hati Melangkah

TIM PEMPROV

Sambungan dari hal 3

Soal judul, tim tersebut ingin diberi nama RUU Pemerintah DIJ dan bukan RUU Keistimewaan Provinsi DIJ.

Konsep Parardhya diusulkan dihapus karena tidak sesuai dengan fakta sejarah. Selanjutnya konsep pemilihan gubernur juga ditolak karena dianggap menghapus keistimewaan DIJ. Sebab, letak keistimewaan terletak pada kepala daerah yang tidak terikat masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan. Tim pemprov juga menegaskan bahwa kedudukan keraton dan Pakualaman menjadi subjek hak atas tanah dan bukan badan hukum kebudayaan.

Komisi II DPR RI yang menerima delegasi dari pemprov DIJ ini tak memberi respons terhadap yang disampaikan tim ini. "Posisi Komisi II hanya mendengarkan masukan dan DPR tidak bersikap. Ini bekal bagi fraksi-fraksi membuat daftar inventaris masalah (DIM)," terang anggota Komisi II DPR RI Agus Purnomo.

Sementara itu di Jogja, DPRD Provinsi DIJ diminta bersikap hati-hati untuk tidak mudah mengadakan sidang penetapan sebelum bertemu dengan Sultan Hamengku Buwono X. Sebelum mengambil langkah-langkah politik menjelang 9 Oktober 2008, sudah seharusnya dewan lebih dulu mendapatkan kepastian terkait sikap resmi HB X.

"Dewan harus memanggil HB X. Belum memang harus ditanya atau ditanting keseriusannya. Masih bersedikah menjabat gubernur lagi. Kalau bersedia, mau pilih seumur hidup, lima, atau dua tahun," ungkap Ketua Fraksi Persatuan Bintang Demokrat dan Peduli Bangsa (PPBD dan PB) Sunardi di Gedung DPRD DIJ kemarin.

Sunardi mengaku sulit membayangkan bila sikap politik HB X justru menolak semua tawaran opsi tersebut. Dewan bakal malu besar bila telanjur menggelar sidang penetapan.

Di mata kader PPP itu, situasi DIJ saat ini mirip dengan 1998 menjelang Soeharto lengser. Setahun sebelum penguasa Orde Baru jatuh, sempat memberikan sinyal menolak menjabat kembali sebagai presiden 1998-2003.

Soeharto minta diadakan jajak pendapat kepada rakyat apakah masih mendukungnya. Sinyal Soeharto itu ternyata direspons berbeda oleh Ketua Umum Golkar Harmoko.

Golkar justru mendorong Soeharto terus menjabat melalui penetapan di Sidang MPR. Dua bulan kemudian, Soeharto jatuh akibat didemo mahasiswa.

Secara terbuka, Sunardi tak ingin HB X dipaksa-paksa oleh kekuatan tertentu agar bersedia menerima penetapan tanpa memperhatikan aspirasi dan kehendak pribadi raja Keraton Jogja tersebut.

"Yang lebih penting jangan sampai HB X menjadi korban," ingatnya.

Sedangkan anggota FPKS DPRD DIJ Tri Harjono berpendapat, dirumut ke belakang setahun sebelum masa jabatannya berakhir pada 7 April 2007, HB X sudah menyatakan tak bersedia menjabat sebagai gubernur pasca 2008.

Namun belakangan muncul statemen mengejutkan HB X soal manuver politik di depan massa Partai Golkar pada Maret 2008. "Dari rangkaian itu, saya melihat syahwat politik HB X sendiri semakin tidak jelas," sindirnya. **(kus)**

Timbulkan Pro-Kontra

Penolakan Pemprov terhadap RUUK Perlambat Pembahasan

JOGJA - Penolakan Tim Pemprov DIJ terhadap draf RUUK DIJ menimbulkan sikap pro dan kontra. Ada yang menilai sikap tersebut bukan langkah yang tepat. Selain tidak strategis, sikap itu justru menghambat pembahasan RUUK.

"RUUK akan semakin lama disahkan," tuding Ketua Fraksi Persatuan Bintang Demokrat dan Peduli Bangsa (FPBD dan PB) DPRD DIJ Sunardi kemarin.

Sunardi merasa heran dengan sikap tim yang dipimpin Sekprov Tri Harjun Ismaji seperti terungkap saat paparan di Komisi II DPR RI. Sikap tim pemprov itu jauh di luar perkiraan Sunardi.

Kader PPP ini menangkap kesan adanya sikap apriori =

▸ Baca **Timbulkan ...** Hal 13

Lupakan Perbedaan Muluskan Payung Keistimewaan

■ TIMBULKAN

Sambungan dari hal 3

Alasannya, pagi-pagi tim pemprov sudah menyatakan menolak. Padahal draf RUUK dibuat resmi oleh pemerintah. Dari kaca mata Sunardi, draf itu sudah relatif akomodatif. "Jangan-jangan memang ada agenda tersembunyi di balik semua ini," ujarnya.

Senada, Wakil Ketua FPKS Wajdi Rahman mengatakan semakin banyak tuntutan yang diajukan pemprov akan semakin menunda pengesahan RUUK.

Buntutnya, pembahasan menjadi berlarut-larut. "Dampaknya rakyat DIJ yang paling dirugikan," ingatnya.

Kerugian terbesar, lanjut Wajdi, terjadi karena payung hukum yang bertahun-tahun diperjuangkan menjadi tidak kunjung kelar. Dikatakan, sampai saat ini beberapa pihak yang terkait masalah itu tidak memberikan sikap tegas. Hingga detik ini, rakyat juga belum mengetahui sikap resmi yang diambil keraton.

Mestinya, saat memberikan masukan itu pemprov telah menyampaikan sikap dan bukan malah mengajukan tuntutan-tuntutan baru.

"Tuntutan itu kalau dipenuhi berisiko mengubah dari awal konsep RUUK," katanya.

Ketua FPKB Sukamto mengharapkan agar semua pihak berjuang mendorong percepatan payung hukum bagi DIJ. Sebab, berakhirnya masa jabatan gubernur telah ada di depan mata. "Kita harus segera melupakan segala perbedaan demi mendapatkan payung hukum," ajaknya.

Sedangkan Ketua FPG Deddy Suwadi Siregar SH punya pendapat lain. Aspirasi yang dilontarkan tim pemprov harus dihargai. "Sebagai pendapat mesti dihormati dan jangan dicurigai," bela Deddy.

Seperti diketahui saat Tim Penyusun RUU DIJ telah bertemu Komisi II DPR RI pada Kamis (18/9) lalu. Tim itu terdiri atas Sekprov DIJ Tri Harjun Ismaji, Prof Dr Sofian Effendi, Prof Dr Bakdi Sumanto, Prof Dr PJ Suwarno, dan RM Tirun Marwito. Juga advokat Achiel Suyanto SH MBA dan Kepala Biro Tata Pemerintahan Tavip Agus Rayanto.

Di depan Komisi II, tim pemprov menolak terhadap sebagian konsep dan judul RUUK. Soal judul, tim tersebut ingin diberi nama RUU Pemerintah DIJ dan bukan RUU Keistimewaan Provinsi DIJ. Konsep *Pararadya* diusulkan dihapus karena tidak sesuai dengan fakta sejarah.

Selanjutnya konsep pemilihan gubernur juga ditolak karena dianggap menghapus keistimewaan DIJ. Sebab, keistimewaan terletak pada kepala daerah yang tidak terikat masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan. Kedudukan keraton dan Pakualaman menjadi subjek hak atas tanah dan bukan badan hukum kebudayaan. **(kus)**

Pembahasan RUU DIJ Bakal Panas

JAKARTA - Hari ini (22/09) pemerintah akan membahas RUU Keistimewaan DIJ di gedung DPR. Rencananya, Mendagri Mardiyanto bersama jajarannya hadir pukul 10.00 di komisi II (bidang pemerintahan).

Pembahasan itu dipastikan alot karena usul sementara pemerintah agar Sultan Hamengkubuwono menjadi parardhya yang mempunyai hak veto terhadap gubernur ditolak oleh keraton dan warga Jogjakarta.

''Pemerintah menilai, jabatan gubernur seumur hidup seperti yang diminta Paguyuban Lurah dan Pamong Desa Jogjakarta sulit dikabulkan. Sebab, UUD 1945 tidak mengakomodasi adanya jabatan seumur hidup.'' jelas Kepala Sub-Direktorat Pejabat Negara Depdagri Sukoco dalam diskusi kebijakan strategis Depdagri di Hotel Jayakarta kemarin (21/9).

Menurut dia, permintaan itu akan menemui kendala yuridis karena pasal 14 UUD 45 memerintahkan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis dan ada batas waktu jabatan. ''Saya sudah berusaha menemui mereka, tapi masih belum ada titik temu. Belum ada saling legawa,'' katanya.

Dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Jogjakarta, Sultan HB X ditempatkan pada posisi parardhya yang memiliki kewenangan mengatur hal-hal yang terkait dengan keistimewaan DIJ. Kewenangan tersebut, antara lain, mengatur masalah pertanahan, kebudayaan, tata ruang, dan pemerintah yang terkait dengan keistimewaan.

Jabatan Sultan akan berakhir pada 9 Oktober 2008. Bagaimana jika diperpanjang? ''Kita tunggu cantolan hukumnya,'' ujar Sukoco.

Juru Bicara Mendagri Saut Situmorang yang hadir dalam acara itu menambahkan, pemerintah masih menunggu perkembangan Senin pagi ini. ''Jadi, belum ada posisi pasti. Coba cermati saja besok.'' katanya.

Sultan sudah berbicara di depan ratusan warga Jogja, Sabtu malam, di Keraton Kilen. Dia menegaskan tidak akan menyetujui draf RUU versi pemerintah pusat. Dia juga tidak bersedia jabatannya diperpanjang hingga lima tahun lagi. **(rdl/mk)**

IBNU TAUFIK/RADAR JOGJA

TANGGAPI PUSAT: Sultan HB X saat menerima pisowanan Gerakan Kawula Mataram Manunggal (GKMM) di Kraton Kilen, Sabtu.

Dewan Diminta Cabut Sikap

Karena Tidak Sesuai Aspirasi HB X

JOGJA - Penolakan Sultan Hamengku Buwono X dengan perpanjangan masa jabatan gubernur selama satu periode atau lima tahun lantaran tak punya landasan hukum kuat, harus direspon secepatnya oleh DPRD Provinsi DIJ. Respon itu diperlukan karena dewan telah membuat keputusan politik yang tidak sesuai aspirasi HB X.

Tri Harjono

Keputusan dewan itu tertuang dalam sikap politik nomor 28/2008 tertanggal 30 Juni 2008. Isinya dewan mendesak pemerintah pusat menetapkan kembali HB X dan PA IX sebagai gubernur dan wakil gubernur 2008-2013.

"Keputusan itu harus dicabut atau paling tidak direvisi. Jangan sampai dewan terus memaksakan kehendaknya, padahal HB X sudah jelas-jelas menyatakan tidak berkenan," ucap anggota Fraksi PKS DPRD DIJ Tri Harjono kemarin.

• Baca Dewan... Hal 13

• HALAMAN SAMBUNGAN •

RUUK Pemerintah Tak Sesuai Aspirasi

■ DEWAN

Sambungan dari hal 3

Sebagai orang Jawa, Tri mengajak semua pihak tanggap ing sasmita dengan menangkap secara cermat dan seksama ucapan HB X. Apalagi sebagai raja, HB X berulang-ulang mengingatkan orasi budaya 7 April 2007 merupakan sabda pandita ratu. Sekali diucapkan pantang dianulir atau dibatalkan.

Orasi budaya itu intinya berisi sikap HB X tidak bersedia menjabat lagi sebagai gubernur pasca 2008. Sebab, HB X merasa telah dua periode menjadi gubernur dan tidak ada peluang hukum yang mengizinkan dirinya menjabat hingga lebih dari dua periode.

Tri sejak awal mengaku telah mempunyai feeling politik kalau HB X tidak akan serta merta mau mengikuti sikap politik dewan. Hanya saja, elite-elite politik termasuk di dewan tidak tanggap.

"Pemaksaan itu mungkin dalam rangka cari muka di depan Sultan demi kepentingan sesaat 2009," ujar Tri setengah curiga. Politikus asli Temon Kulonprogo ini juga berharap dalam setiap kali statemennya HB X tak banya meminta pusat mendengarkan suara rakyat. Namun pendapat yang dihasilkan wakilnya, yakni DPRD DIJ juga harus diperhatikan. Sebab,dengan melihat suara dewan akan lebih terstruktur.

Sedangkan juru bicara Koalisi Masyarakat Penegak Keistimewaan (Kompak) DIJ Unang Shio Peking menyatakan, pendapat Sultan otomatis menjadi gubernur dan wakil gubernur dijabat Paku Alam hanyalah tafsir politik semata. Ia lantas mengutip pesan mendiang HB IX seperti termuat dalam buku Tahta untuk Rakyat yang ditulis Atmakusumah.

Dalam buku tersebut, HB IX yang juga Bapak Pendiri DIJ itu sempat menyinggung soal masa depan keraton dan keistimewaan DIJ. HB IX menegaskan, Keraton Jogjakarta harus tetap ada sampai ratusan tahun ke depan seperti halnya Kasultanan Cirebon.

Sedangkan soal jabatan kepala Daerah Istimewa, HB IX tidak pernah menyebutkan sultan yang bertahta di keraton otomatis gubernur. Di buku tersebut, HB IX menyerahkan sepenuhnya masalah keistimewaan kepada pemerintah pusat dan kehendak rakyat DIJ.

"Sikap itu juga didukung PA VIII," lanjutnya. Hingga akhir hayatnya, PA VIII tak pernah meninggalkan wasiat penggantinya harus menjadi wakil gubernur.

Fakta ini didukung kenyataan setelah naik tahta pada 1989, HB X tidak langsung menjabat gubernur. HB X baru menjadi gubernur pada 1998 atau 10 tahun setelah bertahta.

Begitu pula PA IX yang jumeneng pada 1999, baru menjadi wakil gubernur pada 2001. "Itu pun bukan lewat penetapan, tapi pemilihan melawan adiknya KPH Anglingkusumo. Saat putaran pertama, PA IX sempat kalah suara," ceritanya.

Terpisah, advokat Achiel Suyanto SH MBA menilai DPRD DIJ tak pernah bulat mendukung penetapan HB X dan PA IX. Sikap politik yang dihasilkan juga tak utuh didukung semua anggota dewan.

Indikasi itu tercermin dari sikap Ketua FPBD dan PB Sunardi dan Wakil Ketua FPKS Wajdi Rahman yang mengkritisi penolakan Tim Pemprov DIJ terhadap RUUK DIJ sebagai bentuk menghambat pengesahan RUUK.

Menurut Achiel yang masuk dalam tim itu, RUUK yang dibuat pemerintah tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Keberadaan lembaga Pararadhya sebetulnya justru mendegradasi posisi sultan dan Paku Alam. "Konsep itu juga membodohi rakyat," kritiknya (kus)

Rakyat Handayani Ingin 5 Tahun

HB X-PA IX Tetap Pimpin DIJ

GUNUNGKIDUL - Masyarakat Gunungkidul menginginkan Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X dan KGPAA Paku Alam (PA) IX tetap sebagai sebagai pemimpin DIJ. Masyarakat dari kabupaten berslogan Handayani tersebut inin keduanya tetap menjadi gubernur dan wakil gubernur DIJ untuk masa lima tahun ke depan.

Masyarakat pun tidak sepakat dengan sinyalemen yang digaungkan pemerintah pusat yang hanya akan memperpanjang masa jabatan HB X dan PA IX selama dua tahun lagi setelah masa jabatan habis Oktober mendatang. Mereka menginginkan perpanjangan masa jabatan itu selama lima tahun.

"Masyarakat Gunungkidul menginginkan (HB X dan PA IX) ditetapkan lima tahun lagi, tidak dua tahun seperti kebijakan pemerintah pusat," ujar Bupati Gunungkidul Suharto di Bangsal Sewokoprojo, Sabtu (20/9) petang.

Suharto menjelaskan, aspirasi itu berasal dari banyak warga Gunungkidul yang diterimanya. Masukan itu berasal dari berbagai lapisan masyarakat, mulai pejabat hingga masyarakat biasa. "Bukan hanya lurah, tapi semua warga kami," imbuh dia.

Aspirasi tersebut disampaikan para warga saat acara sosialisasi dan penyerapan aspirasi dengan masyarakat Gunungkidul, Sabtu lalu itu.

Hadir dalam kesempatan tersebut anggota DPD RI asal DIJ GKR Hemas. Persoalan lain yang dibicarakan dalam penjaringan aspirasi itu adalah Randangan Undang Undang Keistimewaan (RUUK) DIJ dan Rancangan Undang Undang (RUU) Pornografi.

Suharto menolak konsep parardhya yang selama ini kencang disuarakan pemerintah pusat. "Kalau kami, mohon maaf (menolak, Red). Konsep seperti itu malah membuat posisi Ngarsa Dalem (HB X) menjadi tidak jelas," sambung mantan pejabat di Bawasda DIJ itu.

Suharto juga menyatakan pesimistis terhadap kejelasan status keistimewaan dalam RUUK bisa diselesaikan sebelum masa jabatan gubernur DIJ habis Oktober mendatang. "UUK sudah sulit untuk diarep-arep (diharapkan segera selesai). Tidak mungkin lagi tepat waktu," ungkap dia.

Terpisah, Ketua Paguyuban Lurah se-Gunungkidul Suparno menyatakan para lurah tetap loyal terhadap kepemimpinan HB X dan PA IX.

"Kami berharap pemegang jabatan gubernur dan wakil gubernur DIJ dipegang oleh Ngarsa Dalem (HB X) dan Paduka Paku Alam IX," ujarnya. (ew5)

Berniat Cabut Draf RUUK

SIKAP Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ dan Ing Sedya Memetri Aslining Ngayogyakarta (Ismaya) yang menolak draf RUUK yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) DIJ segera direspon. DPD DIJ memberikan sinyal akan mencabut draf RUUK yang sudah masuk ke pemerintah pusat dan DPR RI itu.

"Saya bersama tiga anggota DPD DIJ lainnya sudah sepakat untuk mencabut draf tersebut pada sidang paripurna tanggal 25 nanti," kata GKR Hemas, salah seorang anggota DPD dari DIJ, usai menghadiri sosialisasi dan penyerapan aspirasi dengan masyarakat Gunungkidul di Bangsal Sewokoprojo, Sabtu (20/9).

Hemas mengakui pencabutan draf RUUK tersebut dilatarbelakangi penolakan Pemprov DIJ dan Ismaya. "Ya, kami memilih untuk mencabut setelah adanya penolakan tersebut," ungkap ibu lima putri ini.

HENRI SAPUTRO/RADAR JOGJA

GKR Hemas

Hemas menjelaskan pencabutan ini ditempuh mengingat adanya perkembangan sikap pemerintah pusat. "Pemerintah pusat kan akan memperpanjang jabatan gubernur selama dua tahun," ungkapnya. **(cw5)**

Jawa Pos
RADAR JOGJA
SELASA | 23 September 2008
Selalu Ada yang Baru
ECERAN Rp 2.500

DPR Ingin Undang Sultan

JAKARTA – Mendagri Mardiyanto meminta agar Komisi II DPR memprioritaskan pembahasan RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta.

Menurut Mardiyanto, RUU ini sangat penting untuk memberi kepastian hukum bagi Jogjakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat istimewa.

GONJANG GANJING KEISTIMEWAAN

''Selama ini pemikiran mengenai keistimewaan Jogjakarta didominasi isu penetapan atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Padahal, keistimewaan Jogjakarta bukan semata-mata terletak kepada hal itu,'' kata Mardiyanto dalam raker dengan Komisi II di Gedung DPR, kemarin (22/9) ■

▸ Baca DPR... Hal 15

■ Baca SBY Minta DIJ Patuhi UU Halaman 2

Orasi 7 April 2007 Jadi Pertimbangan

■ DPR

Sambungan dari hal 1

Ketua Komisi II Evert Ernest Mangindaan menargetkan DIM (Daftar Inventaris Masalah) dari fraksi-fraksi sudah terkumpul seminggu setelah lebaran Idul Fitri.

''Setelah disalakan sinkronisasi, maka pembahasan bisa dimulai pertengahan Oktober.''

Menurut legislator dari Partai Demokrat itu, Komisi II juga merasa perlu untuk mengundang Sultan HB X dan Paku Alam IX. ''Kalau beliau siap (hadir, Red), kami siap. Kami juga perlu mendengar secara langsung apa-apa yang sebenarnya beliau inginkan.''

Raker yang dimulai pukul 10.30 WIB itu turut dihadiri Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Menkumham Andi Mattalatta yang juga ditunjuk presiden sebagai wakil dari pihak pemerintah ternyata berhalangan hadir.

Mardiyanto mengakui bahwa pernyataan Sultan HB X dalam orasi budaya – 7 April 2007 merupakan salah satu pertimbangan penting bagi pemerintah dalam menyusun RUU tersebut. Ketika itu, Sultan HB X menyatakan ketidaksediaannya menjadi gubernur selepas 2008.

''Karena itu, pengisian masa jabatan gubernur membutuhkan istrumen hukum baru yang jelas,'' ujar mantan gubernur Jateng itu. Perkembangan tersebut ditambah lagi dengan fakta pengisian jabatan kepala daerah di Jogjakarta pada 1998 dan 2003 yang ternyata ditentukan oleh negosiasi politik yang keras, ketimbang regulasi yang jelas.

Sejarah memang mencatat, setelah Sultan HB IX wafat pada 3 Oktober 1988, justru Paku Alam VIII yang diangkat sebagai Penjabat Gubernur oleh Presiden. Ketika Sultan HB X dinobatkan pada 7 Maret 1989, beliau tidak otomatis diangkat menjadi gubernur.

Baru sepuluh tahun kemudian, ketika Paku Alam VIII mangkat pada 11 September 1998, Sultan HB X diangkat menjadi gubernur. ''Ini menjadi gambaran betapa tidak otomatis Sultan yang bertahta sebagai gubernur dan Paku Alam yang menjadi wakil gubernur,'' ungkap Mardiyanto.

Adapun pengisian jabatan wakil gubernur ternyata diputuskan melalui mekanisme pemilihan di DPRD Jogjakarta. Calonnya memang berasal dari keturunan Paku Alam VIII yang sudah mangkat, yakni KPH (Kanjeng Pangeran Haryo) Angling Kusumo dan KPH Ambar Kusumo.

''Suara yang memilih KPH Ambar Kusumo lebih unggul, sehingga dinobatkan sebagai Sri Paku Alam IX,'' jelasnya. Selanjutnya, KPH Ambar Kusumo-*lah* yang diangkat presiden sebagai wakil gubernur.

Berdasarkan sejumlah rangkaian fakta ini, tegas Mardiyanto, tampak adanya inkonsistensi dalam mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur Jogjakarta. ''Karena itu, perlu ada UU baru yang bisa lebih menjamin adanya konsistensi kebijakan,'' tegasnya.

Menurut Mardiyanto, pemerintah meyakini nantinya keistimewaan Jogjakarta akan menjelma dalam praktik dan sistem pemerintahan yang demokratis. Kepala daerahnya dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun, tetap dikawal oleh Kasultanan dan Pakualaman melalui pengembangan budaya yang kuat.

''Prinsipnya adalah monarkhi konstitusional,'' katanya. Dalam model ini, jelas dia, institusi monarkhi (kerajaan, Red) dipisahkan dari institusi demokrasi. Meski begitu, Mardiyanto menegaskan peran sentral Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX tidak akan hilang. ''Keduanya akan bertahta dalam kedudukannya sebagai Parardhya,'' cetusnya.

Parardhya memiliki kewenangan strategis untuk memberi persetujuan terhadap setiap calon gubernur/wakil gubernur yang mendaftar ke KPU Provinsi. Bahkan, Parardhya juga berhak memveto peraturan daerah yang sudah disahkan DPRD dan gubernur Jogjakarta. Khususnya, terhadap perda mengenai kebudayaan, pertanahan, dan penataan ruang.

Mardiyanto menambahkan setelah RUU Keistimewaan DIJ disahkan, maka ada masa transisi maksimal dua tahun. Dalam periode ini, Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX selaku Parardhya juga masih menjabat sebagai gubernur/wakil gubernur Jogjakarta.

''Mereka memiliki peran strategis untuk memfasilitasi persiapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung oleh rakyat,'' tegasnya.

Mengingat masa jabatan Sultan HB X yang sudah berakhir pada 9 Oktober, imbuh Mardiyanto, presiden dapat menerbitkan produk hukum pengganti keppres pengangkatan Sultan HB X sebelumnya.

''Apakah bentuknya Keppres lagi atau Perpu belum diputuskan. Tapi, yang pasti tidak akan ada kekosongan hukum dan pemerintahan di DIJ,'' tandasnya. (pri/tom)

SBY Minta DIJ Patuhi UU

JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyindir sikap Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Hamengku Buwono X terhadap Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Jogjakarta. Menurut SBY, masyarakat di suatu daerah tidak bisa memaksakan kehendak untuk menentukan sendiri kepala daerahnya melalui cara penunjukan.

SBY menegaskan, pemilihan kepala daerah, termasuk gubernur, sudah diatur secara eksplisit dalam UUD 1945. "Pasal 18 ayat 4, Gubernur, Bupati, Wali Kota, masing-masing sebagai kepala daerah dipilih secara demokrasi," ujar SBY dalam pidato pembekalannya kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhaanas) ke-41 di Istana Negara, kemarin.

Sehingga, lanjut SBY, masyarakat atau pemimpin yang memaksakan kehendak untuk memilih kepala daerah melalui penunjukkan bertentangan dengan konstitusi. "Kalau mau, harus diubah dulu konstitusinya. Yang berhak mengubahnya bukan hanya masyarakat di provinsi tertentu itu, tetapi semuanya," tandas SBY.

SBY memang tidak menyebut kata Jogjakarta dalam sambutannya itu. Namun, Mensesneg Hatta Radjasa mengatakan pernyataan presiden itu adalah penegasan sikap pemerintah tentang RUU Keistimewaan DIJ. "Tadi kan poresiden sudah jelas, gubernur itu dipilih oleh rakyat," ujar Hatta saat ditanya tentang polemik RUU Keitimewaan DIJ.

Menurut Hatta, RUU tersebut telah mengakomidir unsur-unsur keistimewaan DIJ. Pemerintah tidak mungkin merancang undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.

Soal perpanjangan jabatan Hamengku Buwono X yang berakhir 9 Oktober nanti, menurut Hatta, belum ada keputusan. "Saya belum bisa menjawab soal itu. Seperti apa itu nantinya, karena untuk memperpanjang itu kan tunduknya pada UU yang mana," katanya. **(tom/pri)**

BAHAS KEISTIMEWAAN: Mendagri Mardiyanto (kanan) usai Raker dengan Komisi II di Gedung DPR, kemarin.

Angkat PA IX Plt Gubernur

GKR Hemas Seriusi Pencabutan RUUK DPD

JOGJA - Ketidaksediaan Sultan Hamengku Buwono X menjabat lagi sebagai gubernur selama satu periode lima tahun ke depan, tidak perlu dijadikan polemik. Rakyat DIJ harus ikhlas dan legawa memberikan kesempatan HB X maju ke pentas nasional.

''Sekarang yang harus dipikirkan siapa yang ditunjuk mengisi posisi gubernur saat HB X sudah tidak kerso (bersedia),'' ucap Penjaga Gawang Keistimewaan DIJ Heru Wahyu Kismoyo kemarin.

Menurut Heru, tidak pada tempatnya memaksa-maksa orang yang sudah tidak bersedia menjabat. Sebab, bila terus dipaksakan hasilnya malah kurang baik. Karena itu, anggota Komisi D DPRD DIJ itu justru mengusulkan agar pemerintah pusat mengangkat KGPAA Paku Alam IX yang sekarang menjabat wakil gubernur sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur, menggantikan posisi HB X bila benar-benar tidak mau menjabat gubernur lagi.

''Itu jalan tengah yang terbaik,'' ungkapnya »

► Baca Angkat... Hal 13

HALAMAN SAMBUNGAN

■ ANGKAT

Sambungan dari hal 3

Pilihan jatuh pada PA IX itu mengacu konvensi yang pernah terjadi pada masa lalu. Setelah HB IX wafat, pemerintah menunjuk ayahanda PA IX, yakni PA VIII sebagai penjabat gubernur DIJ. "Jadi pengangkatan PA IX itu hanya mengulang sejarah saja," katanya.

Dengan diangkatnya PA IX sebagai Plt gubernur itu, maka RUUK yang sudah ada di DPR RI harus ditarik lagi. Tujuh draf RUUK dari beragam versi DPD, JIP UGM, Pemprov DIJ, Kagama, Keraton dan lain-lain harus dicabut. Sebagai gantinya, pemerintah mempersilakan rakyat DIJ membuat satu UU Keistimewaan DIJ.

Draf RUUK itulah yang harus dibicarakan ulang antarsemua elemen, mulai dari pemprov, dewan dan masyarakat.

''Setelah semua beres, harus dijadikan keputusan politik DPRD sebelum diserahkan ke pusat,'' lanjutnya. Dengan mekanisme itu, Heru menyatakan sikap politik DPRD DIJ No 28/2008 tanggal 30 Juni 2008 tidak perlu dicabut.

Bila mekanisme ulang penyusunan RUUK dilakukan, otomatis sikap politik dewan itu akan gugur dan digantikan dengan keputusan DPRD yang baru. ''Ini juga sesuai dengan asa hukum, aturan baru akan menggeser aturan terdahulu.''

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI GKR Hemas mengaku sedang menyeriusi rencana pencabutan RUUK versi DPD. Usulan itu akan dituangkan dalam bentuk sikap politik empat anggota DPD asal DIJ. Alasan pencabutan RUUK DIJ itu didasari atas perkembangan dan situasi muntahir yang terjadi di DIJ.

Selain Hemas, empat anggota DPD itu adalah H Subardi, Hafidh Asrom dan Ali Warsito. "Langkah ini juga sudah kami informasikan kepada Ngarso Dalem HB X," ungkap permaisuri Sultan HB X ini, usai mendukung aksi Tolak RUU Pornografi di Gedung DPRD DIJ, kemarin.

Soal alternatif hukum yang menggantikan RUUK bila dicabut, Hemas tak bersedia menjawab. ''Itu bukan wewenang saya,'' elaknya. Usulan pencabutan RUUK DIJ itu akan disampaikan saat paripurna DPD 25 September mendatang. Untuk menyukseskan agenda itu, Hemas juga telah menggalang konsolidasi dengan anggota DPD lainnya. ''Jelas, terutama kawan-kawan di Panitia Ad Hoc (PAH) I DPD.''

Perempuan yang bernama asli Tatik Dradjat Suprihastuti itu mengatakan sejak awal tak setuju dengan draf RUUK yang dirancang DPD. Hanya saja karena itu menjadi keputusan paripurna semua anggota DPD se Indonesia, Hemas mengaku tak bisa berbuat banyak.

Wakil Ketua Komisi A Arif Rahman Hakim menilai sikap politik yang dihasilkan dewan tidak memiliki 'ikatan hukum yang kuat. Sebab, sikap politik itu hanya menjadi usulan ke pemerintah dan DPR RI sebagai bahan negoisasi RUUK. "Keputusan akhir tetap di Jakarta. Dalam konteks NKRI, tak ada keharusan Jakarta menerima sepenuhnya keputusan DPRD DIJ itu," katanya. Karena itu, dewan tidak perlu berpikir mengubah keputusan tersebut. **(kus)**

Jawa Pos
RADAR JOGJA
RABU | 24 September 2008
Selalu Ada Warna Baru!
ECERAN Rp 2.500

TELKOMSEL siaga

Diusulkan, Menggelar Referendum

JAKARTA – Setelah Lebaran, DPR dan Pemerintah akan mulai membahas RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Jogjakarta. Hampir dipastikan, nasib Sri Sultan HB X, akan menjadi perdebatan panas. Sebab, pemerintah mengusulkan agar Jogjakarta melaksanakan pilkada langsung. Dengan kata lain, hak istimewa Sultan untuk menjadi gubernur dihapuskan.

GONJANG KEISTIMEWAAN

Anggota Komisi II Agus Purnomo menyarankan agar masyarakat Jogjakarta juga diberi kesempatan untuk ikut secara langsung menentukan sikapnya melalui referendum. Apakah mereka tetap ingin mempertahankan keistimewaan "model lama" atau menerima opsi pemerintah pusat.

"Supaya objektif, referendum itu bisa difasilitasi pihak ketiga yang bebas kepentingan," katanya di Gedung DPR, Senayan, kemarin (23/9) ■

▸ Baca Diusulkan... Hal 15

HALAMAN SAMBUNGAN

Kalau Bisa Setelah Lebaran

■ **DIUSULKAN**

Sambungan dari hal 1

Agus menyampaikan bahwa hasil referendum tersebut akan menjadi masukan yang sangat penting bagi DPR dan Pemerintah.

"Kalau bisa setelah lebaran sesegera mungkin dilakukan referendum," sarannya. Dia juga menambahkan, Sri Sultan HB X sebaiknya tidak lagi mengutarakan keinginannya. Sebab, melalui Maklumat tanggal 5 September 1945, Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII telah menyerahkan nasib Jogjakarta kepada Pemerintah Pusat dan Rakyat Jogjakarta.

"Apa maunya pemerintah pusat *kan* sudah ketahuan. Sekarang tinggal apa maunya mayoritas masyarakat Jogjakarta. Sultan manut saja dengan hasil itu," cetus legislator dari FPKS itu. Dia juga berharap, selama proses pembahasan nanti, baik Pemerintah Pusat, maupun komponen masyarakat Jogjakarta bisa saling menahan diri. "Kita sama-sama turunkan tensi politik," ingatnya.

Apakah keputusan DPRD Jogjakarta No 28/K/DPRD/2008 tertanggal 30 Juni 2008 yang meminta Sri Sultan HB X dan Paku Alam IX segera diangkat dan ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jogja periode 2008-2013 belum cukup merepresentasikan keinginan masyarakat? "DPRD itu *kan* pemangku kepentingan yang sifatnya terbatas," jawabnya.

Ketua Komisi II Evert Ernest Mangindaan menargetkan DIM (Daftar Inventaris Masalah) dari fraksi-fraksi sudah terkumpul seminggu setelah lebaran Idul Fitri. "Setelah diadakan sinkronisasi, maka pembahasan bisa dimulai pertengahan Oktober," katanya.

Menurut Mangindaan, Komisi II sebaiknya juga mengundang Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX dalam rapat konsultasi. "Kalau beliau siap hadir, kami siap memfasilitasi. Kami perlu mendengar secara langsung apa yang sebenarnya beliau inginkan," tandasnya. **(pri/jpnn)**

Jabat Lagi dan Kawal RUUK

Pesan Amal untuk HB X

JOGJA - Mantan Rektor UGM Prof Dr Ichlasul Amal MA menyarankan Sultan Hamengku Buwono X mengawal persiapan proses pelaksanaan pilgub DIJ. Ia berharap HB X masih mau menjabat sebagai gubernur, minimal dalam dua tahun masa perpanjangan seiring akan disahkannya RUUK DIJ.

Hal ini disampaikan Amal saat menanggapi pernyataan HB X yang tidak ingin diperpanjang masa jabatannya hingga lima tahun. Pengamat politik ini mengatakan, upaya pemerintah menunjuk HB sebagai gubernur DIJ sangat tepat.

"Jika ada pejabat sementara di luar HB X, itu tidak wise bagi pemerintah, tentunya yang ditunjuk adalah Sultan HB X »

» Baca Jabat... Hal 13

Ichlasul Amal

GONJANG GANJING KEISTIMEWAAN

HALAMAN SAMBUNGAN

RUUK Terkesan Batasi HB X

JABAT

Sambungan dari hal 3

Sekarang kan hanya menunggu SK dari presiden atau apa pun bentuknya," kata Amal kemarin.

Disinggung soal alasan HB X menolak jabatan gubernur lima tahun ke depan, Ketua Dewan Pers ini menilai, hal itu didasari RUUK yang diajukan selama ini terkesan membatasi HB X. Terlebih keberadaan RUUK DIJ selalu dikaitkan keinginan HB X untuk menjabat gubernur seumur hidup.

"Kasihan Sultan HB X dengan polemik draf RUUK ini, sekarang orang ragu mencalonkan dirinya. Kalau seperti ini kondisinya, karier Sultan sendiri seolah dibatasi," jelasnya.

Padahal, HB X merupakan tokoh nasional yang kontribusinya diperlukan oleh nasional. Saat ini saja, lanjut Amal, HB X sudah masuk nominasi sembilan tokoh calon pemimpin dari Partai Golkar, dan masuk dalam daftar lima calon wapres dari PDIP.

"Tapi begitu HB X masuk dalam daftar nominasi nama capres dan cawapres tidak juga memberikan kepastian di level nasional, karena semua partai selalu bilang pengumuman capres dan cawapres menunggu hasil pemilu legislatif. Bahkan partai tertentu capresnya saja belum berani memperkenalkan diri, kecuali Wiranto dan Prabowo," imbuhnya.

Oleh karena itu Amal mengharapkan HB X untuk mengawal proses pelaksanan pilkada DIJ. Ia memprediksikan, meskipun nanti dalam RUUK HB X tidak menjabat sebagai gubernur, posisinya mirip dengan posisi raja Monako.

"Dari dulu saya pernah mengatakan posisi sultan idealnya seperti raja Monaco, puriya perdana menteri, dan mendapat fasilitas serta sangat prestisius," katanya. **(cw2)**

Djuwarto: Presiden Lempar Bola Panas

USULAN Penjaga Gawang Keistimewaan DIJ Heru Wahyu Kismoyo mempromosikan KGPAA Paku Alam IX menjadi pelaksana tugas (Plt) gubernur DIJ bila Sultan Hamengku Buwono X betul-betul menolak perpanjangan masa jabatan gubernur, direspon banyak pihak. Salah satu yang sudah bersuara adalah Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammdiyah (PWM) DIJ Heniy Astiyanto SH.

Heniy menilai usulan menjadikan PA IX sebagai Plt gubernur seperti yang pernah dialami ayahandanya, PA VIII, diharapkan mampu mengatasi kebekuan politik saat ini. "Itu memang cara yang bisa ditempuh," kata Heniy di kantornya, kemarin.

Hanya saja, Heniy memberi catatan posisi PA IX dengan PA VIII berbeda. Meski menjabat Plt, otoritas PA VIII sebagai pengganti HB IX yang wafat, sangat luas.

Baca Djuwarto... Hal 13

HALAMAN SAMBUNGAN

Ternalem: Mayoritas Inginkan Penetapan

DJUWARTO

Sambungan dari hal 3

Bahkan boleh dibilang kewenangan yang dimiliki setara dengan gubernur definitif. "Kalau sekarang kewenangan Plt gubernur jelas terbatas," papar Heniy.

Ketua DPRD DIJ Akhmad Djuwarto bersama Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov DIJ Tavip Agus Rayanto kemarin mendatangi Ditjen Otda Depdagri untuk membahas kebijakan pasca 9 Oktober setelah masa jabatan HB X sebagai gubernur berakhir. "Masalah payung hukum pasca 9 Oktober sedang digodok. Sedang dicari yang paling pas," ujar Djuwarto, usai pertemuan.

Meski demikian, ketua dewan mendapatkan kepastian tidak akan terjadi kekosongan hukum maupun pemerintahan DIJ. Dalam kesempatan itu, ketua DPD PDIP ini juga mengkritisi ucapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta DIJ mematuhi aturan hukum.

Kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota berdasarkan pasal 14 UUD 1945 dipilih secara demokratis. Menurut SBY, kepala daerah harus dipilih dan bukan ditunjuk oleh masyarakatnya. "Mestinya, presiden tidak perlu melempar bola panas semacam itu. RUUK sedang dibahas DPR. Proses yang sedang berjalan harus dihormati," pinta Djuwarto.

Anggota Komisi II DPR RI Agus Purnomo menginformasikan HB X dan PA IX batal diundang sebelum Lebaran. Kedua pemangku adat kebudayaan itu direncakan akan didengar keterangannya soal sikapnya terhadap RUUK DIJ setelah cuti libur Lebaran. "Mulai 27 September kita sudah libur dan baru masuk 7 Oktober," ungkap anggota Komisi II Agus Purnomo kemarin.

Awalnya Komisi II hendak mengundang HB X pada 17 September lalu. Tapi, saat itu raja Keraton Jogjakarta tersebut berhalangan, sehingga belum dapat memenuhi undangan. Agus menambahkan agenda Komisi II saat ini menyusun pendapat fraksi setelah mendengar pengantar pemerintah tentang RUUK yang disampaikan Mendagri Mardiyanto Senin (22/9) lalu.

Sedangkan HB X beberapa kali menyatakan kesiapan memenuhi undangan Komis II. Ia menolak memberikan keterangan tentang sikapnya terhadap RUUK. "Nanti saja di Komisi II saya sampaikan semuanya," elak HB X.

Dari Puro Pakualaman, KPH Tjondrokusumo mengatakan sikap Pakualaman akan mengikuti apa langkah yang diambil HB X. PA IX akan menyesuaikan semua kebijakan seperti yang dilakukan HB X. "Kita tunggu apa yang dilakukan Ngarso Dalem (HB X)," kata adik kandung PA IX ini.

Di sisi lain, anggota FPDIP DPRD DIJ Ternalem mengatakan, kebijakan pemerintah pusat menyelenggarakan pilgub akan memiliki implikasi berhadapan dengan masyarakat DIJ. Setahu Ternalem, aspirasi sebagian besar rakyat DIJ adalah ingin penetapan. "Kalau mau tetap ada pilgub, pemerintah harus siap dengan risiko politik yang harus dibayar," ingatnya, serius. **(kus)**

HB X Balik Kritik Jubir Presiden

Dianggap Tidak Tahu Sejarah DIJ

JOGJA - Gubernur DIJ Hamengku Buwono X terus bersikap kritis terhadap pemerintah pusat. Setelah membantah pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal sultan otomatis gubernur bukan ketoprak, kali ini gantian Juru Bicara Presiden Andi Malaranggeng yang kena bidik.

HB X menegaskan di DIJ tak ada sistem monarki absolut dan monarki konstitusional, sebagaimana disampaikan Andi. HB X menganggap sebagai juru bicara presiden, alumni Fisipol UGM itu dinilai tak mengerti tentang sejarah.

"Ada sudut pandang berbeda antara pemerintah pusat dengan rakyat DIJ," tegas HB X usai menerima kunjungan produser film Laskar Pelangi Mira Lesmana di Gedong Wilis, Kepatihan, Jogja, kemarin.

Perbedaan sudut pandang itu, lanjut raja Keraton Jogja ini, terkait status keistimewaan maupun soal suksesi. Dengan nada lugas, HB X kembali mengulang bahwa konsep monarki absolut dan monarki konstitusional tak pernah dikenal di DIJ.

Sebagai gubernur, ayah lima puteri ini mengatakan perjalanannya sebagai kepala daerah ditetapkan oleh rakyat dan disahkan DPRD DIJ. "Jadi ini demokrasi, bukan masalah monarki absolut atau apa," kritik HB X.

Soal perbedaan pandangan tentang keistimewaan, HB X yang pernah bergelar KGPH Mangkubumi sebelum naik tahta pada Maret 1989 silam, lebih karena pemerintah pusat terfokus pada aturan yang sekarang berlaku.

Tapi, pemerintah terkesan melupakan kesepakatan atau ijab kabul yang pernah dilakukan keraton dan Pakualaman di awal revolusi kemerdekaan 1945.

▸ Baca HB X ... Hal 13

HALAMAN SAMBUNGAN

Silakan Pemerintah Bertanya ke Rakyat DIJ

■ HB X

Sambungan dari hal 3

Tepatnya, saat Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII mengeluarkan maklumat 5 September 1945 yang mengatur bergabungnya Jogjakarta ke dalam NKRI. Kedudukan DIJ semakin dikuatkan dengan adanya piagam kedudukan 19 Agustus 1945 yang dikeluarkan Presiden Soekarno.

Di mata HB X, dengan maklumat itu menjelaskan kedudukan kepala daerah istimewa melekat pada posisi raja Keraton Jogjakarta dan wakil kepala daerah dijabat Paku Alam. Dengan pernyataan yang dikeluarkan pemerintah, kata HB X, ada kesan pemerintah tak lagi mengakui maklumat itu.

"Kalau tidak diakui apa bukan berarti telah bercerai karena pemerintah sudah tak mengakui lagi ijab kabul. Bercerai berarti pemutusan hubungan sepihak," tegasnya. Sikap itu, papar HB X, bukan berarti DIJ ingin merdeka. Sebab, bergabung dengan NKRI merupakan sesuatu yang final bagi DIJ.

"Silakan saja pemerintah bertanya kepada rakyat DIJ," ajak anggota Dewan Penasehat DPP Partai Golkar DIJ. Lebih jauh mantan ketua Kadin DIJ ini mengatakan dirinya akan menyampaikan ulang sikapnya itu saat berdialog dengan Komisi II DPR RI.

Sedangkan Wakil Ketua DPP Peradi Achiel Suyanto SH MBA mengatakan ada pemahaman sepotong-sepotong dari pemerintah terkait DIJ. Pemahaman yang tidak utuh itu terlihat dari rencana pemerintah mengadakan pemilihan gubernur dengan mendasarkan pada pasal 18 angka 4 yang menyebutkan gubernur, bupati dan wali kota dipilih secara demokratis.

"Pemerintah mungkin tak ingat bahwa DIJ hanyalah daerah setingkat provinsi yang dibentuk dengan UU No 3/1950 sehingga bukanlah daerah bernama provinsi," bela Achiel.

Menurut advokat yang juga pengurus DPD SOKSI DIJ itu pemerintah melupakan amanat pasal 18 huruf B angka 1. Dalam pasal itu diamanatkan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Dengan pemahaman itu, Achiel menegaskan aturan yang berlaku di DIJ tidak harus sama dengan daerah lain. Sebab, DIJ merupakan daerah istimewa yang keberadaannya dijamin oleh konstitusi. **(kus)**

Presiden Ingin Dengar Pendapat Sultan

DPR Dukung Pemerintah Terbitkan Perpu

JAKARTA – Rabu besok (8/10), masa jabatan Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X dan Wakil Gubernur Paku Alam IX berakhir. Namun, kelanjutan kepemimpinan HB X masih menganabang. Sebab, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keistimewaan Jogjakarta masih menjadi polemik di DPR. Di satu sisi, Jogjakarta adalah daerah istimewa. Itu, antara lain, ditandai dengan gubernur DIJ yang tidak dipilih langsung, melainkan ditetapkan dari kalangan keluarga Keraton Jogjakarta.

Tetapi, menurut UUD 45 yang diamandemen, semua gubenur/kepala daerah provinsi dipilih langsung dalam pemilihan kepala daearah (pilkada). Akibatnya, terjadi tarik-menarik terkait kelanjutan kepemimpinan Sultan sebagai gubernur DIJ.

Untuk mencari jalan keluar dari polemik tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini memanggil Sultan Hamengku Buwono X dalam kapasitas sebagai gubernur DIJ. Menurut Mensesneg Hatta Radjasa, presiden ingin mendengarkan pendapat Sultan tentang RUU Keistimewaan Jogjakarta. Sebab, selama ini yang berkembang di masyarakat seolah-olah ada persoalan antara pemerintah pusat dan Provinsi DIJ tentang RUU tersebut. ''Karena itulah, presiden memanggil Sultan ke istana,'' kata Hatta di kantornya kemarin (6/10).

SBY juga akan mengeluarkan keppres baru tentang perpanjangan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur DIJ. Sultan HB X dan Paku Alam IX diangkat berdasar Keputusan Presiden No 179/M/2003 tertanggal 8 Oktober 2003. ''Presiden merasa perlu memperpanjang masa jabatan gubernur dan wakil gubernur DIJ,'' jelas Hatta.

Hanya, Hatta belum memastikan, apakah keppres tersebut akan langsung diberikan kepada Sultan hari ini atau tidak. Yang pasti, lanjut dia, draf keppres itu sudah disiapkan dan telah berada di tangan presiden. ''Dalam draf itu, jabatan gubernur dan wakil gubernur DIJ diperpanjang tiga tahun,'' imbuhnya.

Terkait hal itu, Ketua DPR Agung Laksono mendukung langkah pemerintah yang akan menerbitkan produk hukum baru untuk memperpanjang masa jabatan Sultan dan Paku Alam. ''Jangan sampai terjadi kekosongan kepemimpinan di Jogja sampai tidak ada gubernurnya,'' kata Agung di gedung DPR kemarin.

Kali ini, sifatnya memang sebatas memperpanjang masa jabatan Sultan dan Paku Alam, bukan menetapkan kembali. Sebab, DPR dan pemerintah tengah merumuskan RUU Keistimewaan Provinsi DIJ yang baru.

Menyangkut mekanisme penentuan gubernur dan wakil gubernur Jogjakarta, pemerintah mengusulkan agar dilakukan pilkada langsung. Usul itu mencoba mendobrak sistem ''istimewa model lama'' yang berlaku selama ini. Yakni, Sultan dan Paku Alam otomatis dilantik sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur Jogja.

Produk hukum apa yang cocok untuk memperpanjang masa jabatan Sultan dan Paku Alam? Agung berpendapat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) lebih pas untuk perpanjangan jabatan tersebut. ''Saya kira, perlu segera ada perpu untuk menyikapi keadaan ini,'' jawabnya.

Setelah itu, imbuh dia, baru dipikirkan pembahasan RUU Keistimewaan Provinsi DIJ. Pada prinsipnya, Agung sepandangan dengan usul pemerintah. Menurut dia, nilai-nilai keistimewaan Jogjakarta memang harus tetap dipertahankan. Tapi, itu tidak boleh melanggar atau melabrak UUD 1945 yang mengharuskan kepala daerah dipilih melalui pilkada langsung.

''Jadi, harus dipadu antara pilkada secara demokratis dan pertimbangan dari segi historis,'' ujar wakil ketua umum Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Mendagri Mardiyanto menyampaikan bahwa pemerintah sebenarnya telah mengantisipasi berakhirnya masa jabatan Sultan dan Paku Alam pada 8 Oktober besok. Bahkan, menurut Mardiyanto, pengganti keppres memang harus sudah selesai sebelum 8 Oktober 2008.

''Pemerintah sudah mempersiapkan hal ini dengan sebaik-baiknya. Yang pasti, tidak akan ada kekosongan hukum dalam pemerintahan di DIJ,'' janji Mardiyanto dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, 22 September lalu.

Ketua Komisi II DPR Evert Ernest Mangindaan menargetkan, DIM (daftar inventaris masalah) dari fraksi-fraksi sudah terkumpul maksimal seminggu setelah Idul Fitri. ''Setelah diadakan sinkronisasi, pembahasan bisa dimulai pertengahan Oktober,'' katanya.

Menurut legislator dari Partai Demokrat itu, komisi II juga merasa perlu untuk menguadang Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX. ''Kalau beliau siap (hadir, Red), kami siap. Kami juga perlu mendengar secara langsung apa yang sebenarnya beliau inginkan,'' tegasnya. **(tom/pri/jpnn)**

Jawa Pos
RADAR JOGJA
SABTU | 27 September 2008 — Selalu Ada yang Baru — ECERAN Rp 2.500

GONJANG GANJING KEISTIMEWAAN

TEGASKAN SIKAP: Gubernur HB X menyampaikan sikap politiknya di depan 500 seniman se-DIJ di Pagelaran Keraton kemarin.

HB X Bersedia Jadi Gubernur Terus

Asalkan UUK DIJ Amanatkan Penetapan

JOGJA – Menjelang masa jabatannya berakhir, sikap politik Sultan Hamengku Buwono X semakin jelas. Gubernur DIJ yang akan lengser pada 9 Oktober itu menegaskan, sebetulnya dia tak pernah menolak menjabat sebagai gubernur terus.

"Bila aspirasi rakyat didengar dan UUK DIJ mengamatkan gubernur melalui penetapan bukan pemilihan, maka saya tetap bersedia menjabat kembali sebagai gubernur," ungkap HB X saat berdialog dengan 500 seniman se-DIJ di Bangsal Pagelaran Keraton Jogjakarta petang kemarin.

Raja Keraton Jogja itu lantas mengingatkan bunyi orasi budaya yang disampaikannya saat perayaan ulang tahun ke-61 pada 7 April 2007 yang kebetulan juga dilakukan di Pagelaran »

Baca HB X... Hal 15

Berita Terkait, Baca Hal 2

HALAMAN SAMBUNGAN

PA IX Didesak segera Mengambil Sikap

HB X

Sambungan dari hal 1

Menurut dia, ketidaksediaan menjabat lagi sebagai gubernur karena terganjal konstitusi.

UU yang selama ini ada membatasi jabatan gubernur hanya dua periode. Mekanismenya melalui cara pemilihan.

Menyadari keadaan itu, HB X lantas membuat manuver dengan menyatakan tidak lagi bersedia menjabat gubernur. Sebab, bila dia tetap menerima jabatan hingga tiga periode tidak ada aturan hukum yang mengizinkan. "Kalau saya mau menerima sampai tiga periode, nanti saya dikira tidak tahu aturan," ungkapnya memberikan alasan.

Mantan ketua DPD Golkar DIJ 1982-1998 ini kembali mengatakan, dia tidak ingin didahului oleh pusat. Adanya kendala aturan yuridis itulah yang membuatnya harus mendeklarasikan sikapnya menolak menjadi gubernur untuk masa periode ketiga.

Sikap penolakan itu juga diambilnya bila ada tawaran perpanjangan masa jabatan selama lima tahun. Perpanjangan lima tahun identik dengan satu periode masa jabatan.

Baginya perpanjangan jabatan bila perlu cukup setahun, jika RUUK ada jaminan akan diselesaikan. Sekali lagi, HB X mengatakan, bila amanat UUK nantinya mengamanatkan penetapan dan bukan pemilihan, maka dia tidak keberatan terus menjabat sebagai gubernur.

"Saya bersedia karena menjalankan amanat UUK. Kalau UU yang ada sekarang tidak pernah jelas mengatur soal DIJ," katanya didampingi Direktur LSM Satu Nama Met Kusumahadi.

Di depan seniman Jogja seperti Bondan Nusantara, Susilo Nugroho alias Den Baguse Ngarso, Yati Pesek, Hendro Pleret dan beberapa seniman lainnya, HB X mengatakan orang sebetulnya tidak perlu bertanya-tanya dengan sikapnya yang diambilnya.

Raja yang bertahta sejak 19 tahun lalu itu lantas mengutip ungkapan Jawa jalmo lipat seprapat tamat. Membaca sekilas dari ucapannya harusnya sudah paham dan tidak perlu lagi bertanya.

Dalam kesempatan itu, dia kembali mengutip amanat 5 September 1945 yang diteken HB IX dan PA VIII dan piagam kedudukan 19 Agustus 1945 yang diberikan Presiden Soekarno.

Dari kedua dokumen itu sangat jelas jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah melekat dijabat oleh Hamengku Buwono dan Paku Alam.

Meski sikap HB X semakin terang, tetap saja belum dapat diterima kerabat di lingkungan terdekatnya. Pendapat itu ditunjukan RM Acun Hadiwidjojo.

Keponakan HB IX itu menilai apa yang disampaikan HB X selama ini lebih merupakan pendapat pribadinya dan belum mewakili institusi keraton. "Sebagai kerabat kita akan meminta pertanggungjawaban HB X . Apa sebetulnya sikapnya," kata Acun.

Bersama adik HB X, GBPH Yudhaningrat, ia tengah menghimpun para kerabat keraton untuk bertemu HB X. Rencananya, pertemuan bakal dibarengkan dengan agenda pisowanan saat ngabekten pada 30 September mendatang.

Meski dianggap kerap berseberangan dan dituding oposisi, Acun mengatakan apa yang dilakukannya itu sebagai bentuk rasa cinta pada HB X dan keraton.

"Saat *ngabekten* untuk kali pertama dalam hidup, saya akan sungkem kepada HB X."

Acun berharap HB X segera mengambil sikap untuk menentukan masa depan keistimewaan DIJ. Ada dua pilihan yang diajukan Acun. Yakni, HB X menjadi *pandito* atau *satrio*. Bila pandito cukup berdiam diri di keraton dan jika satrio akan bergerak ngeluruk ke Jakarta menanyakan ketegasan pemerintah.

Putera GBPH Hadiwidjojo itu juga minta KGPAA Paku Alam IX segera mengambil sikap. Tak seharusnya PA IX hanya menebar senyum dan ela-elu dengan bersikap *nderek* Ngarso Dalem. "Harus ada sikap tegas PA IX," desaknya.

Ia juga menganggap sidang rakyat yang direncanakan Paguyuban Ismaya pada 6 Oktober mendatang tidak diperlukan. Justru yang dibutuhkan adalah gerakan bertanya kepada HB X atau rakyat *maneges* sultan. "Kita selama ini sudah dibuat bingung oleh statemen-statemen HB X," sesalnya. (kus)

JK: Gubernur DIJ Dipilih Langsung

JAKARTA - Pemerintah tidak menginginkan ada satu wilayah yang tidak menerapkan sistem demokrasi. Karena itu, pemerintah mengusulkan UU Keistimewaan Jogjakarta memuat aturan tentang pemilihan kepala daerah secara langsung. Artinya, jabatan gubernur yang saat ini secara ex-officio disandang Sultan Keraton Jogjakarta dihapuskan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, demokrasi ditandai dengan pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah secara langsung. Karena itu, dia meminta Sri Sultan Hamengkubuwono X berjiwa besar dengan menerapkan prinsip demokrasi. "Saya mendukung pernyataan Sri Sultan bahwa tidak ada monarki absolut di Jogjakarta. Karena tidak ada itu maka harus ada demokrasi, harus ada pemilihan kepala daerah secara langsung," tukasnya.

Pemerintah tetap menganggap Jogjakarta memiliki nilai istimewa dibanding daerah lain, karena nilai sejarah maupun penyerahan kedaulatan keraton Jogjakarta yang diberikan Sultan Hamengku Buwono IX pada pemerintah RI. Karena itu, sejumlah keistimewaan tetap diberikan pemerintah pada Jogja, termasuk tetap menjadi provinsi sendiri.

Namun, Kalla menegaskan keistimewaan tersebut tidak berarti mengecilkan peran daerah lain. Karena itu, tidak ada daerah yang lebih tinggi maupun lebih rendah dibanding daerah lain. "Surabaya hebat, Bandung hebat, kampung saya juga hebat. Jadi tidak boleh kita menafikkan itu. Tidak boleh menonjolkan satu sama lain. Kalau satu daerah diistimewakan, nanti daerah lain akan merasa lantas kami ini apa."

Keistimewaan Jogjakarta juga tidak berarti daerah tersebut berhak meminta referendum untuk menentukan posisinya. Bila pemerintah menyetujui referendum, daerah lain bisa menuntut perlakuan serupa. **(nge)**

Tujuh Ribu Warga Siap ke Sidang Rakyat

Bupati Suharto Tidak Punya Pesan Khusus

GUNUNGKIDUL - Ketidakjelasan posisi Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X dan KGPAA Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil Gubernur DIJ membuat sebagian warga Gunungkidul prihatin. Menginginkan HB X dan Paku Alam IX tetap menjadi pemimpin mereka, sekitar tujuh ribu warga Gunungkidul siap mengikuti sidang rakyat yang akan digelar 6 Oktober mendatang di DPRD DIJ.

"Tak kurang tujuh ribu ribu warga Gunungkidul menyatakan siap menghadiri sidang rakyat jilid dua itu," kata Ketua Paguyuban Lurah se-Gunungkidul Suparno kemarin.

Sidang rakyat jilid kedua yang digagas Paguyuban Lurah Ing Sedya Memetri Aslining Ngayogyakarta (Ismaya) itu merupakan kelanjutan sidang

Suharto

rakyat jilid pertama yang digelar 31 Maret 2008. Pada sidang rakyat jilid pertama tersebut, sekitar 1.500 warga Gunungkidul turut berpartisipasi.

Suparno mengatakan, sikap warga Gunungkidul ini merupakan aspirasi yang murni. Mereka menyampaikan suaranya dengan sukarela dan tanpa paksaan.

Biaya perjalanan menuju Jogja pun akan ditanggung secara swadaya tanpa sumbangan dari pihak mana pun. Menurut Suparno, jumlah warga yang ingin ambil bagian dalam sidang rakyat jilid dua terus bertambah.

"Semuanya swadaya. Warga yang punya mobil sediakan mobil, yang punya uang sediakan uang," sambung Suparno yang juga ketua I Ismaya itu.

Terkait sikap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari DIJ yang hendak mencabut draf RUUK, Suparno menyatakan belum bisa memastikan apakah hal tersebut akan meluluhkan hati masyarakat Gunungkidul atau tidak. Ia juga tidak berani menjamin langkah itu akan membuat warga mau memilih anggota DPD dari DIJ yang sekarang apabila maju dalam Pemilu 2009.

Sebelumnya, Ismaya menyatakan tidak akan memilih incumbent DPD DIJ yakni GKR Hemas, Hafidh Asrom, Subardi, dan Ali Warsito jika mereka kembali maju dalam pemilu mendatang. Sikap ini dipicu kekecawaan Ismaya terhadap draf RUUK usulan DPD yang dianggap tidak sesuai aspirasi masyarakat. "Kita lihat saja nanti," sambungnya.

Sebelum menghadiri sidang rakyat tersebut, lanjut Suparno, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati Gunungkidul Suharto. "Kami akan sowan terlebih dahulu kepada Pak Bupati," tegasnya.

Terpisah, Bupati Suharto mempersilakan warga Gunungkidul mengikuti sidang rakyat jilid kedua. "Silakan saja, itu kan wujud dari demokrasi," ujar mantan kepala Bawasda Provinsi DIJ itu.

Dia juga mengaku tidak memberikan pesan khusus kepada warganya yang akan berpartisipasi dalam acara itu. "Saya kira rakyat Gunungkidul sudah cukup cerdas dan pintar. Selama dalam penyampaian aspirasi nanti cara-cara yang dipakai masih dalam batas-batas koridor hukum, saya kira tidak ada masalah." (cw5)

RADAR JOGJA

16

MINGGU WAGE 28 September 2008

HB X Ingin Cooling Down

Puasa Bicara Politik

JOGJA -- Masyarakat terus berdatangan memberikan dukungan terhadap Sultan Hamengku Buwono X agar tetap menjabat sebagai gubernur DIJ. Setelah perangkat desa dan seniman, kemarin giliran para pemuka agama yang tergabung dalam Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Wilayah DIJ angkat bicara.

Sikap itu tecermin saat tak kurang dari 100 orang PGI Wilayah DIJ bertemu dengan HB X. Dipimpin ketuanya Humpre Sudarmaji Karyodimejo, selama kurang lebih dua setengah jam mereka ditemui HB X di kediamannya Keraton Kilen Komplek Keraton Jogjakarta, kemarin.

''Kami ingin agar Ngarso Dalem HB X menjabat gubernur seumur hidup. Kami mendukung adanya penetapan,'' ujar Humpre saat berdialog dengan HB X.

Di hadapan raja Keraton Jogjakarta itu, para pengurus PGI itu juga minta penjelasan sikap HB X terkait dengan keistimewaan DIJ. Makhum, masalah keistimewaan dan RUUK DIJ belakangan menjadi polemik sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat.

''Kami mohon penjelasan dari Ngarso Dalem,'' lanjut Humpre menyebut sapaan akrab HB X. Menyikapi derasnya pertanyaan masyarakat itu, HB X mengaku sebetulnya dia ingin menahan diri tidak lagi bicara politik. Selain bulan puasa, raja yang naik takhta sejak 7 Maret 1989 itu mengungkapkan saat ini sudah mendekati Lebaran. ''Saya ingin *cooling down* tidak bicara politik,'' katanya.

Sikap itu sengaja diambil dengan harapan agar tidak menimbulkan prasangka. HB X sadar, sikap dan pendapatnya selama ini soal keistimewaan telah menimbulkan prasangka. ''Jangan sampai ada prasangka-prasangka,'' uturnya.

IBNU TALFIK/RADAR JOGJA

DUKUNG: Sultan Hamengku Buwono X berbicara di depan para pemuka agama yang tergabung dalam Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Wilayah DIJ di Keraton Kilen kemarin.

Sama seperti saat menemui kelompok masyarakat yang sebelumnya datang dan bertemu dengan dirinya, HB X kembali mengulang pernyataan-pernyataan yang sebelumnya telah dia kemukakan.

Misal, terkait sikapnya tak ingin jabatannya diperpanjang sebagai gubernur selama lima tahun. Dia menganggap masa lima tahun tak ubahnya satu periode.

HB X mengatakan tak masalah dengan perpanjangan jabatan dibatasi cukup setahun atau dua tahun. Asalkan semua itu ada jaminan RUUK DIJ segera disahkan dalam masa waktu tersebut. Sebab, selama ini nasib RUUK DIJ terkatung-katung dibahas sejak era Presiden Megawati hingga Presiden SBY, namun tak kunjung ada kejelasan kapan akan dundangkan.

''Soal materi RUUK terserah DPR RI yang penting ada dialog dengan masyarakat DIJ,'' ingat raja kelahiran 2 Maret 1946 ini. Diingatkan, bagi DIJ sebetulnya jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah melekat pada diri Hamengku Buwono dan Paku Alam.

Itu mengacu piagam kedudukan yang dikeluarkan Presiden Soekarno 19 Agustus 1945 dan Amanat 5 September 1945 yang diteken mendiang HB IX dan PA VIII. ''Bagi kita bergabung dengan RI sudah final,'' tambah ayah lima puteri ini. **(kus)**

Ikuti Sabda, Rakyat Diminta Diam

Yudhaningrat: Sidang Rakyat Tambah Ruwet

JOGJA - Kerabat Keraton Jogja terus bersuara menyampaikan sikapnya terkait polemik RUUK DIJ dan suksesi gubernur 9 Oktober mendatang. Dalam situasi politik seperti saat ini, rakyat diimbau untuk mengambil sikap diam. "Tidak perlu mengambil langkah apa pun. Rakyat tenang saja. Lihat dan cermati situasi yang ada," pinta GBPH Yudhaningrat.

Adik Sultan Hamengku Buwono X itu menilai masalah yang sekarang dihadapi sudah masuk wilayah yuridis. Bukan sekadar masalah politis. Karena itu, pendekatan yuridis harus lebih dikedepankan.

Rakyat, lanjut Yudhaningrat, sudah tahu apa sebetulnya kehendak HB X. Secara jelas. HB X ingin agar ada penetapan. Yudhaningrat tak sependapat untuk mewujudkan dukungan, masyarakat harus menggelar sidang rakyat atau *pisowanan agung* atau apa pun namanya yang intinya berupa pengerahan massa.

Cara-cara semacam itu, dikhwatirkan justru akan menambah ruwet situasi. Yudhaningrat sepakat untuk meredakan situasi, tujuh draf RUUK yang saat ini ada ditarik kembali ke DIJ. Selanjutnya dibuat satu draf RUU Pemeritahanan DIJ. "Kalau keistimewaan DIJ, sudah cukup diakomodasi dalam UU No 3/1950," tutur pangeran yang semasa muda bernama BRM Sulaksmono ini.

Permintaan rakyat agar tetap tenang sebelumnya juga disampaikan kerabat keraton RM Acun Hadiwidjojo. Bahkan, Acun balik meminta ketegasan sikap HB X mewakili institusi keraton dan tidak sekadar pendapat pribadi terkait keistimewaan DIJ.

Senada, Penjaga Gawang Keistimewaan DIJ Heru Wahyu Kismoyo mengatakan, rakyat harus menaatuhi perintah atau *sabda* yang disampaikan saat memenuhi 500 seniman di Pagelaran Keraton Jogja Jumat petang lalu.

▸ *Baca Ikuti ... Hal 13*

HALAMAN SAMBUNGAN

HB X Tetap Diposisikan sebagai Raja

IKUTI

Sambungan dari hal 3

Menurut Heru, mengutip pesan HB X agar rakyat bekerja demi keluarga agar sejahtera dan tidak ribut-ribut soal RUUK. Imbauan HB X itu dipandang Heru cukup tepat. "Aspirasi rakyat sudah lebih dari cukup demi DIJ. Pengorbanan rakyat lebih dari cukup untuk HB X," kata kader Partai Demokrat ini.

Di mata anggota Komisi D DPRD DIJ ini rakyat sudah cukup lelah memperjuangkan keistimewaan DIJ, sehingga jangan lagi diadu domba antarelemen rakyat maupun dengan pemerintah pusat. Heru mengajak semua pihak menghormati proses demokrasi yang sedang berjalan di DPR.

Heru juga mencium gerakan-gerakan massa belakangan kembali menghiasai ada unsur rekayasa dengan mengulang lagu lama yang pernah terjadi pada 1998 silam.

Terpisah, Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIJ Heniy Astiyanto SH mendukung penolakan HB X menjabat gubernur untuk periode ketiga. Sebab, hal itu tak memiliki landasan hukum.

Untuk mengawal proses demokrasi itu, Heniy sepakat bukan HB X yang harus memimpin langsung. HB X akan tetap diposisikan sebagai raja yang dihormati dan didukung semua rakyat.

Seperti sudah disampaikan sebelumnya, Heniy sepakat pemerintah menunjuk KGPAA Paku Alam IX sebagai Plt gubernur. Apalagi sampai sekarang PA IX tak pernah sekali pun menolak adanya wacana dirinya dipromosikan menjadi plt gubernur. **(kus)**

RADAR JOGJA

16

SELASA LEGI 30 September 2008

Jangan Khianati Sejarah DIJ

JOGJA - Ekspresi dukungan terhadap Keistimewan DIJ diwujudkan dengan banyak cara. Memasang 33 poster mini sesuai jumlah provinsi di Indonesia dan berorasi di depan Istana Gedung Agung, menjadi pilihan belasan orang yang menamakan diri Kawulo Ngayogyakarta.

Poster itu bertuliskan *Rakyat Jogjakarta kecewa dengan pemerintah pusat. Jangan khianati sejarah keistimewaan DIJ*. Mantan aktivis 98, Kari Tri Aji, yang ikut dalam aksi itu mengungkapkan pemerintah pusat telah memberlakuan DIJ secara tidak adil. "Ini melukai perasaan rakyat DIJ," cetusnya.

Kari menganggap ada upaya sistematis pusat untuk memaksakan kehendak. Baginya, manifestasi demokrasi tidak harus diwujudkan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Ia pun menilai jabatan Sultan dan Paku Alam melekat sebagai gubernur dan wakil gubernur.

"Itu roh keistimewaan DIJ. Kalau hilang, maka lenyaplah juga keistimewaan Jogja," kata alumni Fisipol UAJY ini. Kari mengatakan aksi ini masih sekadar pemasanan. Rencananya, ke depan akan digelar aksi-aksi lain.

Selain Kari, aktivis 98 ikut bergabung antara lain Widohasto Wasono Putro, seniman ketoprak Bondan Nusantara dan beberapa aktivis lainnya. "Kami ingin pemerintah menyadari kesalahannya," imbuh Koordinator Aksi Agung Bondok Setyawan.

Sikap pemerintah seperti dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebutkan rangkap jabatan hanya ada dalam cerita ketoprak dan pernyataan Juru Bicara Presiden Andi Malarangeng Jogjakarta harus berubah dari monarki ke demokrasi, menunjukan pemerintah tak mengerti sejarah bangsanya sendiri. "Jogja itu loyalis republik," papar Agung.

Mengingkari keistimewaan DIJ berarti juga mengingkari keabsahan NKRI. Tindakan itu bentuk pengingkaran terhadap jasa pahlawan negara Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII. **(kus)**

FOTO HERMAN/ANTARA/RADAR JOGJA

BLANGKONAN: Aksi mendukung keistimewaan DIJ yang dilakukan Kawulo Ngayogyakarta di depan Gedung Agung, kemarin.

Jawa Pos
RADAR JOGJA
SABTU | 4 Oktober 2008
Selalu Ada yang Baru!
ECERAN Rp 2.500

Pemerintah Tak Akan Zalimi Jogja

Status Istimewa Justru Lebih Kuat

GONJANG GANJING KEISTIMEWAAN

JAKARTA - Polemik tentang RUU Keistimewaan Jogjakarta menjadi perhatian serius Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah menjamin tidak ada produk perundang-undangan yang akan menzalimi Jogjakarta.

RUU Keistimewaan Jogjakarta, menurut SBY, akan melahirkan kepastian bagi Jogjakarta ke depan. Dengan UU tersebut, status istimewa Jogja justru lebih kuat. ''Pemerintah tidak mungkin menzalimi Jogjakarta,'' tegasnya di Jakarta.

Dalam kesempatan itu, SBY mengimbau agar masyarakat, terutama masyarakat Jogjakarta, tidak perlu gaduh dan mendramatisasi bahkan memanipulasi isu terkait dengan pembuatan RUU Keistimewaan Jogja tersebut. ''Mari kita pikirkan secara jernih, secara tenang, dan kita susun undang-undang tentang keistimewaan DIJ,'' ungkapnya.

RUU tersebut, kata dia, bertumpu pada tiga pilar. Pilar pertama adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pilar kedua adalah demokrasi. Dan pilar ketiga baru keistimewaan Jogjakarta. Keistimewaan, jelas SBY, sangat penting untuk membedakan Jogjakarta dari provinsi lain.

Mengenai sikap Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X yang kurang sreg pada RUU tersebut, SBY menilai hanya masalah komunikasi. ''Saya percaya kepada Pak Sultan. Beliau itu tokoh reformis. Dulu awal reformasi juga turut deklarasi di Ciganjur ■

▸ Baca Pemerintah... Hal 15

HALAMAN SAMBUNGAN

Jadikan Sultan sebagai Pengayom

■ **PEMERINTAH**

Sambungan dari hal 1

Dan saya yakin beliau arif dan memiliki pandangan-pandangan yang senapas dengan arah reformasi di negeri tercinta ini.''

Karena itu, dia meminta agar Sultan dan masyarakat Jogjakarta memberikan pandangan tentang tatanan yang terbaik bagi pemerintahan Provinsi DIJ. ''Kita dengar semuanya, tidak perlu ancam-mengancam, persoalan ini bisa kita selesaikan dengan baik,'' ujarnya.

Saat menerima peserta kursus Lemhanas sepekan lalu, SBY juga menegaskan bahwa dalam amanat konstitusi, tidak boleh ada gubernur yang tidak dipilih secara demokratis. Semua kepala daerah, termasuk gubernur, harus dipilih langsung oleh rakyat. Termasuk gubernur DIJ.

RUU Keistimewaan Jogjakarta hanya menjadikan sultan Keraton Jogja sebagai paradya atau pengayom yang mempunyai hak veto terhadap gubernur. Keraton menjadi penjaga budaya Jogjakarta. Masyarakat Jogja menghendaki Sultan tetap menjadi gubernur tanpa melalui pilkada. **(tom/nw)**

Open House Bareng Pisowanan Agung

JOGJA - Seperti tahun-tahun sebelumnya, Gubernur DIJ Hamengku Buwono X kembali menggelar open house. Acara akan diadakan pada hari pertama masuk kerja selepas cuti Lebaran, Senin (6/10) mendatang.

"Begitu masuk kerja, langsung open house," kata Kabid Humas Badan Informasi Daerah (BID) Provinsi DIJ Alex Samsuri kemarin. Open house di Kepatihan, Jalan Malioboro, ini terbuka bagi masyarakat.

Semua lapisan masyarakat diberi kesempatan bersalaman langsung dengan gubernur yang akan didampingi permaisurinya, GKR Hemas. Saat menerima ucapan dari warga itu, juga bakal hadir Wagub KGPAA Paku Alam IX dan istri KBRAy Paku Alam IX, Sekprov Tri Harjun bersama istri dan beberapa pejabat pemprov lain.

Dari hitungan Alex, acara itu akan melibatkan tidak kurang 4.000 orang yang datang dari seluruh pelosok DIJ. Berbeda dengan tahun lalu, menu makanan yang disediakan tak lagi bersifat prasmanan.

Pemprov hanya menyediakan snack dan makanan dalam bentuk kardus. Langkah ini diambil karena setiap open house, catering yang ditunjuk pemprov selalu mengeluh kehilangan berbagai alat makan, mulai piring, gelas dan lain-lain.

Alex Samsuri

"Mungkin ada yang berpikir ngalap berkah setelah bertemu Ngarso Dalem," lanjutnya. Secara kebetulan penyelenggaraan open house itu ternyata berbarengan dengan agenda Sidang Rakyat untuk penetapan HB X dan PA IX sebagai gubernur dan wakil gubernur DIJ 2008-2013 ■

▸ Baca Open... Hal 13

HALAMAN SAMBUNGAN

Sidang Rakyat di Halaman DPRD DIJ

■ **OPEN**

Sambungan dari hal 3

Acara ini dilangsungkan di halaman gedung DPRD DIJ. Ketua Paguyuban Lurah Desa Ismaya Mulyadi mengatakan, pihaknya akan tetap mengadakan acara itu sesuai hasil pertemuan semua elemen Ismaya di rumahnya, Jumat (13/9) silam.

"Kami tetap akan gelar sidang rakyat, tak peduli apa pun keputusan pusat. Yang penting HB X dan PA IX tetap menjabat kepala daerah dan wakil kepala daerah," tegasnya.

Sabtu sore (27/9) persiapan sidang rakyat dilakukan di Pasar Buah Gemah Ripah, Jalan Wates, Gamping, Sleman. Berbagai elemen dari Gerakan Rakyat Jogja (GRJ) ikut dalam persiapan yang akan mengulang sidang rakyat pertama tahun 1998 silam. **(kus)**

Rakyat Jogja Lantik Sultan Gubernur

Lusa, Sidang Rakyat Bertajuk Pisowanan Agung Jilid Kedua

GUNUNGKIDUL – Rakyat Daerah Istimewa Jogjakarta nekat mengadakan sidang rakyat *pisowanan agung* kedua. Imbauan kerabat Keraton Jogja agar rakyat diam saja menyikapi polemik jabatan Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur Daerah Istimewa Jogja (DIJ) diabaikan.

Bahkan, Paguyuban Lurah dan Perangkat Desa Se-DIJ yang tergabung dalam Ing Sedya Memetri Aslining Ngayogyakarta (Ismaya/Setia Menjaga Kemurnian Jogja) telah menjadwalkan sidang rakyat kedua itu pada 6 Oktober lusa. Agendanya adalah melantik Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam IX sebagai gubernur dan Wagub DIJ, meski UUK DIJ belum ditetapkan.

Sebagaimana diberitakan, jabatan gubernur DIJ yang selama ini secara otomatis dipegang sultan Keraton Jogja menjadi polemik. Pasalnya, Sultan HB X menegaskan keengganan untuk menjabat kembali. Keengganan tersebut terkait dengan polemik RUU Khusus Jogjakarta sebagai daerah istimewa yang tidak kunjung usai.

Saat HB X mengungkapkan keengganan tersebut, rakyat yang dimotori Ismaya mengadakan *pisowanan agung*. Agendanya menanyakan sekaligus menegaskan keengganan sultan tadi.

Hasilnya, meski sudah mendapatkan penjelasan langsung dari HB X terkait hal itu, rakyat Jogja sepertinya masih belum rela. Maka, digagaslah *pisowanan agung* kedua dengan agenda melantik HB X sebagai gubernur DIJ.

Yang sudah siap-siap mengirim delegasi dalam acara tersebut adalah Gunungkidul. Diperkirakan, tidak kurang dari 144 lurah dan 7.000 warga desa siap menghadiri sidang yang akan diadakan di halaman Kantor DPRD Provinsi DIJ itu.

Imbauan Pemkab Gununkidul untuk membatalkan rencana itu diabaikan. Bahkan, mereka tetap nekat berangkat, meski pemkab tidak memberikan sumbangan.

Ketua Paguyuban Lurah se-Kabupaten Gunungkidul Suparno kepada wartawan menyatakan, belum ada inisiatif untuk meminta sumbangan dana kepada pemkab. Pihaknya juga mengakui, pada saat sidang rakyat pertama terdahulu, tidak ada *founding* yang menyokong dana secara resmi. "Semua swadaya, inisiatif warga," ujar Suparno yang menjabat sebagai ketua I Ismaya. **(cw5/jpnn/ruk)**

Sidang Rakyat Buang Energi

Kerabat Keraton Tolak Pisowanan Agung Jilid II

JOGJA—Rakyat Jogja bisa saja ngotot mengadakan sidang rakyat Pisowanan Agung Jilid II untuk melantik Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur Daerah Istimewa Jogja (DIJ). Namun, kerabat Keraton Jogja punya kewenangan untuk menolak.

Keluarga besar Keraton Jogjakarta yang selama ini menjadi salah satu elemen pendukung menyatakan tidak tertarik dengan agenda sidang rakyat yang dimotori Paguyuban Lurah Desa se-DIJ Ismaya tersebut. "Untuk apa sidang rakyat. Hanya buang-buang energi," ungkap RM Acun Hadiwidjojo kemarin.

Sebagaimana diberitakan, Ismaya yang merupakan paguyuban lurah dan perangkat desa se-DIJ menegaskan akan mengadakan *pisowanan agung* 6 Oktober besok. Agenda utamanya ialah melantik HB X sebagai gubernur DIJ.

Langkah Ismaya itu dilakukan menyusul polemik yang berkembang terkait RUU Kekhususan Jogja dan keengganan HB X memegang kembali jabatan gubernur DIJ. Sikap Ismaya tersebut menambah ruwet kontroversi RUUK Jogja.

Sejak awal, kerabat keraton minta rakyat Jogja berdiam diri menyaksikan polemik tersebut.

SOK JAWAPOS

Sultan Hamengku Buwono X

Menurut Acun, penyelenggaraan sidang rakyat tidak diperlukan lagi. "Pola mengerahkan massa itu sudah tidak zamannya dilakukan lagi. Apalagi, agenda itu hampir selalu mewarnai setiap masa jabatan gubernur akan berakhir," katanya.

Keponakan Sultan Hamengku Buwono IX itu pernah punya pengalaman ikut Sidang Rakyat Jilid I 1998. Pria yang punya gelar Bupati Riyo Purbokusumo ikut terlibat aktif mengerahkan massa.

Kala itu, kali pertama Sultan Hamengku Buwono X didaulat rakyat menjadi gubernur DIJ. Dalam kesempatan itu, Acun juga merasa tak *sreg* dengan rencana pemerintah memperpanjang masa jabatan HB X sebagai gubernur selama tiga tahun. Perpanjangan akan dikukuhkan dalam bentuk keputusan presiden.

Menurut Acun, keputusan memperpanjang jabatan gubernur sebagai bentuk penghinaan pemerintah terhadap keraton dan mendiang HB IX. "Selayaknya kita marah dengan perlakuan itu," tegasnya.

Dia berharap, HB X sebagai pewaris tahta kesultanan dan orang yang mendapatkan pesan-pesan dari HB IX tidak perlu ke Jakarta untuk mengambil keppres tersebut. "HB X tidak perlu takut tidak menjadi gubernur. *Ora dadi gubernur, ora patheken*!" tandasnya. **(kus/jpnn/ruk)**

Ismaya Ngotot

SEKRETARIS Paguyuban Ismaya Bibit Rustamto mengatakan sidang rakyat itu merupakan manifestasi kehendak rakyat. Sebagian besar rakyat DIJ menginginkan penetapan HB X sebagai gubernur dan PA IX sebagai wakil gubernur.

Untuk melaksanakan amanah itu, Ismaya bersama elemen propenetapan lainnya sepakat bulat mengadakan sidang rakyat di halaman Gedung DPRD Priovinsi DIJ Senin besok. Acara akan dimulai pukul 13.00 siang.

Dia mempersilakan masyarakat yang mendukung penetapan datang berduyun-duyun ke gedung Dewan Provinsi DIJ. "Perjuangan dan aspirasi kita adalah mewujudkan penetapan," kata Bibit yang diundang menjadi narasumber dalam talkshow di TVRI Jogja kemarin malam. **(kus/jpnn/ruk)**

Jawa Pos
RADAR JOGJA
SELASA | 7 Oktober 2008
Sebab Ada Yang Baru!

TAK BANYAK: Para peserta sidang rakyat mengusung spanduk tuntutan mereka di halaman Gedung DPRD DIJ kemarin.

Kubu Penetapan Merasa Dikhianati

Sidang Rakyat Digembosi, Tak Didukung PDIP

GONJANG GANJING KEISTIMEWAAN

JOGJA- Konsolidasi gerakan penetapan rupanya perlu dibenahi. Setelah antarperangkat desa tak kompak, suasana retaknya pendukung penetapan juga terlihat saat berlangsungnya sidang rakyat di halaman Gedung DPRD DIJ kemarin.

Sidang rakyat yang digalang Paguyuban Lurah Desa Ismaya dan Gerakan Rakyat Yogyakarta (GRY) itu semula menargetkan massa yang datang sebanyak 50 ribu. Namun dalam praktiknya, target massa itu tak dapat direalisasikan. Massa yang datang ke gedung dewan tak lebih dari dari 3.000 orang. Jumlah ini jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan sidang rakyat jilid satu yang digelar di tempat sama, Maret silam.

▸ Baca Kubu ... Hal 15

■ Baca Hal 2: Presiden Ingin Dengar Pendapat Sultan

HALAMAN SAMBUNGAN

Perhatikan Aspirasi Rakyat Jogja

■ **KUBU**

Sambungan dari hal 1

Beredar informasi, jalannya sidang rakyat yang disokong penuh DPD Partai Golkar DIJ itu tidak mendapatkan restu di lingkaran pusat kekuasaan di DIJ. Menjelang acara, juga muncul gerakan penggembosan melalui layanan pesan singkat atau SMS yang beredar di kalangan perangkat desa. Juga muncul informasi SMS itu sempat masuk ke kepala daerah se-DIJ.

Intinya, mereka diminta tidak memfasilitasi pengerahan massa untuk sidang rakyat.

Akibatnya, dalam acara itu, jumlah perangkat desa tak lagi lengkap dari seluruh DIJ. Bahkan beberapa armada yang mengangkut peserta sidang rakyat diketahui dibelokkan ke arah Kaliurang dan Borobudur.

"Ada gerakan pengkhianatan terhadap gerakan penetapan. Pengkhianat itu berarti sengkuni," ungkap Ketua DPD Partai Golkar DIJ Gandung Pardiman yang terlihat geram begitu mengetahui adanya gerakan pengkhianatan itu.

Di atas podium, Gandung secara khusus mengupas adanya SMS tersebut. Dia juga sempat menyinggung peranan kerabat keraton. Pria asli Imogiri Bantul itu wanti-wanti agar kerabat keraton paham dengan lambang-lambang yang ada di lingkungan keraton.

Menurut Gandung, rakyat tidak butuh pemimpin sontoloyo. "Kita di sini berjuang secara ikhlas dan bukan orang bayaran. Presiden SBY juga harus tahu, kita tidak pernah mendramatisasi keistimewaan," tandasnya.

Selain jumlah massa jauh di bawah target, sambutan anggota dewan terhadap acara sidang rakyat itu juga terlihat minim. Anggota dewan ikut dalam sidang itu sebagian besar berasal dari Fraksi Partai Golkar. Di luar itu ada Ketua DPW PKB DIJ Sukamto dan kerabat Puro Pakualaman BRAy Ani Widjojokusumo.

"Saya datang karena merasa bangga masyarakat masih menghargai institusi Puro Pakualaman," ungkap Ani yang duduk berdampingan dengan Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar Rani Rumintarto.

Dalam acara itu, sebetulnya Ketua Dewan Provinsi DIJ H Akhmad Djuwarto beberapa kali diundang untuk berorasi. Namun beberapa kali nama ketua DPD PDIP DIJ itu dipanggil, Djuwarto tak muncul.

Tidak hadirnya Djuwarto juga diikuti oleh kadernya. Meski ada beberapa anggota FPDIP yang ngantor di dewan, mereka enggan ikut datang ke lokasi. Lantaran Djuwarto tak hadir, acara sidang rakyat dilanjutkan dengan pembacaan sikap politik oleh Ketua Ismaya Mulyadi.

Dalam sikap politik itu, kembali terungkap desakan agar pusat menetapkan Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur DIJ. Juga mendesak pemerintah menyelesaikan RUUK DIJ dengan memperhatikan sungguh-sungguh aspirasi rakyat DIJ. (kus)

Perpanjangan Setahun Pun Cukup

JOGJA- Kendati agenda sidang rakyat berisikan dukungan terhadap penetapan Sultan Hamengku Buwono X merasa tidak tahu aspirasi yang diusung oleh Ismaya dan GRY. HB X mempersilakan sidang itu dilakukan tanpa harus ada izin dari dirinya.

Soal ketidakhadirannya ke sidang rakyat, gubernur DIJ itu merasa tidak diundang. "Nggak diundang masak saya harus ke sana," ungkap HB X di sela acara open house menerima silaturahmi warga masyarakat DIJ di Kepatihan kemarin.

Dalam kesempatan itu, HB X juga menjelaskan soal rencana pusat memperpanjang masa jabatannya selama tiga tahun.

GONJANG GANJING KERATON KEWAN

Raja Keraton Jogja itu mengatakan dirinya tidak dalam posisi bersedia atau tidak bersedia. Sebab, perpanjangan yang tertuang dalam keputusan presiden (Keppres) itu yang memutuskan adalah pemerintah.

HB X juga menginformasikan hari ini akan berangkat ke Jakarta guna menerima keppres perpanjangan masa jabatannya. "Saya akan terima keppres. Tapi, belum tahu materinya karena belum membacanya," kilahnya.

IRMU TALIB/RADAR JOGJA

BERMOHON: Seorang ibu berdoa dalam acara Sidang Rakyat di halaman DPRD DIJ kemarin.

Tentang perpanjangan tiga tahun, HB X mengatakan tidak ada masalah. "Setahun pun nggak masalah, asalkan RUUK selesai," tandasnya.

Ia menambahkan dengan masa perpanjangan tiga tahun, kemungkinan pemerintah telah memperhitungkan RUUK akan tuntas dalam kurun waktu tersebut.

Meski menerima perpanjangan, HB X menolak bila waktunya lima tahun karena sama dengan jabatan gubernur definitif.

▸ *Baca Perpanjangan... Hal 13*

HALAMAN SAMBUNGAN

Partai Demokrat DIJ Enggan Bersikap

PERPANJANGAN

Sambungan dari hal 3

Bila itu terjadi tidak sesuai dengan logika yuridis dan psikologi politis.

Dengan adanya perpanjangan itu, HB X mengatakan tidak perlu ada pelantikan. Alasannya, dirinya bukan pejabat baru.

Di tempat sama, Ketua DPD Partai Demokrat DIJ GBPH Prabukusumo bersikap hati-hati menanggapi soal RUUK dan perpanjangan masa jabatan gubernur.

"*Kulo mboten wantun* (saya tidak berani bicara)," kelit adik lain ibu dari HB X ini.

Prabukusumo menolak menanggapi kebijakan pemerintahan SBY yang juga ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang menghendaki adanya demokrasi di DIJ dengan adanya pemilihan gubernur.

SBY juga meminta agar masalah keistimewaan DIJ tidak didramatisasi dan dimanipulasi. Presiden juga tidak ingin ada rangkap jabatan publik di DIJ karena itu hanya terjadi di ketoprak.

Pemerintah menetapkan bingkai keistimewaan DIJ tetap berpijak pada tiga hal. Yakni, tegaknya NKRI, demokrasasi dan keistimewaan DIJ.

Meski pun satu partai dengan SBY, Prabukusumo mengakui apa yang akan dia sampaikan akan menimbulkan masalah.

"Apa yang saya sampaikan mesti dianggap salah," dalihnya tanpa merinci siapa pihak-pihak yang menudingnya membuat kesalahan itu. **(kus)**

RADAR JOGJA • Selasa Pon 7 Oktober 2008

Idham Menilai Tidak Tepat

Mengenai Pelaksanaan Sidang Rakyat

BANTUL- Penyelenggaraan sidang rakyat yang digelar Gerakan Rakyat Yogyakarta (GRY) kemarin dinilai tidak tepat waktu. Sebab, sampai saat ini sudah ada kepastian dari pemerintah pusat yang akan menerbitkan Keppres tentang perpanjangan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur DIJ.

"Jadi, saat ini sudah tidak perlu ada kekhawatiran lagi tentang hal itu. Dan pasti, Sultan dan Pakualam akan menjabat lagi," kata Bupati Bantul HM Idham Samawi kepada wartawan kemarin.

Disamping itu, Rancangan Undang Undang Keistimewaan (RUUK) DIJ saat ini telah masuk ke Komisi II DPR RI. Idham berpendapat, keluarnya keppres tersebut bukti adanya iktikad baik dari pemerintah pusat kepada masyarakat DIJ. Karena itu, Idham mengajak goodwill dari pemerintah pusat harus dihargai.

Idham secara pribadi menghormati pelaksanaan sidang rakyat. Namun, ia menanyakan langkah GRY melakukan sidang rakyat dan pelantikan. "Apakah itu sebagai tindakan yang pas atau tidak. Karena, dalam kenyataannya pemerintah pusat sudah memberikan kepastian tentang masa jabatan itu. Demikian juga soal RUUK yang sudah masuk ke DPR RI," bebernya.

Menurut orang nomor satu di Bantul ini, momentum yang tepat untuk menggelar kegiatan

Idham Samawi

seperti sidang rakyat bukan sekarang. Momen tepatnya ketika kehadiran Komisi II DPR RI ke Jogja.

Idham menyatakan, momentum saat ini sangat berbeda dengan tahun 1998 dan 2003. Saat itu, dia benar-benar berada di garda depan untuk memperjuangkan keistimewaan DIJ.

"Kalau saat ini saya kira momentumnya beda dan saya belum perlu ikut sidang rakyat seperti ini," katanya memberi alasan.

Idham mengungkapkan mendapat pesan dari Sultan HB X lewat handphone. Dalam SMS tersebut, Sultan memintanya mewaspadai pihak- pihak tertentu yang akan memanfaatkan kondisi saat ini. **(din)**

RADAR JOGJA • Selasa Pon 7 Oktober 2008

Apdesi dan GKMM Tolak Bergabung

SEMENTARA itu, DPD Asosiasi Pemerintah Desa DIJ (Apdesi) sengaja tidak ikut ambil bagian dalam sidang rakyat yang digelar GRY. Selain dinilai tidak cerdas, kegiatan tersebut juga tidak tepat waktu.

"Sejak awal, kami memang menolak konsep sidang rakyat ini," kata Ketua DPD Apdesi DIJ Sukro Nurharjono kemarin.

Karena itu, tidak ada perwakilan Apdesi dalam sidang rakyat. Mereka menilai penyelenggaraan sidang rakyat sebenarnya tidak perlu dilaksanakan. Apdesi beralasan, saat ini arah keistimewaan DIJ telah jelas.

Yakni akan dikeluarkannya Keppres tentang perpanjangan masa jabatan gubernur. Sukro berpendapat, dalam arah keistimewaan yang ditawarkan saat ini telah jelas. Penetapan gubernur dan wakil gubernur secara otomatis melekat pada Sultan dan Pakualam.

Disamping itu, DPR RI juga telah menyanggupi segera melakukan pembahasan RUUK. Apdesi mengimbau semua pihak untuk bersabar dan mendahulukan kepentingan umum.

"Kita tunggu kehadiran Komisi II DPR RI yang akan datang ke Jogja," pinta Lurah Selopamioro Imogiri ini.

Hanya, jika DPR RI ternyata tidak aspiratif, Apdesi baru akan menentukan sikap. Bahkan mengancam akan melakukan tekanan. Sementara itu, Gerakan Kawulo Mataram Manunggal (GKMM) Jogja juga memilih tidak mengikuti sidang rakyat.

Koordinator GKMM Jiyono mengatakan, keputusan tidak bergabung dalam sidang rakyat untuk menjaga kehormatan Sultan HB X. **(din)**

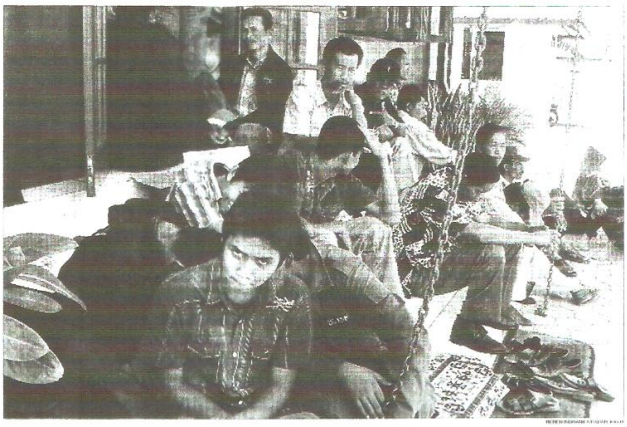

DI LUAR: Sejumlah warga mendengarkan materi pertemuan Apdesi Bodronoyo dengan Bupati Kulonprogo Toyo Santoso Dipo di Wates, kemarin

Bingung, Bodronoyo Tak Hadir

Pilih Minta Pertimbangan Bupati Toyo

KULONPROGO - Sebagian anggota Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Bodronoyo Kulonprogo memutuskan tidak mengikuti Sidang Rakyat II di Jogja, kemarin. Keputuan itu diambil setelah mereka bertemu Bupati Kulonprogo Toyo Santoso Dipo di Wates, kemarin.

Sedianya, para anggota Apdesi Bodronoyo itu hendak menghadiri Sidang Rakyat II. "Tadi (kemarin) kami memang akan berangkat ke Jogja. Namun karena ada pertimbangan lain, kami akhirnya minta saran ke Bupati dulu dan tidak jadi ikut Sidang Rakyat," ucap Sekretaris Apdesi Bodronoyo Kulonprogo Slamet Raharjo usai pertemuan.

Slamet yang juga menjabat kepala desa Tayuban, Panjatan, menemui bupati bersama enam lurah lainnya. Turut pula sekitar 50 warga.

Keputusan untuk tidak menghadiri Sidang Rakyat II ini tidak otomatis tidak ada anggota Bodronoyo yang mengikuti sidang terkait keistimewaan DIJ tersebut. Sejumlah anggota Bodronoyo tetap berangkat ke Jogja untuk bergabung dengan peserta Sidang Rakyat II lainnya.

Salmet membantah keputusan ketidakhadiran mereka ini terkait pesan melalui ponsel (*short message service*/ SMS) singkat yang diterima pengurus dan anggota Apdesi Bodronoyo beberapa hari terakhir. Pesan singkat itu berisi pemberitahuan bahwa Sidang Rakyat II batal karena Sultan HB X tidak berkenan.

"Kami tidak hadir bukan karena adanya SMS kemarin. Kami hanya merasa bingung saja sehingga minta pendapat Bupati," ungkapnya.

Ketua II Apdesi Bodronoyo Sukarman yang dikonfirmasi terpisah mengaku tetap datang ke Sidang Rakyat II. Ia datang seorang diri. "Saya sudah meluruskan isi SMS tersebut kepada anggota yang lain. Namun memang SMS tersebut membuat peserta Sidang Rakyat berkurang," jelas Sukarman.

Kepada pengurus dan warga yang menemuinya, Bupati Toyo menyatakan Sidang Rakyat II ini banyak risikonya. Apalagi, jika nantinya terjadi bentrokan dalam acara kumpul rakyat ini. Jika hal ini benar terjadi maka justru akan memberikan citra ketidakkompakan masyarakat Jogjakarta.

"Daripada mendapati berita yang simpang siur lebih baik tidak berangkat," tegas Toyo.

Toyo menambahkan hal terpenting adalah aspirasi rakyat sudah didengar pemerintah pusat. Dengan demikian, rakyat tidak perlu terburu-buru mengambil sikap terkait keistimewaan DIJ.

"Saya dan masyarakat Kulonprogo tetap mendukung adanya keistimewaan DIJ. Sebab, keistimewaan ini penting bagi DIJ sendiri dan daerah di dalamnya," ujarnya. (ew3)

Jawa Pos
RADAR JOGJA
RABU | 8 Oktober 2008 — Selalu Ada yang Baru — ECERAN Rp 2.500

BAHAS PERPANJANGAN: Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Sultan Hamengku Buwono X dan Pakualam IX (tidak terlihat) di kantor presiden, kemarin.

Sultan Minta Hargai Ijab Kabul

Hari Ini Terima Keppres Perpanjangan Jabatan

GONJANG GANJING KEISTIMEWAAN

JAKARTA – Seperti telah diperkirakan masa jabatan Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Pakualam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIY) diperpanjang tiga tahun.

Keputusan itu dituangkan dalam keputusan presiden (keppres) tentang perpanjangan [illegible] DIY yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penandatanganan keppres itu dilakukan presiden sore tadi bertempat Sultan di Kantor Presiden kemarin (7/10).

Pertemuan Sultan dengan SBY berlangsung sang lama sejak pukul 15.30. Dalam pertemuan itu hadir juga Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menseneg Hatta Radjasa, dan Seskab Sudi Silalahi. Yang jadi topik bahasan adalah masa jabatan Sultan HB X dan Pakualam yang berakhir pada 9 Oktober 2008 besok.

Setelah pertemuan tadi, proses administrasi berupa Presiden telah menandatangani keppres perpanjangan jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY. Besok pagi (hari ini, red) saya serahkan langsung kepada Sultan di Kantor Depdagri," kata Mendagri Mardiyanto di Kantor Presiden kemarin.

Masa jabatan Sultan HB X dan Pakualam IX akan diperpanjang tiga tahun. Dalam kurun waktu itu diharapkan Undang-Undang Keistimewaan Jogjakarta sudah selesai dan bisa diimplementasikan.

Saat konferensi pers, Sultan mengatakan sejak awal dirinya tidak pernah menyatakan menolak perpanjangan jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY ■

» Baca Sultan... Hal 15

Tidak Cukup Keppres, Mestinya Perpu

■ SULTAN

Sambungan dari hal 1

"Saya tidak pernah keberatan, sultan perpanjangan itu tidak lima tahun. Kalau lima tahun, [illegible] saja dengan satu periode jabatan gubernur, *kan* [illegible]," kata Sultan.

Mengenai bentuk perpanjangan itu, Sultan juga tidak mempersoalkan apakah dituangkan dalam keppres atau perpu. "Saya terima perpanjangan ini untuk kelancaran pemerintahan," ujarnya.

Perpanjangan masa jabatan gubernur cukup langka di Indonesia. Biasanya Depdagri menunjuk pelaksana tugas (plt) untuk menggantikan sementara kepala daerah yang habis masa jabatannya. Plt itu akan bertugas hingga terpilihnya pejabat secara definitif.

Mengenai RUU Keistimewaan Jogjakarta yang sedang dibahas di DPR, Sultan berpesan agar pada piagam pengukuhan Jogjakarta 19 Agustus 1945 yang dikeluarkan Presiden Soekarno. Selain itu, mengakomodasi [illegible] Sultan HB IX dan KGPAA Pakualam VIII, hanya pengakuan Jogjakarta sebagai wilayah NKRI dan mengakui Sultan dan Pakualam sebagai kepala daerah. Amanat 5 September 1945 juga tegas menyebut Sultan adalah kepala daerah.

Kedua dokumen sejarah itu merupakan penanda berdirinya Jogjakarta ke dalam NKRI. "Bagi kami Jogjakarta masuk NKRI itu final. Kami tidak pernah ingin melawan pemerintah pusat. Tapi, tolong ijab kabul dihargai atau tidak," kata Sultan.

Sultan mengaku keinginan ketiga sejumlah pihak, termasuk SBY, mengartikan ijab kabul DIY dengan demokrasi. SBY menyebut semua kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Sedah oleh dia menyindir ijab kabul DIY sebagai produk yang tidak demokratis.

"Kalau bicara ijab bukan soal demokrasi atau tidak demokratis dalam pemilihan kepala daerah. Dengan ijab kabul kepala daerah melekat pada sultan, *kan* begitu," jelas Sultan.

Menurut Sultan, demokrasi di Jogjakarta terbangun sejak lama, mendahului provinsi lain di Indonesia. "*Wong* sebelum ada provinsi lain, di Jogja sudah ada DPRD sampai ke desa *je*. Sejak dulu di Jogja kepala desa (lurah) pun dipilih. Di Jogja demokrasi tidak hanya prosedural, tapi sudah substansial," kata Sultan.

Keppres Tidak Cukup

Anggota Komisi II DPR Ferry Mursyidan Baldan menyampaikan bahwa perpanjangan masa jabatan Sultan sebagai gubernur tidak cukup dengan sekadar menerbitkan keppres. Sebab, penerbitan keppres lebih tepat diberikan kepada PNS yang ditunjuk untuk mengisi jabatan kepala daerah yang habis masa jabatannya, tapi belum ada penetapan terhadap yang baru.

"Memang begitu penuturannya di UU Pemda," kata Ferry. Sementara itu, perpanjangan masa jabatan Sri Sultan sebagai gubernur harus dilakukan melalui perpu (peraturan pengganti undang-undang). Hal itu dengan pertimbangan RUU tentang keistimewaan Jogjakarta masih dalam pembahasan di DPR.

Ferry menyebut perpu itu harus memuat substansi bahwa perpanjangan masa jabatan Sultan diberlakukan sampai adanya penetapan gubernur baru berdasarkan RUU Keistimewaan yang sedang dibahas. "Ini sekaligus lebih memberi kepastian kepada masyarakat DIY," tegasnya.

Dengan begitu, *ganjang-ganjing* politik bisa dihindarkan dalam proses pembahasan RUU Keistimewaan yang salah satu substansinya adalah pengatutan pengangkatan gubernur/kepala daerah. "Dari sisi mekanisme, perpu semacam ini pernah diterbitkan untuk memperpanjang masa jabatan KPU (Komisi Pemilihan Umum) periode lalu, sampai terbentuknya KPU berdasarkan UU yang baru," kata legislator Partai Golkar itu.

Secara terpisah, Ketua DPD Girandjar Kartasasmita mengusulkan keluarkan DPR dan pemerintah dalam mempangkan pembahasan RUU Keistimewaan Provinsi DIY. Pasalnya, ungkap dia, DPD sudah mengajukan usul inisiatif draf RUU Keistimewaan Jogjakarta sejak dua tahun lalu.

"Tapi seperti biasa, usul kami tidak diperhatikan," sesalnya.

Menurut Girandjar, DPD juga mengusulkan agar digelar pemilihan gubernur secara demokratis, tanpa mengesampingkan adanya keistimewaan di Jogjakarta. "Jadi, posisi dan peran lembaga Kasultanan dan Pakualaman tetap dihormati," cetusnya.

Karena RUU tersebut belum jadi tuntas dibahas, ada bunya muncul dilema dalam perpanjangan masa jabatan Sultan saat ini. "Langkah apa pun yang diambil pasti ada yang merasa tidak puas. Ada yang curiga seakan-akan perpanjangan ini untuk mengejal belum agar tidak menjadi capres. Tapi, kalau tidak diperpanjang, rakyat maunya Sultan yang memimpin," katanya. **(tom/pri/jpnn)**

Tolak Agendakan Pelantikan Gubernur

Belum Ada Kepastian, Dewan Ragu

JOGJA - DPRD DIJ menolak menggelar sidang paripurna istimewa pelantikan gubernur DIJ pada 9 Oktober lusa. Untuk mengadakan paripurna itu dewan masih ragu-ragu karena sekarang belum ada kepastian dari pemerintah pusat terkait perpanjangan masa jabatan gubernur.

GONJANG GANJING KEISTIMEWAAN

Keragu-raguan dewan terungkap saat rapat gabungan pimpinan (Ragabpim) Dewan Provinsi kemarin. Ragabpim itu dipimpin Wakil Ketua Dewan Agus Sulistiyono dan diikuti semua pimpinan fraksi. Rapat digelar sebagai respon atas surat yang dilayangkan gubernur DIJ No 121/4029 tanggal 27 September lalu.

Hamengku Buwono X tidak meneken sendiri surat tersebut. Dalam surat itu, tandatangannya dilakukan Sekprov DIJ Tri Harjun Ismaji atas nama gubernur.

Baca Tolak... Hal 13

HALAMAN SAMBUNGAN

Deddy: Jangan sampai Kita Dibilang Tak Siap

TOLAK

Sambungan dari hal 3

"Kami belum dapat mengagendakan pelantikan gubernur sebelum ada kepastian mengenai pengisian jabatan gubernur DIJ masa bakti 2008-2013," ungkap Agus dalam surat jawaban nomor 121/980 yang dikeluarkan usai ragabpim Selasa (7/10) kemarin.

Surat tersebut dikirimkan ke gubernur dengan tembusan Sekprov DIJ dan pimpinan fraksi-fraksi DPRD DIJ. Agus menambahkan, sampai sekarang dewan masih menunggu kepastian perpanjangan jabatan jabatan gubernur yang bakal dituangkan dalam keputusan presiden (keppres). "Sampai sekarang belum jelas konsep keppresnya," terang kader PKB ini.

Sebelumnya dalam ragabpim muncul berbagai pertanyaan dari anggota dewan. Ketua FKB Sukamto misalnya, tak ingin dewan berandai-andai. Menurut dia, langkah yang diambil dewan harus berdasarkan kepastian. Sukamto sempat menyinggung pernyataan HB X yang menyebutkan perpanjangan tidak memerlukan adanya acara pelantikan.

Di tempat sama, Wakil Ketua Fraksi PKS Wajdi Rahman mendesak pimpinan dewan secepatnya mendapatkan salinan keppres perpanjangan jabatan tersebut. Diingatkan, dewan tidak mungkin melanjutkan agenda ragabpim tanpa mengetahui materi dan bunyi keppres itu. "Setelah mengantongi keppres baru kita gelar rapat konsultasi atau klarifikasi dengan gubernur," pinta Wajdi.

Sedangkan Ketua FPG Deddy Suwadi Siregar menganggap dewan tetap perlu mengagendakan acara pelantikan. Dalihnya, langkah itu sebagai upaya antisipasi. "Jangan sampai kita dibilang tidak siap," kelitnya.

Suara berbeda disampaikan Ketua FPDIP Mualiban. Meski akan terbit keppres perpanjangan masa jabatan gubernur, dewan diminta tidak lalai dengan perjuangan penetapan. Sebab, sesuai dengan sikap politik DPRD DIJ No 28/2008 tanggal 30 Juni lalu diamanatkan dewan memutuskan adanya penetapan HB X dan PA IX sebagai gubernur dan wakil gubernur periode 2008-2013.

"Perjuangan penetapan itu harus selalu diingat. Masyarakat mencatat apa yang menjadi sikap politik dewan," tegasnya. Mualiban wanti-wanti agar Dewam Provinsi punya ketegasan sikap dan menurut begitu saja dengan skenario Jakarta. Menurutnya, sikap politik dewan itu taruhannya adalah harga diri kelembagaan. **(kus)**

AKSI BUDAYA: Pengibaran panji-panji Paguyuban Abdi Dalem oleh Kawulo Ngayogyokarta di kawasan Tugu Jogja kemarin.

Kibarkan Panji-Panji Paguyuban Abdi Dalem

AKSI budaya pengibaran panji-panji Paguyuban Abdi Dalem oleh Kawulo Ngayogyakarta kemarin siang dilakukan di kawasan Tugu Jogja. Dengan mengusung tema Prasetya Manunggaling Kawulo lan Gusti, aksi ini sebagai bentuk sikap rakyat Jogja mendukung Sultan HB X untuk menegaskan kembali keistimewaan Jogja.

Dengan dikibarkan delapan klebet (bendera) abdi dalem dari seluruh kadipaten Ngayogyakarta, Kawulo Ngayogyakarta berpendapat simbol-simbol budaya itu penting untuk direvitalisasi kembali di tengah gonjang-ganjing keistimewaan Jogja.

» Baca Kibarkan... Hal 13

HALAMAN SAMBUNGAN

Hari Ini Laku Bisu Mubeng Beteng

KIBARKAN

Sambungan dari hal 3

Bendera-bendera baru sekarang dikibarkan kembali sejak disimpan saat dikeluarkannya Maklumat 5 September 1945.

''Bendera merupakan salah satu warisan budaya keraton yang memiliki nilai kesejarahan tinggi," tutur Suwalji, salah seorang sesepuh Kawulo Ngayogyakarta kepada wartawan. Menurut sejarah, selembar kain yang dahulu disebut klebet itu dipakai sebagai penanda keberadaan rombongan kesatuan pasukan abdi dalem keraton yang wilayah operasionalnya di luar benteng keraton.

Dikisahkan, saat memimpin perang Jawa, untuk mempermudah identifikasi pasukan Pangeran Diponegoro memerintahkan masing-masing kesatuan pasukan abdi dalem keraton yang berada di wilayah timur (Gunungkidul), selatan (Bantul), barat (Kulonprogo) serta wilayah utara benteng Kraton untuk mengibarkan klebet. Delapan bendera itu dikibarkan di empat titik penjuru Tugu Jogja.

Bendera itu antara lain dwi warna merah putih sebagai lambang kesatuan NKRI, bendera Podang Ngisep Sari sebagai bendera Gunungkidul, Pandan Binethot untuk Bantul, Pareanom untuk Kulonprogo, Mega Ngampak untuk Sleman, Bangun Tolak bendera Kota Jogja, serta Panji Gula Klapa sebagai bendera Keraton Jogja.

Masing-masing titik di empat penjuru Tugu ini dipasang delapan bendera hingga Sabtu mendatang. ''Besok malam (hari ini, Red) 700 bendera dari seluruh paguyuban abdi dalem akan ikut dikirabkan dalam laku budaya topo bisu mubeng beteng," imbuh Suwalji.

Masing-masing bendera yang mewakili wilayah diperbanyak 100 buah. Kemudian bendera-bendera tersebut akan dibagikan kepada masyarakat untuk dikibarkan di halaman rumah masing-masing.

''Aksi budaya pengibaran kembali panji-panji ini semata-mata dilakukan sebagai bentuk sikap Kawulo Ngayogyakarta untuk mendukung apa pun keputusan raja menyangkut keistimewaan Jogja," ungkap Suwalji.

Ditambahkan, aksi ini dapat dimaknai sebagai penghargaan, kecintaan dan kebanggaan terhadap budaya yang dimiliki Jogja. Untuk itu, apabila di kemudian hari regulasi nasional (Undang-Undang Keistimewaan) tidak memperhatikan hal ini, maka bisa dianggap sebagai pengingkaran terhadap sejarah Ngayogyakarta.

''Kawulo Ngayogyakarta menyatakan diri menolak sekaligus tidak rela apabila Jogjakarta menjadi objek eksploitasi elite politik maupun kepentingan lain yang tidak memiliki pemahaman sejarah atas budaya DIJ," tandas Suwalji. **(cw7)**

UKM

Perajin Bantul Dikirim ke TMII

BANTUL- Sejumlah perajin asal Kabupaten Bantul mendapat kesempatan mengikuti Gelar Seni Budaya di TMII Jakarta yang berlangsung 23-26 Oktober mendatang. Kesempatan ini merupakan upaya memberi motivasi usaha kecil dan menengah (UKM).

"Khususnya perajin yang memang pantas bersaing secara kompetitif di era globalisasi. Kesempatan ini harus dimanfaatkan untuk bisa meraih pasar yang lebih luas," terang Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Bantul Drs H Yahya.

Kata Yahya, sejumlah perajin telah didaftarkan menjadi peserta kegiatan berskala nasional itu. Mereka antara lain, Djiwo Diharjo (perajin tosan aji, keris gaya Mataraman, gaya Solo dan Makuto). Lalu, Sakti Nugroho (perajin kayu batik dan batik cat). Tyas Puji Lestari (perajin batik tulis, batik cetak, taplak meja, hem batik), Bambang Triatmoko (perajin kebaya blaco bordir, blaco krawang dan rok batik) dan Asdinar Hadi P (perajin hiasan dinding).

Di bagian lain, para perajin olahan kayu di Bantul belum lama ini mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan daya saing produksinya. Ini dilakukan agar menghasilkan kualitas yang baik dan menpunyai daya saing.

Dinas Perindagkop berharap para perajin ke depan harus mampu mengikuti perkembangan permebelan di tingkat nasional maupun global.

Terpisah, Ketua Kelompok Simpan Pinjam Margo Rukun Jadogan Tohari melaporkan, sebanyak 75 persen dari total anggota sebanyak 486 orang, terdiri perajin kayu yang sebagian besar bekerja secara individual.

"Ini berdampak pada persaingan yang negatif dan cenderung merugikan perajin sendiri," terangnya. **(din)**

Masyarakat Ramai-Ramai Lakukan Mubeng Beteng

Doakan Sultan dan Paku Alam Tetap Pimpin DIJ

Kegiatan bertajuk Panyuwunan Agung akan digelar malam ini di Kompleks Makam Raja-Raja Mataram Pajimatan Imogiri. Tujuan kegiatan ini untuk *maneges* kepada Tuhan Yang Maha Esa atas sejumlah persoalan yang terjadi di masyarakat Jogja akhir-akhir ini.

MIFTAHUDIN, Bantul

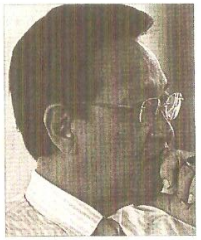

Sultan HB X

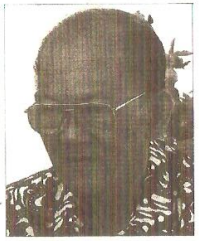

Paku Alam IX

SECARA khusus, kegiatan ini sebagai respon atas berlarut-larutnya Keistimewaan DIJ yang tak kunjung selesai. Dalam kesempatan ini, sejumlah elemen masyarakat di Bantul akan berdoa bagi kedamaian di Jogja.

Elemen yang akan bergabung dalam kegiatan spiritual ini seperti Forum Cinta Budaya Bantul, Gerakan Kawula Mataram, Paguyuban 21, PGRI, para ulama dan elemen masyarakat.

"Kami juga akan mendoakan secara khusus bagi Ngarsa Dalem Sultan HB X dan Pakualam IX untuk tetap bisa memimpin Jogja. Serta, agar UU Keistimewaan DIJ segera berhasil sesuai keinginan dan kehendak seluruh masyarakat Jogja," terang Ketua Panitia Totok Suryo Gupito di Imogiri kemarin.

Totok menyatakan, kegiatan ini sebagai komitmen melestarikan keistimewaan DIJ. Melalui kegiatan bernuansa budaya relijius ini, berbagai elemen masyarakat di DIJ sekaligus ingin memberi tekanan kepada pemerintah pusat agar tetap mengakui dan mengakomodasi keistimewaan di DIJ.

Totok optimistis permintaan masyarakat DIJ akan segera diberikan. Bagaimana jika tidak? "Kami akan menunggu dan mengikuti dawuh Ngarsa Dalem Sultan HB X," jawabnya.

Beberapa agenda kegiatan akan digelar usai salat maghrib. Selain mujahadah di Masjid Agung Pajimatan, juga dilakukan kegiatan mubeng beteng kompleks makam serta pelepasan bregodo 17 kecamatan yang akan bergabung dengan bregodo lain untuk mengikuti mubeng beteng di Kraton yang juga dilakukan malam ini.

Ketua Paguyuban 21 Ariesman mengatakan, mengingat keterbatasan lokasi, pihaknya hanya menargetkan kegiatan diikuti sebanyak lima ribu orang. Sedangkan bregodo yang akan dilepas ke Kraton Jogja diperkirakan sejumlah 850 orang.

"Sebagian lagi akan mengikuti mubeng beteng kompleks makam usai mujahadah," terang Ariesman.

Kegiatan mubeng beteng di Kraton dan Kompleks Makam Raja-Raja di Imogiri ini sarat makna relijius. Mubeng beteng sebagai bukti kehendak rakyat meminta petunjuk kepada Tuhan. Karena itu, peserta selama mubeng beteng akan melantunkan ayat-ayat suci dan berdzikir. ***

Keistimewaan Tidak Boleh Hilang

Wali Kota: Saeyeg Saeko Proyo Wong Jogja

Herry Zudianto

JOGJA-Wali Kota Herry Zudianto berharap, Jogja dengan mengusung tema Celebration of Cultural Unity, dapat memberi sumbangsih merumuskan Keistimewaan jilid II.

"Jogja harus terus istimewa yang sejalan dengan dinamika yang terus berkembang," kata Herry.

Ia menegaskan, kunci keistimewaan adalah bisa ditiru, bisa digugu dan bisa dicontoh.

Sehingga dengan kearifan lokal budaya Jogja, Herry mengajak masyarakat mewujudkan saeyeg saeko proyo wong Jogja.

"Jogja memang pantas istimewa karena dapat dicontoh oleh daerah lain. Ayo Jogja harus berperan mengisi definisi baru Keistimewaan Jogja jilid II," ajaknya.

Keistimewaan DIJ tidak boleh hilang. Herry meminta peringatan HUT ke-252 Kota Jogja dijadikan pencanangan partisipasi masyarakat untuk Keistimewaan Jogja sesuai roh kebangkitan nasional untuk menjadikan masyarakat maju, sejahtera, berdaulat dan bermartabat. Sementara itu, Herry Zudianto bersama Panitia HUT ke-252 Kota Jogja, dewan dan perwakilan tokoh masyarakat melepas balon berhadiah di Halaman Balaikota Timoho kemarin. Kegiatan ini juga dilaksanakan secara serentak di 45 Kelurahan. Jumlah keseluruhan balon berhadiah yang dilepas sebanyak 1.500 buah.

Wali Kota dalam sambutannya berharap melalui tema Celebration of Cultural Unity dapat dijalin persatuan dan kesatuan. (ukd)

Jawa Pos
RADAR JOGJA
KAMIS | 9 Oktober 2008
Setiap Ada yang Baru!
ECERAN Rp 2.500

Mendagri Akui Keppres Tak Punya Dasar Hukum

JAKARTA - Dasar hukum perpanjangan masa jabatan gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) berpotensi menjadi persoalan baru. Keputusan Presiden (Keppres) 86/P Tahun 2008 tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Bahkan, dalam sejarah, tidak pernah ada sebuah keppres dikeluarkan untuk memperpanjang masa jabatan seorang gubernur.

GONJANG GANJING KEISTIMEWAAN

Mendagri Mardiyanto mengakui bahwa keppres perpanjangan masa jabatan gubernur tidak punya dasar hukum. Selama ini, jika masa jabatan seorang kepala daerah habis, sementara masih ada persoalan di daerahnya, pemerintah biasanya mengangkat seorang penjabat atau pelaksana tugas (plt).

Format keppres perpanjangan masa jabatan Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur sama dengan keppres penunjukan seorang penjabat »

» Baca Mendagri... Hal 15

Sultan HB X Dicapreskan SOKSI

MENDAGRI

Sambungan dari hal 1

Padahal, seorang penjabat tidak diperkenankan mengambil keputusan strategis selama menjabat.

"Kalau kita angkat kembali (menjadi gubernur, Red), itu juga menyalahi UU. Karena kepala daerah hanya boleh menjabat maksimal dua kali," ujar Mardiyanto setelah menyerahkan keppres tersebut kepada Sultan Hamengku Buwono X kemarin.

Padahal, Sultan HB X sudah menjabat dua periode. Karena itu, tambah Mardiyanto, perpanjangan masa jabatan merupakan formulasi yang pas. Tujuannya, agar Sultan HB X dan Paku Alam IX bisa terus mengawal pembahasan RUU Keistimewaan Jogjakarta sampai selesai.

Dengan keppres tersebut, masa jabatan Sultan sebagai gubernur diperpanjang hingga maksimal tiga tahun. "Keputusan ini untuk menghindari kekosongan kekuasaan di Jogjakarta," jelas Mardiyanto. Masa jabatan gubernur DIJ berakhir pada 9 Oktober 2008 hari ini. Sementara, pengaturan masa jabatannya masih dirumuskan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keistimewaan Jogjakarta antara DPR dan pemerintah.

Mendagri menyatakan, keppres yang dikeluarkan merupakan formulasi untuk menghindari kekosongan kekuasaan. Saat ditanya apakah legalitas keppres perpanjangan masa jabatan gubernur DIJ tersebut kuat, Mardiyanto menjawab, selama peraturan itu dikeluarkan oleh presiden, dasar hukumnya tidak akan bermasalah. "Selama aturan itu dikeluarkan presiden, saya tidak masalah," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Sultan berharap dalam waktu tiga tahun, pembahasan RUU tidak perlu lagi ada kontroversi tentang perlu tidaknya perpanjangan masa jabatan gubernur DIJ. "Saya berharap pembahasan RUU tersebut mampu mengakomodasi kepentingan pemerintah sekaligus aspirasi masyarakat," katanya.

Masyarakat Jogjakarta sendiri mendesak agar kedudukan Sultan sebagai raja tetap melekat dengan posisinya sebagai gubernur. Karena itu, dalam amanat yang disepakati antara pemerintah dan Sultan HB IX pada 1945 disebutkan bahwa kedudukan sultan Jogjakarta adalah kepala daerah, bukan gubernur. "Aspirasi masyarakat menginginkan penetapan, bukan pemilihan," tambah Sultan.

Keputusan Setengah Keputusan

Mantan Ketua MPR RI Amien Rais menilai keputusan presiden memperpanjang masa jabatan gubernur dan wakilil gubernur menjadi tiga tahun lagi bukanlah solusi. Keppres no 86/P/2008 tersebut dinilai sebagai tindakan valiatif yang tidak mengobati penyakit melainkan hanya menunda masalah. Setelah masa penundaan habis, masalah itu akan muncul lagi.

"Seperti obat aspirin, bodrek atau naspro, setelah diminum tiga tahun kambuh lagi. Jadi tidak jelas, itu politik. Keppres ini hanya valiatif tidak tindakan solutif, hanya menunda, nanti begitu selesai penundaan masalah belum selesai," katanya sore kemarin di kediamannya.

Amien juga menyebut, Keppres itu sebagai sebuah keputusan setengah keputusan. Setengah keputusan untuk memantapkan kesiapan seluruh struktur di DIJ.

Tiga tahun bukan waktu yang cukup untuk masa transisi. Untuk sebuah masa transisi idealnya minimal lima tahun. "Sebagai sebuah masa transisi, ya 5 tahun sekalian, itu namanya masa transisional supaya mental, wawasan, dan secara rasional bagi warga DIJ, Tokoh formal dan non formal sudah siap," tandasnya.

Artinya, dengan rentang waktu lima tahun itu akan cukup bagi masyarakat dan tokoh -tokoh di DIJ secara mental, rasional dan program jika ada pergantian sistem baru.

Seperti diamanatkan dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945, kepala daerah gubernur, bupati dan wali kota dipilih secara demokratis. Dalam undang-udang mensyaratkan rotasi kepemimpinan.

Permasalahan bentuk yang diinginkan untuk keistimewaan DIJ terkait dengan kontroversi penetapan dan pemilihan kepala daerah, Amien menyatakan, yang berhak memberikan jawaban mengenai keistimewaan adalah kraton Jogjakarta sendiri.

Keistimewaan seperti apa yang diinginkan di DIJ ini menurut Amien, memang pihak kraton yang berhak memberikan jawaban.

Penetapan terhadap penguasa kraton kesultanan sebagai gubernur DIJ waktu itu berdasarkan piagam presiden RI tahun 1945 sebagai bentuk penghargaan pemerintah masa penjajahan.

Keistimewaan seperti apa yang diinginkan sekarang ini bukan menjadi tanggung pemerintah sendiri tapi juga masyarakat seluruhnya untuk memikirkannya. sehingga tiga tahun perpanjangan belum cukup menemukan solusi menyelesaikan masalah. Lima tahun waktu yang cukup untuk berpikir secara matang ke depan seperti apa kepemimpinan yang diinginkan msyarakat di DIJ.

Di tengah gonjang-ganjing ketidakjelasan jabatan gubernur DIJ, Sultan Hamengku Buwono X justeru digadang menjadi calon presiden 2009. Kali ini, organisasi yang secara resmi mengajukan Sultan HB X adalah SOKSI yang selama ini menjadi pendukung Partai Golkar.

Deklarasi pencapresan itu dilakukan di rumah Ketua Umum SOKSI Suhardiman. Pernyataan diberikan oleh salah seorang pengurus SOKSI Syamsul Muarif. **(lin/cak/pri/jpnn)**

RADAR JOGJA

16

KAMIS KLIWON 9 OKTOBER 2008

FOTO-FOTO: HERMANSYA DAN BIBI TAUFIK/RADAR JOGJA

DUKUNG KEISTIMEWAAN: Ribuan masyarakat DIJ terus menggelar berbagai kegiatan sebagai bentuk dukungan terhadap Keistimewaan DIJ dengan cara masing-masing. Tadi malam, sebagian warga melakukan ritual mubeng beteng. Sementara di Imogiri, Bantul, ribuan warga selempat menggelar acara mujahadah dipimpin KH Nawawi, pengasuh Ponpes An-Nur Ngrukem, Bantul.

Doa Bersama di Makam Imogiri

Mubeng Beteng di Tengah Guyuran Hujan

BANTUL – Hujan deras yang mengguyur Jogja tidak menyurutkan niat seribuan orang untuk mengikuti mujahadah akbar Pinuwunan Agung di Masjid Pajimatan, kompleks makam raja-raja Imogiri, Bantul.

Meski sebagian peserta harus berdiri karena tikar yang disediakan basah, acara doa bersama yang dipimpin KH Nawawi, pengasuh Ponpes An-Nur Ngrukem, Bantul, itu tetap berlangsung khidmat. "Kami salut dengan semangat teman-teman. Meski hujan deras, mereka rela basah kuyup menghadiri acara ini. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Jogja memang benar-benar menginginkan DIJ tetap dimpinpin oleh Sultan HB X dan Paku Alam IX," kata Nur Janis, panitia doa bersama tersebut.

Menurut Janis, di samping KH Nawawi, acara itu dihadiri sembilan kiai yang merupakan perwakilan masing-masing kabupaten dan kota. Acara tersebut dimulai dengan pembacaan tahlil yang dipimpin Kiai Nawawi.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan doa yang dipimpin sembilan kiai secara bergantian. Dari doa yang dilantunkan, rata-rata para kiai tersebut berharap agar pemerintah pusat memperhatikan keinginan masyarakat Jogja serta menghargai sejarah DIJ.

Sementara itu, di pintu masuk kompleks makam raja-raja, panitia menyiapkan nasi bungkus yang dibagikan secara gratis kepada peserta mujahaddah. Menurut panitia yang bertugas, mereka menyediakan sedikitnya 4 ribu nasi bungkus. Ketika acara berakhir, nasi bungkus di meja panitia masih cukup banyak. "Target kami, acara ini memang dihadiri sekitar 5 ribu orang. Tetapi, mungkin karena hujan, yang datang hanya sekitar satu hingga dua ribu," jelas Nur Janis.

Pada saat yang hampir sama, tadi malam, ratusan masyarakat Jogjakarta dan abdi dalem keraton melakukan ritual mubeng beteng. Hujan yang mengguyur cukup deras, tak menyurutkan langkah kaki mereka mengitari beteng. Sambil membawa berbagai atribut dan mengenakan baju peranakan Jawi Jangkep, mereka berjalan sambil membisu. Mubeng beteng ini merupakan laku spiritual masyarakat yang mendukung Keistimewaan DIJ. (nfi)

Untuk konsultasikan pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat, keluhan kesehatan, tentang, atau pengaduan, melalui SMS ke nomor 085868156.

Pusat Harus Konsisten

Keppres perpanjangan masa jabatan gubernur DIJ sikhirnya keluar juga, yang berarti mengakhiri polemik tentang penetapan atau pemilihan. Kami minta pemerintah harus konsisten dengan waktu tiga tahun itu untuk bisa mempungkan UU Keistimewaan DIJ. Jika tidak, rakyat Jogja akan melawan! 085729578xxx.

Kami Dukung HB X dan PA IX

Sebuah warna yang luhur, besar dan tinggal di Jogja. Saya mendukung penuh Ngerso Dalem Sultan HB X dan Paku Alam IX untuk terus memimpin DIJ. Kami juga mendukung sikap Sultan yang menolak perpanjangan masa jabatan hanya lima tahun. Cukup tiga tahun hanya [illegible] 081240HBxxx.

Cermin Pusat Bingung dan Lamban

Keluarnya Keppres Perpanjangan Jabatan Gubernur DIJ

JOGJA – Pakar birokrasi dari UGM Prof Dr Warsono Hardono mendukung terbitnya keppres perpanjangan tiga tahun masa jabatan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X, mencerminkan ketambanasan dan kebingungan pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan keistimewaan Jogja.

"Menurut saya, pemerintah kita masih bingung bahwa DIJ sebenarnya berbeda dengan wilayah lain. Mereka terlalu lambat, sementara tenggat waktu masa jabatan gubernur dan wakil gubernur sudah hampir habis, maka solusinya dengan menerbitkan keppres," ujar Warsito kemarin.

Dikatakan, berdasarkan UU yang ada, keistimewaan Jogja terletak pada pemerintahan di tangan Kasultanan dan Pakualaman. Persoalan menjadi menarik, karena dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, perpolitikan Jogja akan menjadi rumit.

"Ramainya karena membicarakan bagaimana sikap dan keputusan pemerintah pusat. Apakah akan mengikari keberadaan Kasultanan seperti yang tertuang dalam Amanat 5 September 1945 dengan melaksanakan pilkada langsung?

» Soca Cermin... Hal 13

HALAMAN SAMBUNGAN

Pemerintah Cari Risiko Paling Aman

CERMIN

Sambungan dari hal 3

Juga bagaimana dengan kedudukan Jogja sebagai daerah istimewa, apakah akan disamakan dengan wilayah lain," paparnya.

Ia mengatakan, hendaknya pemerintah pusat tidak tergesa-gesa dan lebih intens terhadap permasalahan keistimewaan Jogja ini.

Sementara pengamat politik UGM Bambang Purwoko menilai, problema umum pejabat di Jakarta adalah mereka mengurus masalah-masalah di daerah, namun kurang memahami masalahnya dan tidak tahu bagaimana mengatasi kebutuhan masyarakat secara baik. Oleh karena itu, hendaknya Jogja menjadi pelajaran untuk semuanya.

Dikatakan, kesadaran pemerintah nasional akan kebutuhan dasar masyarakat Jogja, sedikit terlambat. Sebab, UU No 5 Tahun 1974 soal pengaturan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah itu masih berlaku. Bahkan diperkuat dengan UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004.

Undang-undang itu dengan tegas menyebutkan, kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah yang memiliki keistimewaan, tidak terikat pada masa jabatan dan syarat-syarat serta ketentuan dari pemerintah pusat. Namun karena Keppres Tahun 2003 soal pengangkatan Sri Sultan HB X sebagai gubernur sudah keluar, mau tidak mau HB X harus tunduk aturan pemerintah itu.

"Nampaknya kesadaran itu baru datang dari pemerintah pusat dengan terbitnya keppres yang mengatur perpanjangan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur hingga tiga tahun. Sebab, sebelumnya staf Depdagri sudah berupaya meyakinkan mendagri, dan mendagri baru meyakinkan presiden," uraiinya.

Soal penolakan perpanjangan masa jabatan hingga lima tahun, Bambang menyebutkan, bisa jadi alasan sebenarnya adalah sama halnya HB X kembali menjabat sebagai gubernur untuk ke tiga kali. Kendati demikian, ia melihat sisi positif dari terbitnya keppres perpanjangan masa jabatan itu. Yakni pemerintahan umum tidak vakum dan bisa berjalan sebagaimana mestinya, dan pemerintah nasional punya waktu untuk segera merampungkan UUK.

"Semoga saja pemerintah pusat tepat waktu karena punya waktu yang relatif cukup," ujarnya sembari berharap, kasus Jogja bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah pusat untuk lebih peka terhadap permasalahan di daerah.

Lahirnya kebijakan pemerintah mengeluarkan keputusan presiden (Keppres) dengan memperpanjang jabatan Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur selama tiga tahun dinilai kurang tepat.

Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Hestu Cipto Handoyo SH MH menilai, mestinya landasan hukum yang digunakan pemerintah bukan berbentuk keppres. "Yang paling tepat bentuknya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Secara yuridis lebih kuat," tandasnya.

Hestu mengatakan pemerintah cukup beralasan mengeluarkan perpu. Satu alasan yang mendesak lahirnya perpu adalah terjadinya kekosongan kekuasaan pasca 9 Oktober karena belum disahkanya UU Keistimewaan DIJ. Argumen ini, kata Hestu, dapat digunakan sebagai dasar penerbitan perpu.

"Ini memang bukan kegentingan yang memaksa. Tapi kekosongan kekuasaan itulah yang mendorong pemerintah harus mengeluarkan perpu," terangnya. Hestu yang pernah menjadi tim ahli penyusun RUUK DIJ versi DPD itu menambahkan dengan keluarnya keppres itu tidak sepenuhnya sesuai dengan UU No 10/2004.

Meski tak sesuai, Hestu melihat keberadaan keppres itu bukan merupakan rechiling atau peraturan. Tapi, keppres tersebut tergolong sebagai besicking yang bersifat keputusan tata usaha negara (TUN). "Keputusan TUN itu sifatnya konkret, individual dan final," paparnya.

Dengan argumentasi itu, Hestu berpendapat keppres itu tidak bersifat umum dan abstrak. Keppres itu juga hanya berlaku satu sekali. Hestu mengakui perpanjangan jabatan gubernur dan wakil gubernur tidak diatur dalam UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kembali soal tidak diberlakukannya perpu, Hestu mendugo pemerintah ingin mencari risiko yang paling ringan. Sebab, dengan perpu pemerintah harus mengajukan ke DPR. Risikonya, perpu itu akan diterima atau ditolak parlemen. Bila diterima, maka posisi gubernur akan seterusnya dijabat HB X.

Ini bertentangan dengan komitmen SBY yang akan memberlakukan aturan kepala daerah harus dipilih lewat pilkada. "Jalan paling mudah pemerintah memilih keppres dan bukan perpu," ujarnya.

Sedangkan ahli hukum tata negara FH UGM Eni Urbaningsih merilai, terbitnya keppres sebagai keputusan reaksioner dari pemerintah. "Kenapa baru sekarang dikeluarkan. Itu terkesan keputusan dadakan," sindirnya.

Senada dengan Hestu, Eni menilai produk hukum yang paling tepat adalah perpu. Di mata Eni, lahirnya keppres itu menunjukan sebetulnya keistimewaan DIJ hanya nama saja. Pertimbangannya, sampai saat ini belum pernah ada UU yang mengatur keistimewaan DIJ.

Anggota DPRD DIJ Nazaruddin SH mengatakan bila dikaitkan dengan UU No 10/2004 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, keluarnya keppres itu cukup aneh karena dalam tata urutan perundang-undangan keppres tidak dikenal. Berdasarkan UU tersebut yang diatur adalah peraturan presiden (perpres).

"Pertanyaannya, apakah keppres itu dengan menyampingkan ketentuan perundang-undangan itu masuk wilayah rechiling dan besicking," kata alumni FH UII ini. Menurut Nazar, salah satu alasan yang bisa dijadikan dasar pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan diberi kebebasan bertindak dalam keadaan tertentu guna menyelesaikan suatu urusan yang disebut freis ermessen. Hanya, freis ermessen bukan tanpa syarat dan batasan.

Nazar berharap lahirnya keppres itu dapat menjadi kajian hukum tata negara (HTN) dan hukum administrasi negara (HAN). "Kita harapkan pakar HTN dan HAN memberikan komentar dan alasan sebagai diskursus publik," pintanya.

Sedangkan anggota Komisi A Ternalem MSi Mhum menyatakan dengan penerimaan HB X itu berarti merupakan isyarat menerima skenario pusat menggelar pilkada langsung di DIJ pasca 2011. Sebab, SBY sudah menyatakan RUUK DIJ harus berpijak pada tiga hal. Yakni, NKRI, demokratisasi dan keistimewaan DIJ. Sebagai bagian dari warga Jogja, Ternalem menyatakan warga sudah berkomitmen mengikuti apa keinginan HB X sebagai raja sekaligus pengayom masyarakat DIJ. (cw2/kus)

Djuwarto Anggap Kebijakan SBY Lucu

BEBERAPA jam setelah diserahkan Mendagri Mardiyanto kepada Sultan Hamengku Buwono X di Depdagri Jakarta, salinan keppres itu sampai di gedung DPRD DIJ. Kepala Biro Tata Pemerintahan Tavip Agus Rayanto yang membawa salinan tersebut. ''Ini saya bawa untuk diserahkan ke Pak Djuwarto (ketua dewan),'' kata Tavip sambil menunjukkan sampul surat berkop Sekretariat Negara RI ■

▸ *Baca* ***Djuwarto...*** *Hal 13*

← HALAMAN SAMBUNGAN

Tidak Perlu Lagi Pelantikan

■ **DJUWARTO**

Sambungan dari hal 3

Radar Jogja mendapatkan kopian keppres yang terdiri atas tiga lembar tersebut. Dasar mengingat keppres itu meliputi pasal 4 ayat 1 dan pasal 18 huruf b UUD 1945, UU No 3/1950 tentang Pembentukan DIJ dan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keppres mengatur masa perpanjangan maksimal selama tiga tahun.

Tavip datang ke gedung dewan sekitar pukul 15.00. Bersama pejabat Pemprov DIJ seperti Sekprov Tri Harjun Ismaji, Assekprov Pemerintahan Dahlan Thaib dan Assekprov Pemberdayaan Masyarakat Bambang Rahardjo, ia ikut menyaksikan penyerahkan keppres di ruang kerja Mendagri.

Saat menerima keppres itu, HB X seorang diri tanpa didampingi PA IX seperti saat ketemu SBY sehari sebelumnya. Tavip mengatakan dengan adanya perpanjangan itu, pemprov tidak perlu menggelar acara pelantikan. ''Nggak perlu karena sifatnya perpanjangan jabatan,'' terangnya.

Meski begitu, Tavip tidak tahu bila atasannya Sekprov Tri Harjun Ismaji pada 27 September lalu menyurati pimpinan dewan meminta agenda pelantikan gubernur. ''Wah kalau surat itu saya nggak tahu. Coba nanti saya konfirmasi ke Pak Sekprov,'' kelitnya.

Wakil Ketua DPRD DIJ Agus Sulistyono memastikan setelah membaca salinan keppres itu agenda pelantikan gubernur tidak diperlukan. ''Surat Sekprov harus dicabut dan ditarik kembali,'' desak anggota Dewan Provinsi Nazaruddin.

Di tempat sama, Ketua DPRD DIJ Akhmad Djuwarto mengatakan usai salinan keppres diterima akan segera digelar rapat gabungan pimpinan (ragabpim) dewan. Djuwarto mengakui materi keppres tidak selaras dengan sikap politik DPRD DIJ yang tertuang dalam Keputusan DPRD DIJ No 28/2008 tanggal 30 Juni lalu. Dewan ingin ada penetapan selama lima tahun.

''Karena presiden memutuskan perpanjangan selama tiga tahun, kita terima keppres itu dengan sejumlah catatan,'' tandasnya. Salah satu catatanya, Djuwarto minta pusat konsisten merampungkan RUUK dalam waktu tiga tahun.

Djuwarto menilai langkah SBY menerbitkan keppres itu mengandung beberapa hal yang lucu. Misalnya untuk menyampaikan keppres itu presiden harus memanggil langsung HB X dan PA IX di ruang kerjanya. Bila keputusannya berupa perpanjangan, mestinya langsung diterbitkan saja. ''Keppres itu juga memunculkan banyak tafsir,'' ungkapnya tanpa merinci lebih lanjut. **(kus)**

Jawa Pos
RADAR JOGJA
JUMAT | 10 Oktober 2008
Selalu Ada yang Baru
ERAN Rp 2.500

DPRD DIJ Ngotot Melantik Sultan HB X

Bukan Perpanjangan, tapi Jabatan Gubernur 2008–2013

GONJANG GANJING KEISTIMEWAAN

JOGJA - Keppres memperpanjang jabatan Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wagub Paku Alam IX belum menyelesaikan persoalan politik di Jogjakarta. Para anggota DPRD setempat tetap mengangendakan pelantikan buat gubernur dan wakil gubernur untuk masa jabatan 2008–2013. Sementara Keppres No 86/P 2008 hanya perpanjangan 3 tahun dan tidak menyebutkan agenda pelantikan.

DPRD sudah menyetujui alokasi anggaran pelantikan dalam APBD Perubahan 2008 sebesar Rp 500 juta. "Acara pelantikan harus tetap dilalukan. Itu sesuai dengan sikap politik DPRD DIJ," tegas Ketua Fraksi Partai Golkar Deddy Suwadi Siregar di hadapan Rapat Kerja (raker) Panitia Anggaran DPRD DIJ dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi DIJ kemarin.

Di hadapan raker yang dihadiri Sekprov DIJ Tri Harjun Ismaji dan beberapa kepala instansi pemprov, Deddy mengingatkan sikap politik DPRD DIJ No 28/2008 tanggal 30 Juni 2008. Isinya, dewan sepakat menetapkan kembali HB X dan PA IX sebagai gubernur dan wakil gubernur selama lima tahun, 2008–2013. "Biarkan saja yang memperpanjang presiden, tapi yang menetapkan dewan. Kita ini istimewa. Maka, kita tetap harus melantik," desaknya.

Deddy pun tidak mempermasalahkan bila HB X dan PA IX keberatan dan tidak mau datang dalam acara pelantikan ■

» Baca DPRD ... Hal 15

Bisa Dilantik In Absensia

■ **DPRD**

Sambungan dari hal 1

Menurut dia, dewan bisa menyiasati dengan melantik secara in absensia.

Desakan Deddy itu didukung anggota Panggar Nazaruddin. Dia memahami konsistensi sikap Deddy getol memperjuangkan penetapan selama lima tahun. Menurut Nazar, bila keppres itu dianggap tidak sesuai dengan sikap politik dewan, secara kelembagaan dewan bisa mengajukan judicial review (JR) kepada Mahkamah Agung (MA).

Di awal raker, Tri Harjun dan Kepala Biro Umum Rani Sjamsinarsi meminta anggaran pelantikan didrop. Alasannya, dengan hanya diperpanjang maksimal tiga tahun, acara pelantikan tidak diperlukan lagi. Keterangan Sekprov itu memancing reaksi keras Wakil Ketua DPRD DIJ Gandung Pardiman. Politikus yang sempat dikecewakan karena acara Sidang Rakyat Jilid II lalu (6/10) digembosi elite kekuasaan DIJ itu tak sepakat dengan usuln Sekprov mengedrop anggaran pelantikan. Namun, sebaliknya, Gandung malah mempertanyakan otoritas keppres itu.

Dengan diperpanjang maksimal tiga tahun berdasarkan keppres yang diakui Mendagri Mardiyanto tak punya dasar hukum, apakah gubernur hasil perpanjangan itu punya kewenangan kuat.

Menurut Gandung, dengan tidak memiliki dasar hukum, keppres yang diteken SBY pada 7 Oktober lalu terancam digugat. Pria yang sedang mengambil program doktor ilmu hukum itu menilai, bila ada masyarakat yang mengajukan uji materiil, pemprov akan mengalami kesulitan. "Pemprov tak ingin ada pelantikan apakah takut dengan elemen propenetapan?" ucap Gandung.

Diserang seperti itu, Tri Harjun mencoba membela. Soal kedudukan hukum keppres itu, mantan kepala dinas kimpraswil itu menyatakan bergantung persepsi dan cara pandang orang.

Mendengar jawaban itu, Gandung merasa tak sreg. Dia menegaskan, hukum harus bersifat tegas dan pasti. "Nggak bisa hanya berdasarkan persepsi," katanya dengan nada tinggi.

Hanya, Gandung mengakui, bakal muncul masalah baru bila HB X kembali bersikap tak tegas seperti selama ini. "Masalah muncul kalau beliau (HB X) berbicara ada pelantikan mangga (silakan), *kalau nggak ada mboten napa-napa* (tidak apa-apa). Ya to!" ucap Gandung seolah menirukan gaya bicara HB X.

Ucapan Gandung itu tak pelak mengundang *geeer*. Semua peserta raker, termasuk pejabat pemprov, tak kuasa menahan senyum. "Wah, gaya Pak Gandung sudah mirip Pak Sultan," celetuk Ketua Komisi B Basuki Rakmat yang duduk di belakang Gandung.

Lantaran ada perdebatan itu, pimpinan sidang Agus Sulistiyono mengusulkan agar dewan berkonsultasi dengan presiden atau Mendagri menyoal otoritas keppres itu. Soal anggaran pelantikan akhirnya belum ada kata final. Rapat panggar sepakat melanjutkan pembahasan pada hari ini, Jumat (10/10). (kus)

TAJUK

Setelah Sultan Menerima Keppres

Keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) 86/P Tahun 2008 yang memperpanjang masa jabatan Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), untuk sementara memecahkan persoalan pemerintahan di Jogja. Paling tidak, selama tiga tahun –lama perpanjangan yang tercantum dalam keppres– Jogja akan berjalan normal di bawah kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX.

Namun, tiga tahun bukanlah waktu yang lama. Karena itu, pembahasan RUU Keistimewaan Jogjakarta harus benar-benar diselesaikan sebelum rentang waktu itu selesai. Ini penting agar "tragedi" ancaman kekosongan kekuasaan seperti sebelum keppres dikeluarkan tidak terjadi lagi.

Namun, yang harus diperhatikan dalam pembahasan itu, unsur-unsur keistimewaan Jogja harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah pusat dan DPR RI. Sebab, dari sisi historis daerah ini memang memiliki keistimewaan. Demi mengakomodasi keistimewaan itu, logika demokrasi yang selama ini menjadi "agama kita" dalam bernegara bisa jadi harus dikesampingkan.

Demokrasi, untuk sementara ini, memang kita yakini sebagai sistem bernegara yang terbaik. Namun, bukan berarti demokrasi tidak memiliki kelemahan. Dan, soal kelemahan itu, kita tidak sulit mencari contohnya.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung bisa dijadikan contoh aktual. Dengan menggunakan mekanisme demokrasi, orang jahat dan bermiat buruk banyak yang sukses menjadi pemimpin suatu daerah. Dengan bermodalkan tumpukan uang yang dimiliki, "si jahat" bisa melenggang menjadi orang nomor satu di suatu daerah.

Dengan alasan demokrasi pula, kendati "si jahat" itu terbukti tidak membuat kemajuan apa pun –bahkan malah memperburuk, sistem tidak bisa berbuat apa-apa. "Si jahat" bisa terus melanjutkan kepemimpinan buruknya hingga masa jabatannya selesai.

Memang, melalui lembaga legislatif ada mekanisme untuk menurunkan pemimpin yang gagal. Tapi, seberapa jauh legislatif mau dan bisa menjalankan fungsi ideal itu? Bukankah banyak bukti yang menunjukkan, dalam kasus seperti itu, anggota legislatif lebih bisa berkompromi dengan pemimpin buruk daripada harus membela kepentingan rakyat yang diwakilinya?

Pelajaran yang bisa dipetik dari sana, ternyata demokrasi bukan segala-gelanya. Jika demokrasi hanya dilaksanakan secara prosedural, tidak ada jaminan demokrasi akan mendatangkan kemanfaatan. Dan, demokrasi prosedural seperti itu kini banyak terjadi di negeri ini.

Nah, kaitannya dengan Jogja, bila memang kepemimpinan "otomatis" Sultan-Paku Alam terbukti membawa kemaslahatan, tidak ada alasan untuk mengotak-atiknya demi alasan demokrasi. Sejarah membuktikan, selama sistem itu diterapkan (sejak keluarnya piagam pengukuhan Jogjakarta 19 Agustus 1945) hingga sekarang, kemadlaratan yang fatal tidak terjadi.

Memang, seperti halnya demokrasi, sistem ini bukanlah tanpa kekurangan. Artinya, bisa saja ke depan, figur yang memangku gelar sultan dan paku alam –yang otomatis menjadi gubernur dan wakil gubernur DIJ– bukanlah orang yang ideal. Karena itu, mekanisme untuk menjaga agar hal itu tidak terjadi juga harus dipikirkan.

Tentu kesultanan dan pakualaman merupakan pihak yang paling bertanggung jawab agar kepemimpinan di Jogja tetap dipegang oleh orang yang pantas dan layak memimpin. Nama besar Kesultanan Jogja harus bisa dijadikan garansi akan hal itu. Bisakah? (*)

POJOK NGEJAMAN

* **Keppres tak sertakan agenda pelantikan, DPRD DIJ bingung.**
  - *Anggaran tak sesuai masa jabatan.*
* **GKR Hemas kagumi kerajinan limbah sagu.**
  - *Di tangah ahli, yang biasa jadi istimewa.*
* **Hujan mulai datang, petani tembakau panik.**

OPINI

Belanda Saja Akui Keistimewaan Jogja

Endang Suryadinata *

Keistimewaan Jogjakarta sedang menjadi perbincangan hangat seiring pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Jogjakarta. Di satu sisi, Jogjakarta adalah daerah istimewa. Itu, antara lain, ditandai dengan gubernur DIJ yang tidak dipilih langsung, melainkan diteruskan keluarga Keraton Jogjakarta.

Tetapi, menurut UUD 1945 yang diamandemen, semua gubenur/kepala daerah provinsi dipilih langsung dalam pemilihan kepala daerah (*Jawa Pos Radar Jogja, 7/10/2008*).

Sementara itu, sidang rakyat Jogjakarta dengan agenda utama menetapkan Sri Sultan HB X dan Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur DIJ dilakukan Senin (6/10). Dalam sidang itu, rakyat Jogja juga meminta keistimewaan DIJ tidak diusik. Intinya, mereka tak mau ada pilgub karena bisa menghapus keistimewaan Jogja.

*

RUU DIJ dinilai tidak mampu menyerap aspirasi rakyat Jogja yang tetap menghendaki keistimewaan Jogja. Apalagi, kalau kita tengok sejarah berdirinya Keraton Jogjakarta dan penggabungannya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kita akan tahu makna keistimewaan DIJ.

Publik di tanah air, termasuk wakil rakyat yang membahas RUU DIJ, jangan pernah lupa bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat lebih dulu ada dibandingkan NKRI yang berdiri pada 17 Agustus 2008. Kasultanan Ngayogyakarta berdiri pada 13 Februari 1755, bertepatan dengan terlaksananya Perjanjian Giyanti antara Pangeran Mangkubumi (kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I) dan VOC di bawah Gubernur-Jenderal Jacob Mossel.

Jadi, pada era penjajahan Belanda saja, otoritas sultan diakui sebagai penguasa wilayah Jogjakarta. Setidaknya sampai 1792 Kasultanan Jogjakarta secara de facto merupakan negara merdeka dan VOC hanyalah mitra yang sejajar. Untuk menjamin posisinya, VOC menempatkan seorang residen di Jogjakarta guna mengawasi kesultanan.

Lalu, setelah Perang Diponegoro pada 1830, Kasultanan Jogjakarta secara de facto dan de jure menjadi negara protektorat dari Koninkrijk der Nederlanden dengan status zelfbestuurende landschappen.

Selain itu, pemerintah Hindia Belanda selalu mengajukan perjanjian politik yang dinamakan kontrak politik bagi calon sultan yang akan ditakhtakan. Dalam kontrak politik itu, antara lain, diakui keistimewaan Kasultanan Jogjakarta. Kontrak politik tersebut, antara lain, diterapkan pada Sultan Hamengku Buwono V hingga IX. Kontrak politik terakhir dibuat pada 18 Maret 1940 antara Gubernur Hindia Belanda untuk Daerah Jogjakarta L. Adam dan Sultan HB IX.

Jadi, kesimpulannya, pemerintah kolonial Belanda saja mengakui keistimewaan Jogjakarta. Padahal, kekuasaan monarki lain di nusantara akan langsung dihapus dan tidak diakui keistimewaannya setelah ditaklukkan langsung oleh Belanda.

Mengapa kebijakan khusus tersebut diambil pemerintah kolonial? Jelas, hal itu tak terlepas dari ikatan kuat antara sultan sebagai pengayom dan rakyatnya. Menurut para penasihat pemerintahan kolonial, penghapusan kesultanan justru akan berpotensi besar menimbulkan gejolak di masyarakat.

Ikatan kuat antara raja dan rakyat itu diakui pemerintah Jepang yang menggantikan Belanda. Karena itu, Jepang juga tetap mengakui keistimewaan Jogjakarta. Sultan Hamengku Buwono IX (HB IX) yang naik takhta pada 1940 malah melakukan perubahan besar, khususnya selama pendudukan Jepang (1942–1945). Sultan sungguh memulihkan kembali kekuasaannya selaku kepala pemerintahan.

**

Republik baru bernama NKRI yang merdeka pada 17 Agustus juga menghargai keistimewaan Jogjakarta, terlebih melihat kontribusi Sultan HB IX bagi NKRI. Itu bisa kita saksikan dalam Amanat 5 September 1945 yang dikeluarkan Sultan HB IX dan Paku Alam (PA) VIII. Amanat itu menyatakan, penggabungan diri Kasultanan Jogjakarta dan Kadipaten Pakualaman ke dalam NKRI dengan status daerah istimewa yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur wilayahnya.

Amanat itu dijawab Presiden Soekarno dengan menyerahkan Piagam Kedudukan kepada HB IX dan PA VIII sebagai tanda persetujuannya pada 6 September 1945 (bertanggal 19 Agustus 1945). Hal itu juga tercantum dalam pasal 18 UUD 1945, sebelum perubahan, yang menyatakan bahwa negara menghormati daerah yang memiliki status istimewa.

Memang, pada 1950 secara resmi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat bersama-sama dengan Kadipaten Pakualaman menjadi Daerah Istimewa Jogjakarta, sebuah daerah berotonomi khusus setingkat provinsi sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam otonomi khusus itu, keistimewaan Jogjakarta tetap dijamin dan dipertahankan.

Jadi, keistimewaan DIJ secara historis, sosiologis, dan politis tetap merupakan sistem yang paling tepat. Apalagi, selama ini DIJ tak pernah menjadi ancaman, dalam arti ingin memisahkan diri dari NKRI. Malah, kontribusi sultan dan rakyat DIJ sudah terbukti, khususnya dalam revolusi fisik melawan Belanda. Di antaranya dengan dijadikannya Jogjakarta sebagai ibu kota RI selama 4 tahun, mulai 1946 hingga akhir 1949.

Meski UUD 1945 yang diamandemen mengamanatkan ada pilgub langsung, pemilihan itu sebenarnya tak sejalan dengan Sila IV Pancasila, yakni musyawarah dan mufakat sebagai amanat demokrasi Pancasila.

Jadi, jika gubernur/wakil gubernur DIJ tak dipilih secara langsung, itu bukan pelanggaran atas konstitusi. Yang penting, Jogja tetap berada dalam NKRI dan prinsip demokrasi tak dilanggar. Sudah selayaknya dan sepantasnya keistimewaan Jogja dipertahankan dan dijamin sebagaimana DKI Jakarta dan NAD (Nanggroe Aceh Darussalam).

* *Endang Suryadinata, peminat sejarah Indonesia-Belanda, alumnus Erasmus Universiteit Rotterdam*

Jawa Pos
RADAR JOGJA
SABTU | 11 Oktober 2008 — Selalu Ada yang Baru — ECERAN Rp 2.500

PPP Setuju Sultan Tetap Gubernur

PDIP dan PKS Masih Ragu-Ragu

JAKARTA – Satu persatu, kekuatan politik di DPR mulai menunjukkan sikap dalam menyikapi RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Khususnya berkaitan dengan status Sultan Hamengku Buwono (HB) X dan Paku Alam IX yang selama ini memiliki hak istimewa, yakni ditetapkan menjadi gubernur dan wakil gubernur Jogjakarta.

Bila Partai Golkar dan Partai Demokrat cenderung sejalan dengan ide pemerintah untuk melaksanakan pilkada langsung di Jogjakarta, berbeda lagi dengan PPP. ''Sultan harus tetap jadi Gubernur. Itulah keistimewaan yang membedakan Jogjakarta dengan daerah lain,'' kata Wakil Ketua Umum DPP PPP Chozin Chumaidy di Gedung DPR, kemarin (10/10).

Menurut dia, keistimewaan di Jogjakarta memiliki akar sejarah yang panjang dan kuat. Terjaganya eksistensi NKRI di era perjuangan kemerdekaan, tidak terlepas dari pengorbanan Sri Sultan HB IX. ''Sultan tetap bisa menjabat gubernur yang sifat dasarnya seumur hidup.''

Meski menjabat seumur hidup, Chozin menegaskan, model kepemimpinan di Jogjakarta tidak menciptakan monarki absolut ■

▸ Baca PPP... Hal 15

Peta Politik Pembahasan RUU Keistimewaan di DPR

Pemilihan	Penetapan	Belum Bersikap
Pemerintah	PPP	PDIP
Golkar		PKS
Demokrat		

GRAFIS: GEPENG/RADAR JOGJA

GONJANG GANJING KEISTIMEWAAN

Rakyat Jogja Juga Diajak Bicara

■ **PPP**

Sambungan dari hal 1

''Selain memiliki aparat birokrasi yang profesional, Sultan juga sudah terbukti selalu mengabdi kepada rakyat,'' ujar anggota Komisi II DPR itu.

Dia berharap, Keppres No.86/P/2008 yang memperpanjang masa jabatan Sultan HB X sebagai Gubernur Jogjakarta selama tiga tahun benar-benar diperhatikan DPR dan Pemerintah. ''Itu artinya, hanya ada waktu maksimal tiga tahun untuk merampungkan RUU Keistimewaan Provinsi DIJ,'' katanya.

Sementara itu, PDIP dan PKS terkesan masih ragu-ragu dengan sikapnya. Ketika dihubungi, Sekjen PDIP Pramono Anung mengatakan faktor kesejarahan Jogjakarta harus tetap dihormati. Terutama sekali komitmen Bung Karno dan Sultan HB IX yang tertuang melalui Maklumat 5 September 1945.

''Kami memberi apresiasi atas apa yang diputuskan *founding father*,'' katanya. Karena itu, lanjut dia, setiap upaya perubahan harus dibicarakan secara terbuka, tanpa harus dipolemikkan. ''Yang diajak bicara bukan hanya Sultan HB X, tapi juga rakyat Jogjakarta,'' tegasnya. Lantas, apa sikap tegas PDIP ? ''Pada saatnya nanti, akan kami sampaikan,'' elaknya.

Presiden PKS Tifatul Sembiring menyampaikan wacana pilkada langsung di Jogjakarta sebenarnya bermula dari lontaran Sultan HB X sendiri. Sultan, jelas Tifatul, pernah mengaku tidak mungkin mempertahankan sistem kerajaan di Jogjakarta selamanya.

Sementara itu, realitas tatanan masyarakat Jogjakarta, dari hari ke hari juga bergerak menjadi lebih egaliter. Meski begitu, tegas Tifatul, aspirasi masyarakat yang menginginkan Jogjakarta mempertahankan sistem kepemimpinan daerahnya juga cukup kuat.

''Makanya, perlu kita kaji secara mendalam bagaimana pandangan masyarakat Jogjakarta yang sebenarnya, misalnya melalui *polling* atau media lain seperti referendum,'' bebernya. ''Yang jelas, PKS belum memutuskan sikap,'' imbuhnya cepat. **(pri)**

HB X Harap DPR Selesaikan RUUK

Enggan Komentari Keppres yang Tak Sesuai UU

JOGJA- Polemik seputar lemahnya landasan hukum Keppres No 86/P 2008 tentang Perpanjangan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ masih berlanjut. Meski tahu keppres disorot banyak kalangan, Gubernur DIJ Hamengku Buwono X enggan menanggapi masalah tersebut. Termasuk soal penilaian keppres itu tak sesuai dengan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

"Biarkan saja. Itu menjadi urusan pakar. Jangan saya yang bicara," elak HB X di Kepatihan kemarin.

Kamis (9/10) kemarin, tepat sepuluh tahun HB X menjabat gubernur selama dua periode. Sebetulnya, masa jabatannya sebagai gubernur berakhir kemarin. Namun dengan adanya perpanjangan itu, masa jabatan gubernur DIJ bakal diemban HB X paling lama selama tiga tahun hingga 2011 mendatang.

Hari pertama masa jabatan perpanjangan itu diisi HB X dengan berbagai aktivitas yang padat. Di antaranya dia menerima kedatangan Bupati Kulonprogo Toyo S Dipo yang menghadap ke ruang kerjanya.

Dalam keterangannya dengan wartawan, HB X mengatakan karena saat ini RUUK sudah sampai di DPR, maka bola ada di parlemen. Ia berharap selama waktu tiga tahun itu, DPR dapat mempercepat pembahasan RUUK tersebut. Selain itu, raja Keraton Jogjakarta itu juga ingin Komisi II DPR juga intens mengadakan dialog dengan rakyat Jogja.

Sebagai gubernur, HB X mengakui tugasnya adalah memfasilitasi Komisi II saat turun ke Jogja mengadakan penjaringan aspirasi, berbicara dengan kelompok-kelompok masyarakat dan kampus. "Tugas saya ke sana," terangnya.

Terpisah, Ketua DPW PKB DIJ Sukamto mengatakan dengan adanya perpanjangan jabatan gubernur itu semakin meneguhkan keistimewaan DIJ. Hanya saja, perpanjangan selama tiga tahun itu tidak sesuai dengan aspirasi rakyat DIJ. Keingian rakyat, jabatan gubernur bukan diperpanjang tapi ditetapkan.

"PKB konsisten ingin penetapan bukan saja lima tahun tapi sepanjang masa dan jabatan gubernur dijabat run temurun," tegasnya.

Ia pun merasa tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya dengan keputusan pemerintah itu. Sukamto ingin untuk menjaga dan mempertahankan keistimewaan itu presiden didesak bukan hanya memperpanjang jabatan gubernur dan wakil gubernur.

Ketua Kadin DIJ itu meminta perpanjangan itu juga diterapkan pada pimpinan dan anggota DPRD DIJ. Alasannya penyelenggaraan pemerintah daerah itu terdiri atas eksekutif dan legislatif.

Di samping itu, lanjut dia, perpanjangan juga harus dilakukan terhadap bupati dan wali kota se-DIJ. " Ini demi menjaga kelanggengan keistimewaan DIJ," cetusnya semangat.

Sedangkan anggota Komisi D DPRD DIJ Heru Wahyu Kismoyo menilai diterimanya perpanjangan jabatan itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanat leluhur dan amanat rakyat DIJ seperti termuat di Keputusan DPRD DIJ No 28/2008. Dengan gagalnya Sidang Rakyat Jilid II (6/10) lalu, Heru menganggap DIJ sepeti kalah sebelum perang.

Dengan adanya gelombang aksi mendukung penetapan, Heru mengadakan ada pergeseran di tengah masyarakat. Bila era HB I hingga HB IX senantiasa memikirkan rakyatnya, maka pada era sekarang HB X, terjadi kebalikannya.

"Rakyat yang sibuk memikirkan sultannya," ucap staf pengajar Fisipol Universitas Widya Mataram ini. **(kus)**

Tolak Ide Lantik Gubernur

SIKAP ngotot DPRD DIJ ingin menggelar acara pelantikan gubernur DIJ seperti disuarakan Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) Deddy Suwadi Siregar SH, dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Sebab, status Sultan Hamengku Buwono X saat ini hanyalah gubernur yang masa jabatannya diperpanjang. Bukan gubernur dengan masa jabatan penuh satu periode, lima tahun.

"Kalau ada pelantikan jadi lucu," kritik Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIJ Heniy Astiyanto SH kemarin. Ia menilai keputusan pemerintah tidak menggelar pelantikan sudah tepat. Masalah justru akan muncul bila dewan malah nekat bakal mengadakan pelantikan.

"Pelantikan gubernur yang diperpanjang masa jabatannya tak punya landasan hukum. Oleh karena itu harus ditolak," urai alumni FH UII Jogja itu. Dikatakan, bila dewan tetap menggelar pelantikan bukan saja akan membingungkan rakyat. Namun tindakan itu merupakan tindakan yang tidak mendidik.

Heniy menasehati agar dewan tidak perlu bingung memanfaatkan anggaran Rp 500 juta yang telanjur diplot di APBD Perubahan 2008. Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai advokat itu menyarankan, anggaran itu dialihkan untuk membiayai kegiatan yang menyentuh kebutuhan rakyat secara langsung.

Dalam kesempatan itu, Heniy juga berharap dewan agar berbesar hati. Meski telah membuat keputusan penetapan gubernur selama lima tahun 2008-20013, tapi pemerintah hanya membuat keppres perpanjangan selama tiga tahun 2008-2011 dewan harus bersedia menerimanya. "Toh HB X saja bersedia menerima," lanjut dia. **(kus)**

Pelantikan Dibawa ke Mendagri

Anggaran Rp 500 Juta Tetap Dipertahankan

GONJANG GANJING KEISTIMEWAAN

JOGJA – Tekad FPG DPRD DIJ menggelar pelantikan gubernur DIJ hasil perpanjangan masa jabatan 2008-2011 telah bulat. Ini dibuktikan dengan disepakatinya rencana mengonsultasikan pelantikan itu untuk ke Mendagri Mardiyanto.

"Kami jadikan daftar inventaris masalah (DIM) untuk dibicarakan dengan Depdagri," kata Ketua FPG Deddy Suwadi Siregar usai mengikuti rapat kerja Panitia Anggaran (Panggar) DPRD DIJ petang kemarin.

Rencananya selama dua hari, Senin (13/10) dan Selasa (14/10), anggota Panggar DPRD DIJ kembali akan ngelencer ke Jakarta. Tujuannya untuk berkonsultasi dengan Depdagri terkait rencana pengesahan APBD Perubahan DIJ 2008. Deddy mengatakan, saat konsultasi itu, pihaknya juga akan meminta Mendagri datang ke Jogja mengadakan acara pelantikan.

Dalam rapat itu, Deddy berhasil menghadang rencana pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua Dewan Agus Sulistiyono mendrop anggaran pelantikan Rp 500 juta

▸ Baca Pelantikan... Hal 13

HALAMAN SAMBUNGAN

■ PELANTIKAN

Sambungan dari hal 3

Rapat tetap menyepakati mempertahankan anggaran tersebut. Keputusan apakah anggaran akan direalisasikan atau dibatalkan, diputuskan sepulang dari Jakarta.

Berbeda dengan rapat panggar sebelumnya, selain Agus nyaris tak ada satu pun anggota dewan yang berupaya mengganjal perjuangan FPG. Sudradjat Selorudjito dari FPAN secara terbuka memberikan apresiasi atas sikap Deddy. "Kalau bisa dilaksanakan, kita dukung Pak Deddy," kata Sudradjat.

Setali tiga uang, anggota FPKS Tri Harjono menyatakan bila FPG berhasil meyakinkan HB X dan PA IX bersedia datang dalam pelantikan, itu akan dicatat sejarah.

Pertanyaan malah muncul dari srikandi PDIP Esti Wijayati. Ia meragukan rencana tersebut berhasil. Alasannya, HB X sudah menyatakan pelantikan tidak diperlukan karena dirinya hanya diperpanjang masa jabatannya dan bukan pejabat baru. "Lalu siapa yang akan dilantik kalau beliaunya (HB X) saja nggak bersedia," tanya Esti. **(kus)**

GKMM Minta Dukungan Kulonprogo

GKMM (Gerakan Kawula Mataram Manunggal) meminta dukungan masyarakat Kulonprogo agar turut dalam Pisowanan Ageng 28 Oktober mendatang. Permintaan dukungan tersebut disampaikan Ketua GKMM Jiyono saat bertemu dengan Bupati Kulonprogo Toyo S Dipo di Joglo Pemkab, Sabtu (11/10).

Baca GKMM... Hal 13

HALAMAN SAMBUNGAN

GKMM

Sambungan dari hal 3

Dikatakan, upaya dukungan dari warga Kulonprogo itu sebagai upaya penggalangan massa untuk menghadiri Pisowanan Agung dengan target 500.000 orang. Pisowanan Agung ini nantinya akan berisi penyampaian aspirasi dari empat kabupaten dan kota mengenai RUUK dan penetapan.

Dengan konsep acara yang hampir sama dengan Pisowanan terdahulu hanya saja target massa untuk kali ini lebih besar. "Pisowanan ini akan dilangsungkan tanggal 28 Oktober pukul 13.00 sampai 17.00, dengan 500 ribu warga,"ujar Ketua GKMM Jiyono.

Jiyono menambahkan dalam Pisowanan ini diharapkan masyarakat Kulonprogo dapat ikut ambil bagian. Tidak hanya dari kalangan pemkab dan perangkat desa saja, namun seluruh aspek masyarakat diikutsertakan. "Kita akan kumpul di alun-alun utara untuk menyampaikan aspirasi kita," jelas Jiyono.

Sebab menurutnya, perjuangan rakyat yang dimulai sejak tahun 2000 sampai sekarang untuk keistimewaan belumlah menampakkan hasilnya."Draftnya bertentangan dengan aspirasi masyarakat. Sehingga diperlukan gerakan untuk mendesak pemerintah melakukan upaya jemput bola mengenai rancangan RUUK ini," tambahnya.

Jiyono menegaskan, datang ke Kulonprogo untuk meminta dukungan. "Dukungan moral dan dukungan massa,"ujar Jiyono menyampaikan maksud kedatangannya.

Karena tanpa dukungan semua pihak acara pisowanan ini tidak akan dapat dilaksanakan optimal. Dengan keikutsertaan seluruh masyrakat acara ini juga sebagai simbol kekompakan seluruh rakyat Jogja.

Bupati Toyo S Dipo pun menyatakan dukungannya dengan adanya pisowanan ini. hanya saja Toyo menegaskan jangan sampai terjadi hal-hal yang dapat menuntunkan kesolidan masyarakat Jogjakarta. "Saya mendukung saja, apalagi dengan adanya perpanjangan masa jabatan Gubernur dirasa cukup untuk melakukan penyelesaian,"ucap Toyo.**(ew3)**

PKS Inginkan Referendum

Untuk Tentukan Bentuk Kepemimpinan DIJ

JOGJA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan dilakukan referendum dengan meminta pendapat masyarakat Jogja untuk penentuan status keistimewaan DIJ. Sikap PKS terhadap keistimewaan Jogja ini akan mengacu pada hasil referendum.

Presiden PKS Tifatul Sembiring mengatakan, referendum bukan dimaksudkan untuk menentukan Jogja harus bergabung atau terpisah dengan NKRI. Tapi untuk menentukan bentuk kepemimpinan Jogja.

Tifatul beralasan, hanya Jogja yang masih mempunyai situs kuat sejarah kerajaan. "Referendum bukan semata-mata otomatis akan diberlakukan, tapi juga menunggu keputusan DPR," jelas Tifatul, usai mengikuti syawalan bersama kader PKS di Auditorium UPN Jogja, kemarin.

Tifatul menilai referendum adalah langkah yang paling tepat, mengingat banyak hal yang harus diperhatikan dalam mempertahankan keistimewaan status Jogja. "Sikap kami hanya wait and see saja. Mana yang terbaik, tergantung keputusan masyarakat Jogja sendiri," imbuhnya.

YOGI OLIVI/RADAR JOGJA

Tifatul Sembiring

Soal mekanisme referendum, lanjutnya, bisa pemungutan suara secara umum dengan beberapa opsi yang sebelumnya bisa dilakukan kesepakatan masyarakat Jogja. Di antaranya apakah masyarakat menginginkan jabatan Sri Sultan HB X dan Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur seumur hidup, atau dibatasi waktu tertentu.

"Bisa juga dipilih oleh DPRD atau Sultan menunjuk seseorang yang nantinya akan dipilih oleh DPRD," terangnya.

Baca PKS... Hal 9

HALAMAN SAMBUNGAN

Diperlukan Perpu Agar Lebih Kuat

PKS

Sambungan dari hal 3

Salah satu faktor perlunya referendum, kata Tifatul, karena Sultan tidak mempunyai anak laki-laki sebagai penerusnya. "Sehingga, suara masyarakat Jogja harus diperhatikan," tandasnya.

Dikatakan, keinginan untuk referendum bukan masalah jegal-menjegal dalam kepentingan politik tertentu, tapi demi kemaslahatan dan masa depan rakyat Jogja. "Bagaimana pun kita tidak boleh menghapus sejarah bagaimana Jogja bergabung dengan Indonesia, tanpa menghapus keinginan masyarakat Jogja. Ini demokrasi, kalau masyarakat menginginkan pemilihan gubernur melalui pilkada, ya silakan saja," tegasnya.

Ia berharap referendum bisa dilaksanakan tahun 2009 mendatang. Saat ini pihaknya sedang melakukan pendekatan melalui lobi-lobi di tingkat fraksi DPR. Soal masa jabatan HB X yang diperpanjang tiga tahun, Tifatul menyatakan setuju. Hanya saja putusan melalui Keppres dinilai tidak terlalu kuat. Mengingat perpanjangan tiga tahun bukanlah waktu yang lama.

Tifatul mengimbau pemerintah segera mengeluarkan Perpu (Peraturan Pengganti Undang-Undang) yang substansinya lebih kuat dibanding keppres. Perpu mendesak lantaran pembahasan RUUK Jogja berkejar-kejaran dengan UU Pilpres. "Diperlukan Perpu supaya lebih kuat. Itu yang harus dilakukan pemerintah SBY-JK," imbaunya.

Pemerintah juga diminta mengkaji lebih jauh dari sisi historis Jogja, termasuk perjanjian hak-hak Sultan dan pandangan masyarakat terhadap Sultan." Harapan masyarakat Jogja terhadap Sultan juga harus terakomodasi," pinta Tifatul. (yog)

Toyo Dukung Pisowanan

KULONPROGO - Gerakan Kawula Mataram Manunggal (GKMM) menemui Bupati Kulonprogo Toyo S Dipo di Joglo Pemkab. Kepada Bupati, GKMM menyampaikan rencana menghadiri Pisowanan Agung yang digelar 28 Oktober mendatang.

Acara ini bakal diikuti 500 ribu orang. Ketua GKMM Jiyono mengatakan, masyarakat Kulonprogo diharapkan dapat mengikuti Pisowanan.

"Kami datang ke Kulonprogo untuk meminta dukungan moral dan dukungan massa," kata Jiyono.

Karena tanpa dukungan semua pihak, pisowanan tidak akan dapat dilaksanakan optimal. Menjawab permintaan tersebut, Bupati Toyo S Dipo menyatakan dukungannya.

Hanya, Toyo berharap pisowanan jangan sampai meruntuhkan kesolidan masyarakat Jogja. "Saya mendukung pisowanan ini. Asal tidak sampai terjadi perpecahan," pintanya.

Sedangkan Ketua Bodronoyo Sukarman menyatakan, adanya persetujuan Bupati, Bodronoyo dapat mengajak sekitar 30 ribu orang untuk mengikuti Pisowanan. **(cw3)**